



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI**

# 2022



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB. Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan

*civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas, M.Si.

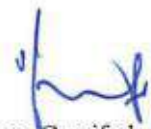
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PANRB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023

Inspektur Kementerian PANRB



Aan Syaiful Ambia

NIP. 196709161988031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022. Kementerian PANRB pada tahun 2022 memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan total 18 (delapan belas) indikator kinerja, dan 26 (dua puluh enam) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 26 (dua puluh enam) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 17 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

### Tujuan 1

#### Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing

| No | Sasaran Strategis                                                                                       | Indikator Kinerja                                                |          | Target       | Realisasi       | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| 1  | Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional         |          | 62 (Efektif) | 69,48 (Efektif) | 112,06      |
|    |                                                                                                         | Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas | K/L      | 80%          | 70,83%          | 88,54       |
|    |                                                                                                         |                                                                  | Prov     | 60%          | 58,82%          | 98,03       |
|    |                                                                                                         |                                                                  | Kab/Kota | 30%          | 29,33%          | 97,76       |
|    |                                                                                                         | Indeks SPBE Nasional                                             |          | 2,3          | 2,34            | 101,74      |
| 2  | Terwujudnya ASN yang Profesional                                                                        | Indeks BerAKHLAK                                                 |          | 10%          | 60,9%           | 609,00      |
| 3  | Terwujudnya Instansi                                                                                    | Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional                 |          | 68           | 67,93*          | 99,90       |

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja                                                                                |          | Target   | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
|    | Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel       | Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"                                | K/L      | 93,90%   | 95,06%    | 101,24      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Prov     | 100%     | 100,00%   | 100,00      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Kab/Kota | 69,88%   | 72,05%    | 103,11      |
| 4  | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas  | Jumlah unit kerja Percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (Kumulatif) |          | 850 Unit | 809 Unit  | 95,18       |
| 5  | Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima     | Indeks Pelayanan Publik Nasional                                                                 |          | 3,50     | 3,88      | 110,86      |
| 6  | Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional | Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                                                    | K/L      | 75       | 75,65     | 100,87      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Prov     | 65       | 65,63     | 100,97      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Kab/Kota | 55       | 53,44     | 97,16       |
|    |                                                      | Persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"                                 | K/L      | 92,70%   | 98,77%    | 106,55      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Prov     | 88,20%   | 88,24%    | 100,05      |
|    |                                                      |                                                                                                  | Kab/Kota | 30,31%   | 32,28%    | 106,50      |

## Tujuan 2

### Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel

| No | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                                 | Target               | Realisasi                | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 7  | Terwujudnya Kelembagaan Kementerian PANRB yang Efektif dan Efisien               | Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB | Skor 73,85 (Efektif) | 82,637* (Sangat Efektif) | 111,90      |
|    |                                                                                  | Indeks SPBE Kementerian PANRB                                     | 2,89 (Baik)          | 3,01 (Baik)              | 104,15      |
| 8  | Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang Profesional, Berintegritas, dan Sejahtera | Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB                             | 0.8                  | 0,89                     | 111,25      |
|    |                                                                                  | Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB                      | 72                   | NA                       | NA          |

| No | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 8  | Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang Profesional, Berintegritas, dan Sejahtera | Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB              | 82     | 82,12*    | 100,15      |
|    |                                                                                  | Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB | 85     | 85,74*    | 105,85      |
|    |                                                                                  | Opini BPK                                               | WTP    | WTP       | 100         |
| 10 | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB                                        | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB               | 4.05   | 4,51      | 111,36      |

Keterangan :

\* : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2021

Kinerja keuangan Kementerian PANRB tahun 2022 menunjukkan realisasi sebesar Rp236.298.093.372,- atau 99,69% dari total pagu anggaran sebesar 237.035.819.000,- .

Capaian kinerja Kementerian PANRB diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                       | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>   |
| <b>A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....</b> | <b>1</b>   |
| <b>B. Mandat dan Peran Strategis.....</b>             | <b>4</b>   |
| <b>C. Sistematika Laporan .....</b>                   | <b>5</b>   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                | <b>6</b>   |
| <b>A. Rencana Strategis 2020-2024.....</b>            | <b>6</b>   |
| <b>B. Prioritas Nasional Tahun 2022 .....</b>         | <b>8</b>   |
| <b>C. Perjanjian Kinerja 2022 .....</b>               | <b>10</b>  |
| <b>D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.....</b>  | <b>13</b>  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>             | <b>15</b>  |
| <b>A. Pengukuran Kinerja .....</b>                    | <b>15</b>  |
| <b>B. Analisis Capaian Kinerja.....</b>               | <b>18</b>  |
| <b>C. Capaian Kinerja Lainnya .....</b>               | <b>65</b>  |
| <b>D. Realisasi Anggaran .....</b>                    | <b>67</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                            | <b>68</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                       |            |



# BAB I

# PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Mandat dan Peran Strategis
3. Sistematika Laporan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

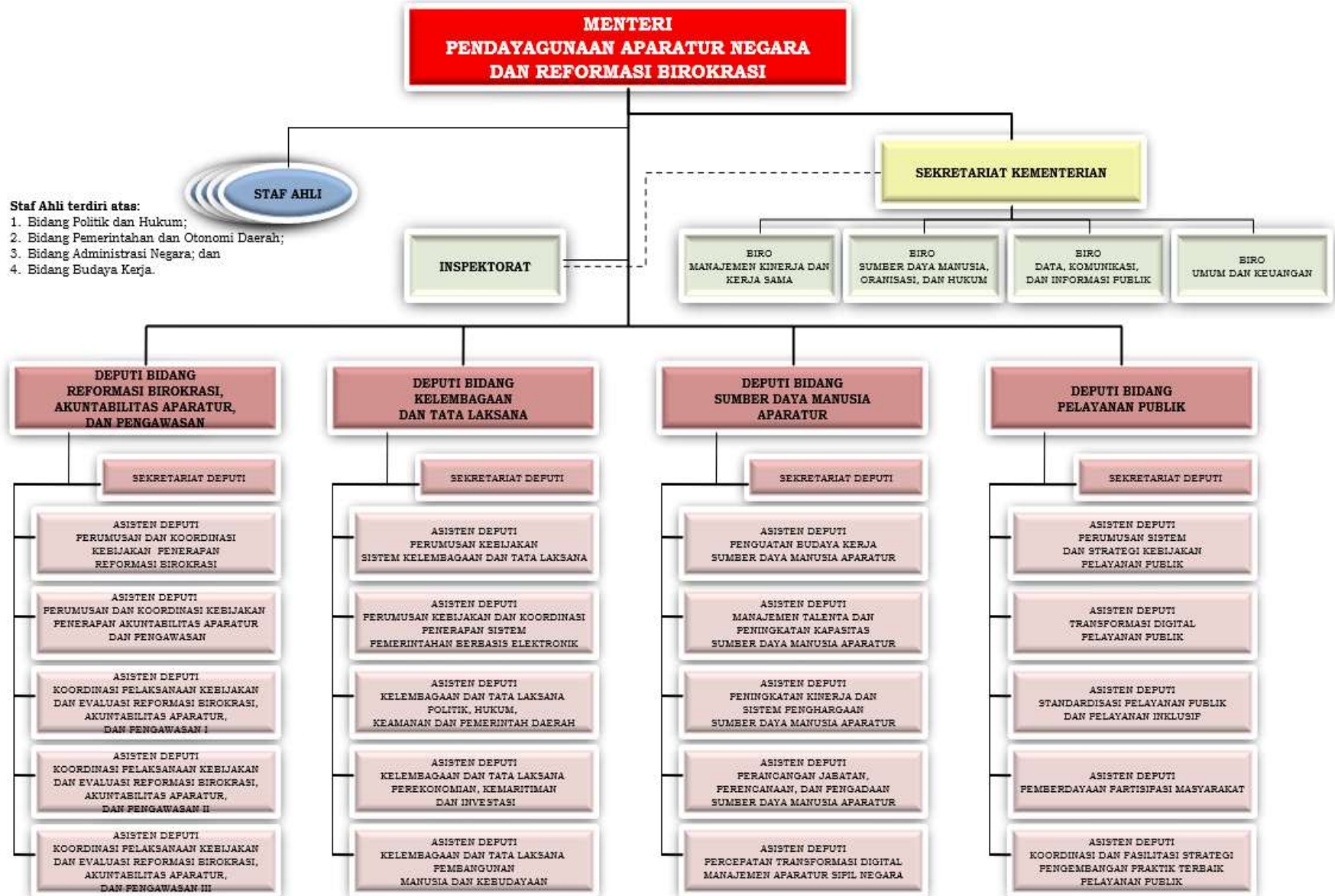
### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kementerian PANRB) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditetapkan Struktur Organisasi Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:



## **B. Mandat dan Peran Strategis**

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024, Kementerian PANRB menerima mandat yang sangat strategis, dari 5 (lima) arahan Presiden, terdapat 2 (dua) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, yaitu:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta; dan
- 2) Reformasi birokrasi, yaitu: a) kecepatan melayani dan memberi izin, b) menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; c) adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Arahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Kementerian PANRB dalam mengambil peran strategis, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PANRB 2020-2024 sebagai berikut:

1. Membangun SDM aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit yang fokus kepada sektor-sektor pilihan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter lokal;
2. Mendorong peningkatan peran diaspora dalam pembangunan bangsa dan Negara terutama pada sektor-sektor pilihan misalnya kesehatan dan pendidikan;
3. Membangun kelembagaan yang antisipatif, adaptif, dan produktif;
4. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
5. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien; dan
6. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan nasional dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, pada pelantikan Menteri PANRB pada tanggal 7 September 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan harapan terkait reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang berdampak sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas; serta
3. Birokrasi yang lincah dan cepat.

Dan untuk menjawab arahan dan harapan Presiden tersebut Menteri PANRB menetapkan 7 Program Prioritas Kementerian PANRB, yaitu:

1. Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada jutaan ASN;
2. Penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 (empat) klaster prioritas;
3. Transformasi profesionalisme ASN berbasis digital (meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional) dan penataan tenaga non-ASN (honorar);
4. Akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di seluruh Indonesia;
5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN dan DOB Papua; dan
7. Transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian PANRB.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

#### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

1. Rencana Strategis 2020-2024
2. Prioritas Nasional Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja 2022
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Renstra Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan Visi Kementerian PANRB adalah: ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia”***, dengan Misi :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik – *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global.
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian PANRB juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing; dan
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Kementerian PANRB pada akhir periode Renstra tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Kementerian PANRB  
Periode 2020-2024

| Tujuan/<br>Sasaran Strategis                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                    | Target 2024                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tujuan 1:</b><br>Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing                                                  | Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                                        | KL: 80<br>Prov: 71<br>Kab/Kota: 67       |
| <b>Sasaran Strategis 1:</b><br>Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional                             | Skor 62 (Efektif)                        |
|                                                                                                                                        | Indeks SPBE Nasional                                                                 | 2,6                                      |
|                                                                                                                                        | Jumlah K/L/Pemda yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”                                  | 371 IP                                   |
| <b>Sasaran Strategis 2:</b><br>Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera                                          | Indeks Sistem Merit                                                                  | 0,8                                      |
|                                                                                                                                        | Indeks Profesionalitas ASN                                                           | 80                                       |
| <b>Sasaran Strategis 3:</b><br>Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel                                              | Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional                                       | 71                                       |
|                                                                                                                                        | Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke Atas              | KL: 100%<br>Prov: 100%<br>Kab/Kota: 100% |
| <b>Sasaran Strategis 4:</b><br>Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas                                                     | Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis | 500<br>Unit Kerja                        |
| <b>Sasaran Strategis 5:</b><br>Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima                                                        | Indeks Pelayanan Publik Nasional.                                                    | 3,75                                     |
| <b>Sasaran Strategis 6:</b><br>Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional                                                    | Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”                 | KL: 100%<br>Prov: 100%<br>Kab/Kota: 100% |
|                                                                                                                                        |                                                                                      |                                          |
| <b>Tujuan 2:</b>                                                                                                                       | Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB                                               | 83                                       |

| Tujuan/<br>Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja                                                 | Target 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel</b>                                               |                                                                   |                   |
| <b>Sasaran Strategis 7:</b><br>Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien               | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB | Skor 61 (Efektif) |
|                                                                                                                 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB  | Sangat Baik       |
| <b>Sasaran Strategis 8:</b><br>Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera | Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB                             | 0,9               |
|                                                                                                                 | Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB                      | 80                |
| <b>Sasaran Strategis 9:</b><br>Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel              | Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB                        | 85                |
|                                                                                                                 | Opini BPK                                                         | WTP               |
| <b>Sasaran Strategis 10:</b><br>Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima              | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB                         | 3,75              |

## B. Prioritas Nasional Tahun 2022

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Kementerian PANRB diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 3 (tiga) PN, yaitu:

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas pada RKP 2022 yang terkait dengan Kementerian PANRB

| Prioritas Nasional (PN)                                                                    | Program Prioritas (PP)                                                                                                                                       | Kegiatan Prioritas (KP)                                                                                                | Proyek Prioritas (ProP)                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PN 4:<br>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        | Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter | Revolusi Mental dalam sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti | Penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi |
| PN 5:<br>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Transformasi Digital                                                                                                                                         | Pemanfaatan Infrastruktur TIK                                                                                          | Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah                                      |
| PN 7:<br>Memperkuat                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | Manajemen Talenta Nasional ASN                                          |

| Prioritas Nasional (PN)                                   | Program Prioritas (PP)              | Kegiatan Prioritas (KP)                            | Proyek Prioritas (ProP)                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi birokrasi dan tata kelola | Penguatan Implementasi Manajemen ASN               | Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN                                       |
|                                                           |                                     | Transformasi pelayanan publik                      | Pelayanan publik berbasis elektronik ( <i>e-services</i> ) yang terintegrasi |
|                                                           |                                     |                                                    | Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik                |
|                                                           |                                     |                                                    | Penguatan ekosistem inovasi                                                  |
|                                                           |                                     |                                                    | Penguatan pelayanan terpadu                                                  |
|                                                           |                                     | Penataan kelembagaan dan proses bisnis             | Penataan kelembagaan                                                         |
|                                                           |                                     |                                                    | Penerapan SPBE Terintegrasi                                                  |
|                                                           |                                     | Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | Penguatan pengelolaan reformasi Birokrasi                                    |

### C. Perjanjian Kinerja 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian pada tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PANRB pada bulan Januari 2022, kemudian dilakukan revisi pada bulan Desember 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- 1) Perubahan arah kebijakan sebagai dampak dari pergantian Menteri PANRB pada 7 September 2022;

- 2) Penyesuaian target menjadi lebih tinggi, karena target di PK yang ditandatangani pada bulan Januari 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, yaitu:
  - Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" pada tingkat kabupaten/kota.
  - Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis.
  - Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" pada tingkat Pemerintah Provinsi.
- 3) Penyesuaian target menjadi lebih rendah, karena adanya penambahan populasi yang menyebabkan penurunan variable penyebut dalam perhitungan, yaitu:
  - Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" pada tingkat K/L.
  - Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" pada pada tingkat K/L.
- 4) Penyesuaian target menjadi lebih rendah, karena target yang sebelumnya tidak realistis (sangat jauh dari realisasi tahun 2021, dan sumber daya tidak banyak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya)
- 5) Perubahan indikator "*Organization Culture Health Index*" yang ternyata menjadi sebuah merek dagang yang dipatenkan sehingga tidak dapat digunakan dengan bebas, menjadi Indeks BerAKHLAK.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

*Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2022 sebelum dan sesudah perubahan

| No. | Sasaran Strategis                                                                                        | No. | Indikator Kinerja                                                                    | Target Awal                                                | Target Revisi                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi. | 1   | Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan nasional.                                 | Skor 62 (Efektif)                                          | Skor 62 (Efektif)                                                   |
|     |                                                                                                          | 2   | Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas.                    | K/L: 80%<br>Prov: 60%<br>Kab/Kota: 30%                     | K/L: 80%<br>Prov: 60%<br>Kab/Kota: 30%                              |
|     |                                                                                                          | 3   | Indeks SPBE Nasional.                                                                | 2,3                                                        | 2,3                                                                 |
| 2   | Terwujudnya ASN yang profesional                                                                         | 1   | <i>Organization Culture Health Index</i>                                             | <b>10%</b>                                                 | <b>(dihapus)</b>                                                    |
|     |                                                                                                          | 1   | <b>Indeks BerAKHLAK</b>                                                              | <b>(tidak ada)</b>                                         | <b>10%</b>                                                          |
| 3   | Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel                                      | 1   | Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional                                       | 68                                                         | 68                                                                  |
|     |                                                                                                          | 2   | Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik”                    | <b>KL: 97%</b><br>Prov: 100%<br><b>Kab/Kota: 65%</b>       | <b>KL: 93,90%</b><br>Prov: 100%<br><b>Kab/Kota: 69,88%</b>          |
| 4   | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas                                                      | 1   | Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis | <b>380 Unit Kerja</b>                                      | <b>850 Unit (Kumulatif)</b>                                         |
| 5   | Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima                                                         | 1   | Indeks Pelayanan Publik Nasional.                                                    | 3,50                                                       | 3,50                                                                |
| 6   | Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional                                                     | 1   | Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                                        | KL: 75<br>Prov: 65<br>Kab/Kota: 55                         | KL: 75<br>Prov: 65<br>Kab/Kota: 55                                  |
|     |                                                                                                          | 2   | Persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”                     | <b>KL: 96%</b><br><b>Prov: 82%</b><br><b>Kab/Kota: 65%</b> | <b>KL: 92,70%</b><br><b>Prov: 88,20%</b><br><b>Kab/Kota: 30,31%</b> |
| 7   | Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien                                       | 1   | Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB                    | Skor 73,85 (Efektif)                                       | Skor 73,85 (Efektif)                                                |
|     |                                                                                                          | 2   | Indeks SPBE Kementerian PANRB                                                        | 2,89 (Baik)                                                | 2,89 (Baik)                                                         |

| No. | Sasaran Strategis                                                                | No. | Indikator Kinerja                                       | Target Awal | Target Revisi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 8   | Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera | 1   | Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB                   | 0,8         | 0,8           |
|     |                                                                                  | 2   | Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB            | 72          | 72            |
| 9   | Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel              | 1   | Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB              | 82          | 82            |
|     |                                                                                  | 2   | Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB | 85          | 85            |
|     |                                                                                  | 3   | Opini BPK                                               | WTP         | WTP           |
| 10  | Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima               | 1   | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB               | 4.05        | 4.05          |

Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2022 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 ini.

#### D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah RKA tahun 2022, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

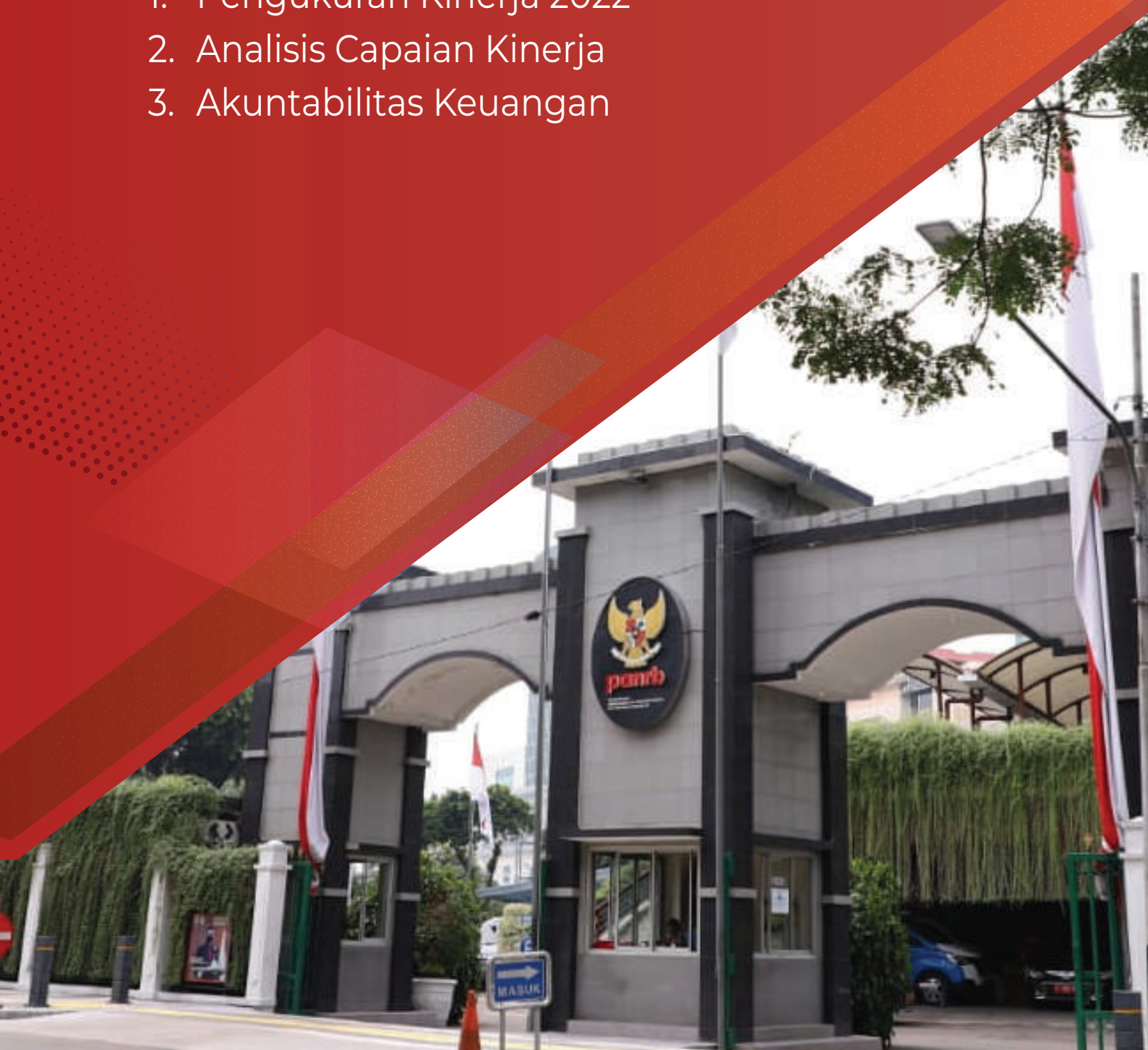
| Program-Kegiatan                                      | Anggaran (Rp)          |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                     | <b>176.272.250.000</b> |
| • Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB | 770.244.000            |
| • Pengelolaan Legislasi dan Litigasi                  | 825.267.000            |
| • Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik         | 5.871.847.000          |
| • Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum                  | 148.481.489.000        |
| • Pengelolaan Sistem dan Teknologi                    | 2.517.625.000          |

| <b>Program-Kegiatan</b>                                                                                     | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • Pengelolaan Organisasi dan SDM                                                                            | 14.144.147.000           |
| • Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal                                                 | 3.661.631.000            |
| <b>Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN</b>                                            | <b>60.763.569.000</b>    |
| • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik                                            | 2.911.076.000            |
| • Perumusan Kebijakan PANRB                                                                                 | 13.214.248.000           |
| • Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat                                                             | 1.791.886.000            |
| • Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan | 9.080.654.000            |
| • Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                              | 11.736.714.000           |
| • Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana                                 | 6.089.352.000            |
| • Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur                                              | 4.455.017.000            |
| • Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik                                            | 11.484.622.000           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                               | <b>237.035.819.000</b>   |

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja 2022
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PANRB Tahun 2022. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri PANRB merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra Kementerian PANRB 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 133,32% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis 1<br>Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi. |                                                                  |           |              |                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| N<br>o                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                |           | Target       | Realisasi       | Capaian (%) |
| 1                                                                                                                               | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional         |           | 62 (Efektif) | 69,48 (Efektif) | 112,06      |
| 2                                                                                                                               | Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas | K/L       | 80%          | 70,83%          | 88,54       |
|                                                                                                                                 |                                                                  | Prov      | 60%          | 58,82%          | 98,03       |
|                                                                                                                                 |                                                                  | Kab/ Kota | 30%          | 29,33%          | 97,76       |
| 3                                                                                                                               | Indeks SPBE Nasional                                             |           | 2,3          | 2,34            | 101,74      |
| Sasaran Strategis 2<br>Terwujudnya ASN yang Profesional                                                                         |                                                                  |           |              |                 |             |
| 1                                                                                                                               | Indeks BerAKHLAK                                                 |           | 10%          | 60,9%           | 609         |
| Sasaran Strategis 3<br>Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel                                      |                                                                  |           |              |                 |             |

|                                                                                           |                                                                                      |           |                       |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------|
| 1                                                                                         | Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional                                       |           | 68                    | 67,93*   | 99,90  |
| 2                                                                                         | Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"                    | K/L       | 93,90%                | 95,06%   | 101,24 |
|                                                                                           |                                                                                      | Prov      | 100%                  | 100%     | 100    |
|                                                                                           |                                                                                      | Kab/ Kota | 69,88%                | 72,05%   | 103,11 |
| Sasaran Strategis 4<br>Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas                |                                                                                      |           |                       |          |        |
| 1                                                                                         | Jumlah Unit Kerja Percontohan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis |           | 850 Unit (Akumulatif) | 809 Unit | 95,18  |
| Sasaran Strategis 5<br>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima                   |                                                                                      |           |                       |          |        |
| 1                                                                                         | Indeks Pelayanan Publik Nasional                                                     |           | 3,50                  | 3,88     | 110,86 |
| Sasaran Strategis 6<br>Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional               |                                                                                      |           |                       |          |        |
| 1                                                                                         | Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                                        | K/L       | 75                    | 75,65*   | 100,87 |
|                                                                                           |                                                                                      | Prov      | 65                    | 65,63*   | 100,97 |
|                                                                                           |                                                                                      | Kab/ Kota | 55                    | 53,44*   | 97,16  |
| 2                                                                                         | Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"                 | K/L       | 92,70%                | 98,77%   | 106,55 |
|                                                                                           |                                                                                      | Prov      | 88,20%                | 88,24%   | 100,05 |
|                                                                                           |                                                                                      | Kab/ Kota | 30,31%                | 32,28%   | 106,50 |
| Sasaran Strategis 7<br>Terwujudnya Kelembagaan Kementerian PANRB yang Efektif dan Efisien |                                                                                      |           |                       |          |        |

|                                                                                                                       |                                                                   |                      |                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 1                                                                                                                     | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB | Skor 73,85 (Efektif) | 82,637* (Sangat Efektif) | 111,90 |
| 2                                                                                                                     | Indeks SPBE Kementerian PANRB                                     | 2,89                 | 3,01 (Baik)              | 104,15 |
| <b>Sasaran Strategis 8</b><br><b>Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang Profesional, Berintegritas, dan Sejahtera</b> |                                                                   |                      |                          |        |
| 1                                                                                                                     | Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB                             | 0,8                  | 0,89                     | 111,25 |
| 2                                                                                                                     | Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB                      | 72                   | N/A                      | N/A    |
| <b>Sasaran Strategis 9</b><br><b>Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkinerja Tinggi, dan Akuntabel</b>              |                                                                   |                      |                          |        |
| 1                                                                                                                     | Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB                        | 82                   | 82,12*                   | 100,15 |
| 2                                                                                                                     | Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB           | 85                   | 85,74*                   | 105,85 |
| 3                                                                                                                     | Opini BPK                                                         | WTP                  | WTP                      | 100    |
| <b>Sasaran Strategis 10</b><br><b>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang Prima</b>              |                                                                   |                      |                          |        |
| 1                                                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB                         | 4,05                 | 4,51                     | 111,36 |

Keterangan :

\* : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 17 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Nilai Pelaksanaan RB Nasional masih menggunakan realisasi tahun 2021, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2022 belum selesai yaitu. Sedangkan indikator Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB realisasi ditulis “N/A” karena pada tahun 2022 sudah tidak dilakukan pengukuran, digantikan dengan Indeks BerAKHLAK.

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi” adalah sebagai berikut:

| Indikator |                                                                  | Target       | Realisasi       | Capaian (%) |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| 1.1       | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional         | 62 (Efektif) | 69,48 (Efektif) | 112,06      |       |
| 1.2       | Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas | K/L          | 80%             | 70,83%      | 88,54 |
|           |                                                                  | Prov         | 60%             | 58,82%      | 98,03 |
|           |                                                                  | Kab/ Kota    | 30%             | 29,33%      | 97,76 |
| 1.3       | Indeks SPBE Nasional                                             | 2,3          | 2,34            | 101,74      |       |

### 2.1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis. Organisasi yang baik tidak hanya dilihat dari bentuk strukturnya, tetapi juga bagaimana organisasi tersebut berproses untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.

Mengingat organisasi bersifat dinamis, maka perlu dilakukan evaluasi kelembagaan bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Evaluasi ini dilakukan mengingat tantangan organisasi ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut.

Hasil evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan, dan mengacu pada Permen-PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Dalam Permen-PANRB tersebut juga disebutkan terdapat 5 (lima) tingkatan efektivitas kelembagaan yaitu:

| No | Skor   | Peringkat                  | Interpretasi   |
|----|--------|----------------------------|----------------|
| 1. | 81-100 | Peringkat Komposit 5 (P-5) | Sangat Efektif |
| 2. | 61-80  | Peringkat Komposit 4 (P-4) | Efektif        |
| 3. | 41-60  | Peringkat Komposit 3 (P-3) | Cukup Efektif  |
| 4. | 21-40  | Peringkat Komposit 2 (P-2) | Kurang Baik    |
| 5. | 0-20   | Peringkat Komposit 1 (P-1) | Tidak Baik     |

Hasil capaian Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional adalah 69,48 ("efektif"). Skor ini merupakan hasil validasi terhadap 132 K/L/Pemda yang telah menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan mandiri dari tahun 2020 s.d 2022 yang terdiri dari 47 K/L, 7 Provinsi dan 78 Kab/Kota yang dapat dilihat tabel berikut ini:

| No | Objek Evaluasi      | Peringkat Komposit |             |               |         |                |
|----|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|    |                     | Tidak Baik         | Kurang Baik | Cukup Efektif | Efektif | Sangat Efektif |
| 1  | K/L                 | -                  | -           | 1             | 34      | 12             |
| 2  | Pemerintah Provinsi | -                  | -           | -             | 7       | -              |
| 3  | Pemerintah Kab/Kota | -                  | -           | 7             | 70      | 1              |

Adapun nilai hasil evaluasi kelembagaan masing-masing K/L/Pemda dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Untuk memenuhi target indikator Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional, Kementerian PANRB telah melakukan kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Penataan organisasi kelembagaan nasional (K/L/Pemda) berupa penyederhanaan birokrasi, dan penyusunan beberapa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian/Lembaga.
- 2) Fasilitasi penetapan proses bisnis pada instansi pemerintah.
- 3) Pengolahan hasil evaluasi mandiri oleh tim verifikasi untuk mendapatkan hasil akhir penilaian evaluasi kelembagaan secara terukur.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2023 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya :

- 1) Mengkaji kembali instrumen validasi hasil evaluasi kelembagaan, sehingga hasil validasi atas evaluasi kelembagaan dapat benar-benar mencerminkan kondisi kelembagaan pada K/L/Pemda tersebut. Dengan adanya instrument dapat menjadi pedoman yang lebih akurat bagi tim penilai/validasi hasil evaluasi kelembagaan sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif;
- 2) Mendorong K/L/Pemda yang belum melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri untuk dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai yang diatur pada Permen-PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
- 3) Mengkaji kembali deskripsi target dan capaian, sehingga dapat lebih mencerminkan sejauh mana evaluasi kelembagaan terhadap K/L/Pemda sudah dilakukan.

Perbandingan realisasi Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

**Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional  
Tahun 2020 s.d 2022**

| <b>Realisasi<br/>2020</b> | <b>Realisasi<br/>2021</b> | <b>Realisasi<br/>2022</b> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 73,98<br>(Efektif)        | 67,06<br>(Efektif)        | 69,48<br>(Efektif)        |

## 2.2 Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda. Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda.

Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2022 menggunakan Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

| No | Nilai Indeks | Predikat    |
|----|--------------|-------------|
| 1. | 4,2 - 5,0    | Memuaskan   |
| 2. | 3,5 - <4,2   | Sangat Baik |
| 3. | 2,6 - <3,5   | Baik        |
| 4. | 1,8 - <2,6   | Cukup       |
| 5. | < 1,8        | Kurang      |

Hasil pengukuran Indeks Maturitas SPBE pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No    | K/L/Pemda           | Jumlah yang dievaluasi | Predikat “Baik” ke atas | %     |
|-------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| 1     | K/L                 | 96                     | 68                      | 70,83 |
| 2     | Pemerintah Provinsi | 34                     | 20                      | 58,82 |
| 3.    | Pemerintah Kab/Kota | 490                    | 149                     | 29,33 |
| Total |                     | <b>620</b>             | <b>159</b>              |       |

Nama K/L/Pemda yang telah mencapai predikat SPBE “Baik” dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Perbandingan realisasi Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

**Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas  
Tahun 2020 s.d 2022**

| <b>K/L/Pemda</b>     | <b>Realisasi<br/>2020</b> | <b>Realisasi<br/>2021</b> | <b>Realisasi<br/>2022</b> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| K/L                  | 75,82%                    | 53,26%                    | 70,83%                    |
| Pemerintah Provinsi  | 61,76%                    | 50%                       | 58,82%                    |
| Pemerintah Kab/ Kota | 32,85%                    | 23,79%                    | 29,33%                    |

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 adalah karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### **2.3 Indeks SPBE Nasional**

Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2022 menghasilkan Indeks SPBE Nasional sebesar 2,34. Terjadi kenaikan sebesar 0,10 dari nilai indeks sebelumnya yaitu 2,24 pada tahun 2021. Realisasi tersebut sudah mencapai 101,71% dari yang ditargetkan di tahun 2022 yaitu 2,30.

Adapun Perbandingan realisasi Indeks SPBE Nasional tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

**Indeks SPBE Nasional Tahun 2020 s.d 2022**

| <b>Realisasi<br/>2020</b> | <b>Realisasi<br/>2021</b> | <b>Realisasi<br/>2022</b> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2,26                      | 2,24                      | 2,34                      |

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 pada indikator ini juga, karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan Pada Forum SPBE Summit**

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas dan Indeks SPBE Nasional, pada Tahun 2022 adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan yang lebih fokus dan memprioritaskan K/L/Pemda dengan Indeks SPBE yang masih di bawah “Baik”;
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi maturitas SPBE kepada 620 K/L/Pemda, dalam rangka mengetahui sudah sejauh mana pembangunan SPBE pada setiap K/L/Pemda, dan perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan target-target yang diharapkan.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas dan Indeks SPBE Nasional pada tahun 2023, diantaranya:

- 1) Melakukan asistensi (pendampingan) dan piloting kepada K/L/Pemda dalam rangka peningkatan penerapan dan perbaikan Indeks SPBE sesuai arah dan tujuan penerapan SPBE yang terpadu dan terintegrasi;

- 2) Meminta seluruh K/L/Pemda agar melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian PANRB untuk dilakukan penilaian dokumen (*desk evaluation*); dan
- 3) Melakukan evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang belum dievaluasi pada tahun 2023 untuk penyempurnaan data *baseline* hasil evaluasi SPBE secara menyeluruh.

## Sasaran Strategis 2 Terwujudnya ASN yang Profesional

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya ASN yang Profesional” adalah sebagai berikut:

| Indikator            | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 2.1 Indeks BerAKHLAK | 10%    | 60,9%     | 609         |

### 2.1 Indeks BerAKHLAK

BerAKHLAK adalah akronim dari **B**erorientasi pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif, yang merupakan *core values* ASN yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 27 Juli 2021. Dengan adanya *core values* ASN BerAKHLAK, Kementerian PANRB melakukan penyesuaian alat ukur dalam penilaian Sasaran Terwujudnya ASN yang Profesional. Pengukuran sebelumnya dilakukan menggunakan Indeks Profesionalitas ASN sedangkan pada tahun 2022 diubah menjadi Indeks BerAKHLAK.

Indeks BerAKHLAK adalah suatu cara untuk mengukur maturitas penguatan budaya kerja di seluruh instansi pemerintah. Pengukuran ini dilakukan oleh Kementerian PANRB, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam diseminasinya. Tujuan dilakukannya pengukuran yaitu:

- 1) Mengetahui *baseline* tingkat kesehatan budaya organisasi di antaranya mengenai implementasi *core values* ASN BerAKHLAK;
- 2) Mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi; dan

3) Mengetahui aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

Terdapat 4 (empat) tingkatan penilaian Indeks BerAKHLAK seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

| Nilai Indeks | Predikat           |
|--------------|--------------------|
| 75-100       | Sehat              |
| 50-<75       | Cukup Sehat        |
| 25-<50       | Tidak Sehat        |
| 0-<25        | Sangat Tidak Sehat |

Pengukuran Indeks BerAKHLAK tahun 2022 merupakan tahun pertama, sehingga hasil dari survei ini akan menjadi *baseline* di tahun berikutnya. Hasil dari survei ini juga akan menjadi pertimbangan untuk kebijakan manajemen ASN pada tahun berikutnya. Penyusunan instrumen dan pengukuran indeks dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga. Sebelum pelaksanaan survei, dilakukan *IT Security Assessment* dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar meminimalkan upaya pembajakan serta upaya lain yang mengakibatkan kerugian bagi responden. Dalam menyebarluaskan informasi terkait Survei Indeks BerAKHLAK ini, diterbitkan Surat Sekretaris Menteri PANRB Nomor B/96/S.SM.00.00/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permohonan Pengisian Survei Budaya Kerja ASN 2022. Surat ini ditujukan kepada para Sekretaris Jenderal/ Kementerian/ Utama/ Daerah pada instansi pemerintah.

Adapun dalam survei tersebut, masing-masing responden diminta untuk memilih sub nilai yang terdapat dalam beberapa nilai yaitu:

- 1) Nilai pribadi;
- 2) Nilai unit kerja saat ini;
- 3) Nilai unit kerja yang diharapkan;
- 4) Nilai organisasi saat ini; dan
- 5) Nilai organisasi yang diharapkan.

Dalam rangka memaksimalkan target responden survei, Kementerian PANRB melaksanakan sosialisasi dan diseminasi Survei Indeks BerAKHLAK secara masif. Sosialisasi dan diseminasi tersebut dilaksanakan pada instansi daerah khususnya di wilayah tengah dan timur mengingat adanya kendala

infrastruktur dan kendala teknis lainnya. Selain di tingkat daerah, kegiatan tersebut juga dilaksanakan pada tingkat kementerian/lembaga.



**Gambar 3.2 Deputi SDM Aparatur dalam Kick Off ASN Culture Fest 2022**

Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan diseminasi Survei Indeks BerAKHLAK secara masif tersebut, sebanyak 442 instansi pemerintah memenuhi minimum responden dari 621 instansi pemerintah yang dilakukan survei. Penentuan pemenuhan minimum responden pada survei tersebut menggunakan rumus slovin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

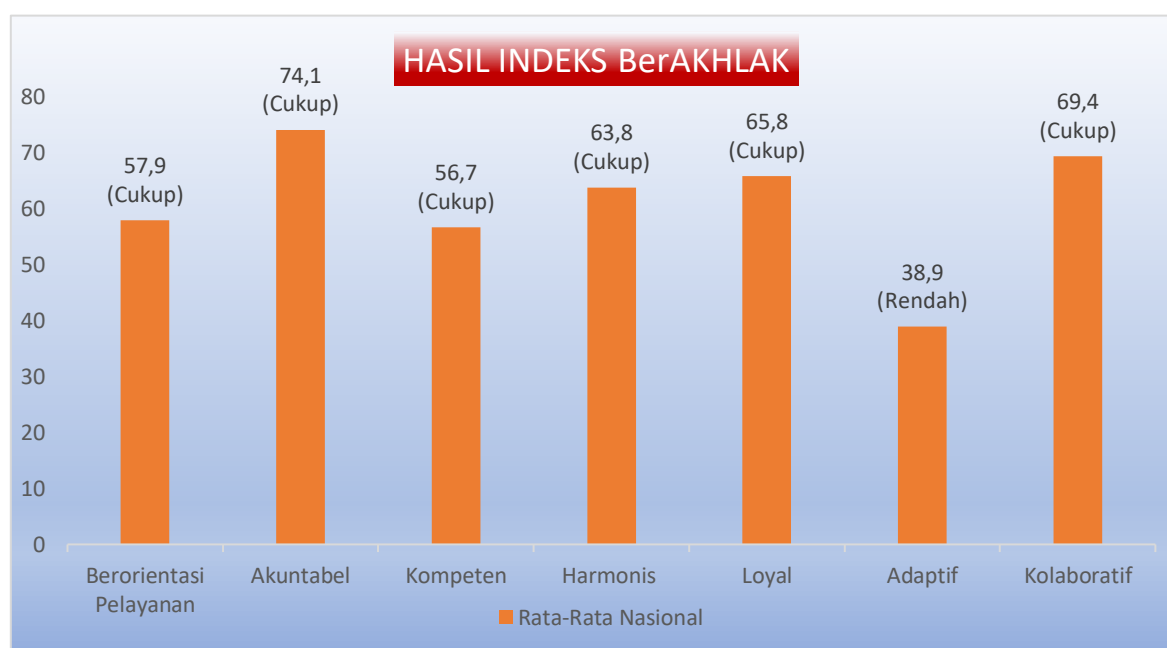
Keterangan:

$n$  = Ukuran sampel/jumlah responden

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir;  $e = 0,1$ .

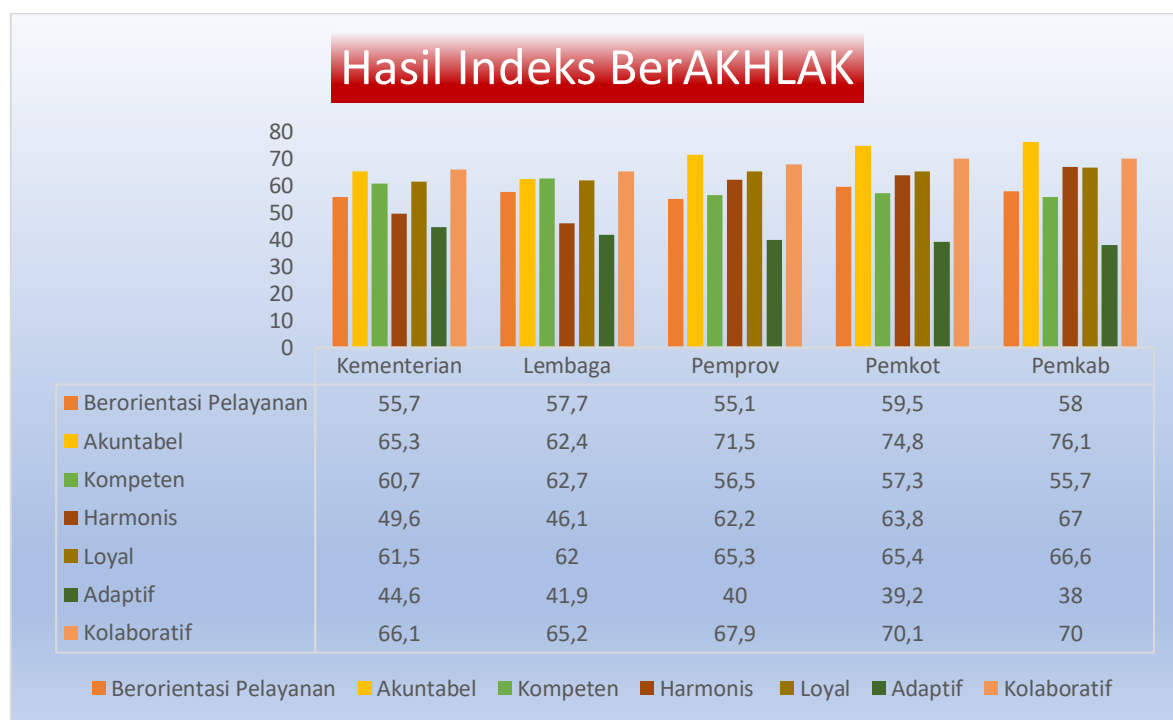
Skor Indeks BerAKHLAK didapatkan dari hasil survei terhadap instansi pemerintah yang telah memenuhi minimum responden. Hasil survei tersebut menghasilkan Nilai Rata-rata Indeks BerAKHLAK Nasional sebesar 60,9% atau dalam kategori Cukup. Capaian tersebut telah dipublikasikan pada acara ASN *Culture Fest* Tahun 2022 yang diadakan pada tanggal 6 Desember 2022. Adapun rata-rata nasional untuk masing-masing komponen pada Indeks BerAKHLAK adalah sebagai berikut, yaitu:



Keberhasilan dalam mencapai realisasi ini tidak lepas dari kegiatan sosialisasi dan internalisasi yang telah gencar dilakukan Kementerian PANRB sejak tahun 2021. Pada akhir tahun 2021, Kementerian PANRB juga sempat melakukan survei *awareness* terhadap *core values* BerAKHLAK. Berdasarkan survei tersebut didapatkan hasil realisasi yang rendah sebesar 9%. Dengan adanya hasil tersebut, Kementerian PANRB membuat *roadmap* sebagai *guidelines* dalam perumusan rencana aksi yang dapat diterapkan di masing-masing instansi pemerintah. Pembuatan *roadmap* tersebut berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kemendagri.

Dalam rangka menggerakkan budaya BerAKHLAK, Kementerian PANRB telah membentuk tim penggerak budaya kerja, yang terdiri dari pejabat dan pegawai Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan KASN. Selain itu, Kementerian

PANRB juga selalu membuat program yang bersifat dua arah dan selalu ada kontribusi dari instansi pemerintah yang terlibat. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk *talkshow*, *podcast value talk series*, dan *culture fest*. Berbagai program dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk berkreasi sesuai dengan konsep masing-masing dalam upaya penguatan budaya kerja.



Rata-rata hasil skor Indeks BerAKHLAK Jika dilihat berdasarkan kluster yakni kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten, dapat dilihat pada grafik di atas.

Secara umum, Indeks BerAKHLAK pada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten berada dalam kategori cukup. Selain itu, dari hasil di atas dapat terlihat interpretasi nilai sebagai berikut:

- 1) Implementasi nilai adaptif secara nasional berada dalam kategori rendah;
- 2) Implementasi nilai harmonis dan adaptif di lingkungan kementerian/lembaga dalam kategori rendah;
- 3) Implementasi nilai akuntabel di pemerintah kabupaten sudah mencapai kategori sehat.

Untuk meningkatkan Indeks BerAKHLAK pada komponen yang memiliki nilai rendah, Kementerian PANRB akan melakukan beberapa alternatif strategi yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas gaya kepemimpinan;
- 2) Memberdayakan (*empowering*) kemampuan pegawai;
- 3) Membuat *individual development plan* melalui dialog kinerja;
- 4) Menyelaraskan program kerja antar instansi perumus kebijakan;
- 5) Membentuk program magang/pertukaran pegawai di instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, dan LSM dalam konteks *talent mobility*; dan
- 6) Meningkatkan *digital mindset*.



**Gambar 3.3 Pemberian sertifikat Rekor MURI pada penutupan Culture Fest atas pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK.**

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB akan memperkuat kolaborasi dengan tim penggerak budaya kerja dan instansi pemerintah, serta membuat program yang lebih meningkatkan nilai adaptif dan harmonis. Program penghargaan dan apresiasi juga menjadi usulan untuk dapat meningkatkan nilai yang ditargetkan. Selanjutnya, Kementerian PANRB akan meningkatkan kerja sama dengan *multinational company*, BUMN, dan BUMD untuk berbagi

masuk dan solusi terkait program-program penguatan budaya kerja dan program lainnya yang terkait dengan penguatan budaya kerja.

**Sasaran Strategis 3**  
**Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                                             |           | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional                    |           | 68,00   | 67,93*    | 99,90       |
| 3.2 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" | K/L       | 93,90%  | 95,06%    | 101,24      |
|                                                                       | Prov      | 100,00% | 100,00%   | 100,00      |
|                                                                       | Kab/ Kota | 69,88%  | 72,05%    | 103,11      |

Keterangan :

\* : Realisasi merupakan realiasi tahun 2021

### 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional

Hasil pengukuran atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional tahun 2022 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional hasil pengukuran tahun 2021.

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Rata-rata Nasional tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional**  
**tahun 2020 s.d 2022**

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 67,15          | 67,93          | 67,93*         |

Keterangan :

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2021

### 3.2 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

| No | Nilai     | Predikat | Interpretasi     |
|----|-----------|----------|------------------|
| 1. | >90 – 100 | AA       | Sangat Memuaskan |
| 2. | >80 – 90  | A        | Memuaskan        |
| 3. | >70 – 80  | BB       | Sangat Baik      |
| 4. | >60 – 70  | B        | Baik             |
| 5. | >50 – 60  | CC       | Cukup (Memadai)  |
| 6. | >30 – 50  | C        | Kurang           |
| 7. | >0 – 30   | D        | Sangat Kurang    |

Berdasarkan tabel di atas, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja **"Baik"** adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 60 (enam puluh) atau memiliki predikat B ke atas.

Rincian K/L/Pemda dengan nilai akuntabilitas kinerja "Baik" ke atas, adalah sebagai berikut:

| Instansi            | Populasi | Predikat |    |    |    | Total | %      |
|---------------------|----------|----------|----|----|----|-------|--------|
|                     |          | B        | BB | A  | AA |       |        |
| K/L                 | 81       | 37       | 31 | 9  | -  | 77    | 95,06  |
| Pemerintah Provinsi | 34       | 18       | 10 | 5  | 1  | 34    | 100,00 |
| Pemerintah Kab/Kota | 508      | 291      | 61 | 14 | -  | 366   | 72,05  |

Perkembangan instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja "Baik" terus meningkat, baik itu pada tingkat K/L, maupun pada tingkat pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota peningkatannya masih belum signifikan sampai dengan tahun 2022.



**Gambar 3.4 Deputy RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, Saat Menerima Audiensi Bupati Tuban Terkait Implementasi SAKIP di Kabupaten Tuban**

Perbandingan realisasi Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke atas tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" tahun 2020 s.d 2022**

| <b>IP</b> | <b>Realisasi 2020</b> | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2022</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K/L       | 95,24%                | 95,06%                | 95,06%                |
| Prov      | 97,06%                | 100,00%               | 100,00%               |
| Kab/Kota  | 63,98%                | 65,75%                | 72,05%                |

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B” ke atas) antara lain:

- 1) Pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
- 2) Instansi pemerintah masih dalam proses menyempurnakan SAKIP yang

diterapkan dengan berpedoman pada peraturan baru, yaitu Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen-PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 3) Personel yang secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup untuk melakukan bimbingan teknis dan asistensi secara optimal;
- 4) Anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua bimbingan teknis dan asistensi dapat dilaksanakan secara langsung bagi daerah yang memiliki kendala jaringan.
- 5) Para *stakeholder* belum bersinergi secara optimal.



**Gambar 3.5 Menteri PANRB Menerima Audiensi Wakil Jaksa Agung terkait penyelenggaraan SAKIP dan RB di lingkungan Kejaksaan**

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2022 Kementerian PANRB secara intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan atas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara virtual, baik dengan *video conference* melalui aplikasi *zoom*, maupun *chat* interaktif, karena belum memungkinkan pertemuan tatap muka kepada seluruh instansi pemerintah, terutama terkait kebijakan baru, yaitu Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen-PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 2) Memprioritaskan asistensi instansi pemerintah yang berpredikat di bawah B.

#### **Sasaran Strategis 4** **Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas” adalah sebagai berikut:

| <b>Indikator</b>                                                                         | <b>Target</b>        | <b>Realisasi</b>     | <b>Capaian (%)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1 Jumlah Unit Kerja Percontohan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis | 850 Unit (Kumulatif) | 835 Unit (Kumulatif) | 95,18              |

#### **4.1 Jumlah Unit Kerja Percontohan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis.**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mengamanatkan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang intensif di instansi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) dan unit layanan strategis tertentu, antara lain: Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lembaga Pemasyarakatan, Bea Cukai, Imigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI-sekarang menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran atau BP2MI) dan Unit Layanan Pendidikan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur hanya dari unit kerja pada sektor strategis tersebut yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), sesuai kriteria Permen-PANRB Nomor 90 tahun 2021 secara akumulatif sampai dengan tahun berjalan. Sehingga realisasi indikator ini adalah 835 unit atau 95,18% dari yang ditargetkan di tahun 2022 yaitu 850 unit.



**Gambar 3.5 Penyampaian Penghargaan Pelayanan Prima dan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Polri Tahun 2022**

Capaian yang baik tersebut diperoleh karena sepanjang tahun 2022 Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya, diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM baik atas permintaan instansi pemerintah, maupun inisiatif Kementerian PANRB;
- 2) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dengan kebijakan reformasi birokrasi;
- 3) Melakukan pembatasan jumlah unit kerja yang dapat diusulkan K/L/Pemda untuk dievaluasi oleh Kementerian PANRB, strategi ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas penilaian ZI.
- 4) Melakukan perubahan strategi evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM, yaitu untuk instansi pemerintah yang minimal 30% unit kerjanya sudah berpredikat WBK/WBBM, diperkenankan untuk melakukan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan predikat WBK.

Perbandingan realisasi jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM di sektor strategis tahun 2020 s.d 2022 adalah:

**Jumlah Unit Kerja Percontohan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis tahun 2020 s.d 2022**

| <b>Realisasi 2020</b> | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2022</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 299 Unit Kerja        | 507 Unit Kerja        | 835 Unit Kerja        |

Dengan memperhatikan hasil pengukuran pada Tahun 2022, maka tahun 2023 direncanakan akan dilakukan perubahan terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di sektor strategis ini, yaitu:

- 1) Mengeluarkan kebijakan yang mencabut pembatasan pengajuan unit kerja ZI Menuju WBK/WBBM, namun memfokuskan evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat WBK dilakukan oleh masing-masing instansi, dan yang diajukan kepada Kementerian PANRB hanya yang diusulkan menjadi unit kerja berpredikat WBBM;
- 2) Mendorong K/L/Pemda untuk melakukan replikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja menuju WBK/WBBM ke unit-unit kerja lainnya;
- 3) Mendorong penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada setiap K/L/Pemda sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada instansinya masing-masing.

**Sasaran Strategis 5  
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebagai berikut:

| <b>Indikator</b>                           | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional | 3,5           | 3,88             | 110,86             |

### 5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Tujuan evaluasi pelayanan publik adalah untuk memunculkan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.



**Gambar 3.6 Menteri PANRB Dalam Peresmian Salah Satu Mal Pelayanan Publik (MPP)**

Untuk menciptakan suatu ukuran tertentu dalam mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang berasal dari instansi pemerintah, Kementerian PANRB menginisiasi pembentukan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada penyelenggara pelayanan agar dapat dilakukan perbaikan kualitas layanan. Pengukuran IPP dan pemeringkatan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Permen-PANRB

Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada instrumen PEKPPP, terdapat 6 (enam) aspek yang dinilai, yaitu:

- a. Kebijakan pelayanan, meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Sarana Prasarana;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- e. Konsultasi dan Pengaduan; dan
- f. Inovasi Pelayanan.

Hasil penilaian kemudian dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) rentang nilai, yang setiap rentang nilai diberikan kategori dan predikat sebagai berikut:

| No | Rentang Nilai | Kategori    | Predikat             |
|----|---------------|-------------|----------------------|
| 1. | 4,51 -5,00    | Kategori A  | Pelayanan Prima      |
| 2. | 4,01 -4,50    | Kategori A- | Sangat Baik          |
| 3. | 3,51 -4,00    | Kategori B  | Baik                 |
| 4. | 3,01-3,50     | Kategori B- | Baik dengan Catatan  |
| 5. | 2,51 - 3,00   | Kategori C  | Cukup                |
| 6. | 2,01 -2,50    | Kategori C- | Cukup dengan Catatan |
| 7. | 1,51 -2,00    | Kategori D  | Buruk                |
| 8. | 1,01- 1,50    | Kategori E  | Sangat Buruk         |
| 9. | 0,00 - 1,00   | Kategori F  | Gagal                |

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 290 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, terdapat penambahan lokus evaluasi pada Kepolisian Republik Indonesia sebesar 22 Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor Kota Besar/Kepolisian Resor Metro (Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro) dibandingkan dengan tahun

sebelumnya; untuk unit lokus evaluasi pada Pemerintah Kabupaten atau Kota masih sama dengan tahun 2021 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk Pemerintah Provinsi, unit lokus yang dipilih juga masih sama dengan tahun 2021 yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian target lokus PEKPPP yaitu sebagai berikut :

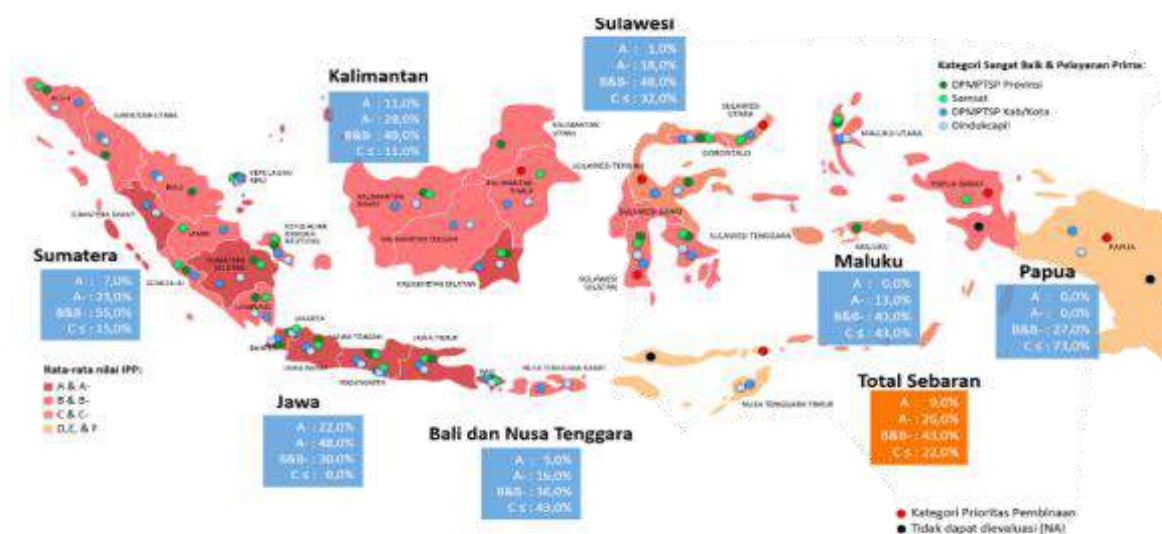
| No. | Jenis K/L/Pemda                      | Jumlah | Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
|-----|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kementerian/Lembaga                  | 76     | 78                                         |
| 2.  | Kementerian/Lembaga Khusus           | 5      | 169                                        |
| 3.  | Pemerintah Daerah Provinsi           | 34     | 68                                         |
| 4.  | Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota | 514    | 1.028                                      |
| 5.  | Polres/ta/tabses/Metro               |        | 332                                        |

Pada tahun 2022 IPP Nasional mengalami kenaikan 0,09 yaitu dari 3,79 menjadi 3.88, dan masuk kategori Baik (B). Rincian IPP Nasional jika dirinci berdasarkan aspek penilaian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas dari 6 (enam) aspek evaluasi pelayanan publik secara nasional yang dinilai pada Instrumen PEKPP, aspek yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah: Aspek Sarana dan Prasarana sebesar 3,84 (Baik). Selain itu terdapat 2 (dua) aspek yang memperoleh nilai indeks terendah yaitu: Aspek Inovasi sebesar 3.01 (Baik dengan Catatan) dan Aspek Konsultasi dan

Pengaduan sebesar 3.5 (Baik dengan Catatan). Oleh karena itu, untuk meningkatkan 2 (dua) nilai indeks tersebut langkah yang akan dilakukan Kementerian PANRB antara lain Kementerian PANRB akan terus menggerakkan *one agency one innovation* sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia pada tahun 2024, dan Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan nasional yaitu SP4N Lapor! terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk terhubung dan secara aktif menindaklanjuti laporan yang masuk.



**Gambar 3.7 Peta sebaran nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pada lingkup Pemerintah Daerah tahun 2022**

Dari hasil evaluasi juga diketahui bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada pemerintah provinsi secara umum telah menunjukkan kinerja layanan yang sangat baik. Sebagian besar Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik dan Pelayanan Prima terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Bali, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori D, E, dan F (Prioritas Pembinaan) sebagian besar terdapat di pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selain itu, 2% (dua persen) dari total kabupaten/kota secara nasional, atau 11 (sebelas) kabupaten/kota, yang Unit Penyelenggara Pelayanan Publiknya tidak dapat dilakukan, tersebar wilayah tersebut, dengan alasan di antaranya kendala akses apabila dilakukan evaluasi secara daring ataupun luring.

Perbandingan realisasi IPP Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**IPP Nasional tahun 2020 s.d 2022**

| <b>Realisasi<br/>2020</b> | <b>Realisasi<br/>2021</b> | <b>Realisasi<br/>2022</b> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3,84                      | 3,79                      | 3,88                      |

Dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun 2022, rencana aksi yang disusun sebagai strategi pelaksanaan PEKPPP tahun 2023 dalam rangka upaya peningkatan IPP Nasional, yaitu:

- Membuat sistem PEKPPP secara daring berdasarkan instrumen yang sesuai saat ini;
- Melakukan pemetaan wilayah prioritas untuk dilakukan PEKPPP oleh tim Kementerian PANRB, dan PEKPPP secara mandiri; dan
- Mengajukan tambahan anggaran sesuai dengan rencana penambahan lokus PEKPPP.



**Gambar 3.8** Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

## Sasaran Strategis 6 Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

Capaian indikator-indikator sasaran “Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                                                |           | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 7.1 Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                        | K/L       | 75     | 75,65*    | 100,87      |
|                                                                          | Prov      | 65     | 65,63*    | 100,97      |
|                                                                          | Kab/Kota  | 55     | 53,44*    | 97,16       |
| 7.2 Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” | K/L       | 92,70% | 98,77%    | 106,55      |
|                                                                          | Prov      | 88,20% | 88,24%    | 100,05      |
|                                                                          | Kab/ Kota | 30,31% | 32,28%    | 106,50      |

Keterangan :

\* : Realisasi merupakan realiasi tahun 2021

### 6.1 Nilai Pelaksanaan RB Nasional

Sampai dengan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diterbitkan, hasil pengukuran atas Nilai Pelaksanaan RB Nasional belum selesai diolah, sehingga dalam Laporan Kinerja ini masih menyajikan Nilai Pelaksanaan RB Nasional Tahun 2021.

Perbandingan realisasi Nilai Pelaksanaan RB Nasional tahun 2020 s.d 2022 adalah:

#### Nilai Pelaksanaan RB Nasional tahun 2020 s.d 2022

| IP       | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| K/L      | 74,63          | 75,65*         | 75,65*         |
| Prov     | 74,63          | 65,63*         | 65,63*         |
| Kab/Kota | 53,85          | 53,44*         | 53,44*         |

Keterangan :

\* : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2021

### 6.2 Persentase K/L/Pemda yang Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”

Instansi pemerintah yang memiliki Indeks RB “Baik” adalah instansi pemerintah yang memiliki nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

di atas 60,00, atau memiliki predikat “B” ke atas. Evaluasi dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Permen\_PANRB tersebut menetapkan bahwa Nilai hasil evaluasi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok berdasarkan rentang nilai, yaitu :

| No | Rentang Nilai | Kategori | Predikat     |
|----|---------------|----------|--------------|
| 1. | >90 – 100     | AA       | Istimewa     |
| 2. | >80 – 90      | A        | Sangat Baik  |
| 3. | >70 – 80      | BB       | Baik         |
| 4. | >60 – 70      | B        | Cukup Baik   |
| 5. | >50 – 60      | CC       | Cukup        |
| 6. | >30 – 50      | C        | Buruk        |
| 7. | 0 – 30        | D        | Sangat Buruk |

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Renstra periode 2020-2024 dan Road Map RB 2020 – 2024. Kebijakan evaluasi yang membedakan Road Map RB 2020-2024 dengan Road Map RB sebelumnya adalah menggunakan kriteria dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria pada tools evaluasi sebelumnya. Tools evaluasi yang baru menekankan pada aspek reform (30%), penilaian hasil antara (10%), sedangkan aspek pemenuhan hanya sebesar 20%.

Dengan memperhatikan perubahan tingkat kesulitan tersebut, maka Kementerian PANRB menetapkan indikator kinerja ini dengan target-target yang lebih rendah, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Target tahun 2020 - 2024 tersebut telah beberapa kali dibahas dengan Bappenas dan telah disepakati menjadi target RPJMN Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Rincian K/L/Pemda dengan Indeks RB “Baik” ke atas, adalah sebagai berikut:

| Instansi            | Populasi | Predikat |    |    |    | Total | %     |
|---------------------|----------|----------|----|----|----|-------|-------|
|                     |          | B        | BB | A  | AA |       |       |
| K/L                 | 81       | 9        | 58 | 13 | -  | 80    | 98,77 |
| Pemerintah Provinsi | 34       | 24       | 2  | 4  | 0  | 30    | 88,24 |
| Pemerintah Kab/Kota | 508      | 141      | 21 | 2  | -  | 164   | 32,28 |



**Gambar 3.9 Arahan Menteri PANRB Pada Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain:

1. Kurangnya kepemimpinan yang kuat di instansi pemerintah.  
Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi.
2. Keterbatasan sumber daya.  
Implementasi reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan.
3. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan.  
Pegawai yang enggan berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi.  
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan banyak instansi pemerintah yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
5. Masalah hukum dan regulasi.  
Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan.

Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan teknis secara daring, baik itu melalui sistem aplikasi PMPRB, maupun e-sakip reviu, sebagai terobosan untuk memecah konstrain jarak, waktu dan biaya, karena dalam situasi pandemi covid-19 yang belum memungkinkan pertemuan tatap muka,.
- 2) Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja baik dengan deputi di Kementerian PANRB maupun dengan instansi pemerintah lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan RB.

Perbandingan realisasi Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks RB “Baik” tahun 2020 s.d 2022 adalah:

| IP       | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| K/L      | 96,39%         | 96.30%         | 98,77%         |
| Prov     | 79,41%         | 79.41%         | 88,24%         |
| Kab/Kota | 24,41%         | 25.79%         | 32,28%         |



**Gambar 3.10 Deputi RBKunwas, saat peluncuran RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai upaya percepatan implementasi RB, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian PANRB di antaranya:

- 1) Mendesain ulang mekanisme asistensi, yang bertujuan agar proses asistensi dapat dilaksanakan lebih profesional dan akuntabel, dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM, dengan membuat kurikulum pelatihan yang diharapkan dapat mengakselerasi proses penyiapan SDM baru yang siap untuk melakukan pendampingan maupun evaluasi terkait implementasi RB
- 3) Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada, seperti PMPRB, PMPZI, *e-SAKIP Review*, Survey, dll. Di antaranya menambahkan pembaharuan seperti aplikasi pendukung evaluasi, dan pendukung *knowledge management* baik di internal maupun instansi pemerintah lain;
- 4) Mendorong kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PANRB untuk melakukan penguatan pada area perubahan yang sesuai dengan bidang tanggungjawabnya; dan
- 5) Membangun kerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan terkait *reward and punishment* di pemerintah daerah. Hal ini juga diharapkan dapat sebagai stimulus untuk percepatan implementasi RB khususnya di kabupaten/kota.

**Sasaran Strategis 7**  
**Terwujudnya Kelembagaan Kementerian PANRB yang Efektif dan Efisien**

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Kelembagaan Kementerian PANRB yang Efektif dan Efisien” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                                             | Target               | Realisasi                | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 7.1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB | Skor 73,85 (Efektif) | 82,637* (Sangat Efektif) | 111,89      |
| 7.2 Indeks SPBE Kementerian PANRB                                     | 2,89 (Baik)          | 3,0 (Baik)               | 104,15      |

Keterangan :

\* : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2021

### **7.1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB.**

Skor komposit efektivitas kelembagaan menggambarkan tingkat efektivitas struktur dan proses suatu organisasi. Skor ini diperoleh melalui proses evaluasi kelembagaan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Dalam Permen-PANRB tersebut diatur bahwa evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat tiga tahun sekali. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Kementerian PANRB tidak melakukan evaluasi mandiri sehingga data capaian kinerja tahun 2022 masih menggunakan hasil validasi oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana sesuai Nota Dinas Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor 73/TU.01.04/2021 tanggal 03 Maret 2021, hal Hasil Verifikasi Evaluasi Kelembagaan Kementerian PANRB. Nota dinas tersebut menyebutkan bahwa Kementerian PANRB memperoleh peringkat komposit P-5 (sangat efektif) dengan skor 82,637.

Kementerian PANRB telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas kelembagaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 yaitu penataan organisasi untuk mengusulkan perubahan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian PANRB. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PANRB. Penataan organisasi juga dilakukan untuk menyelaraskan dengan tantangan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

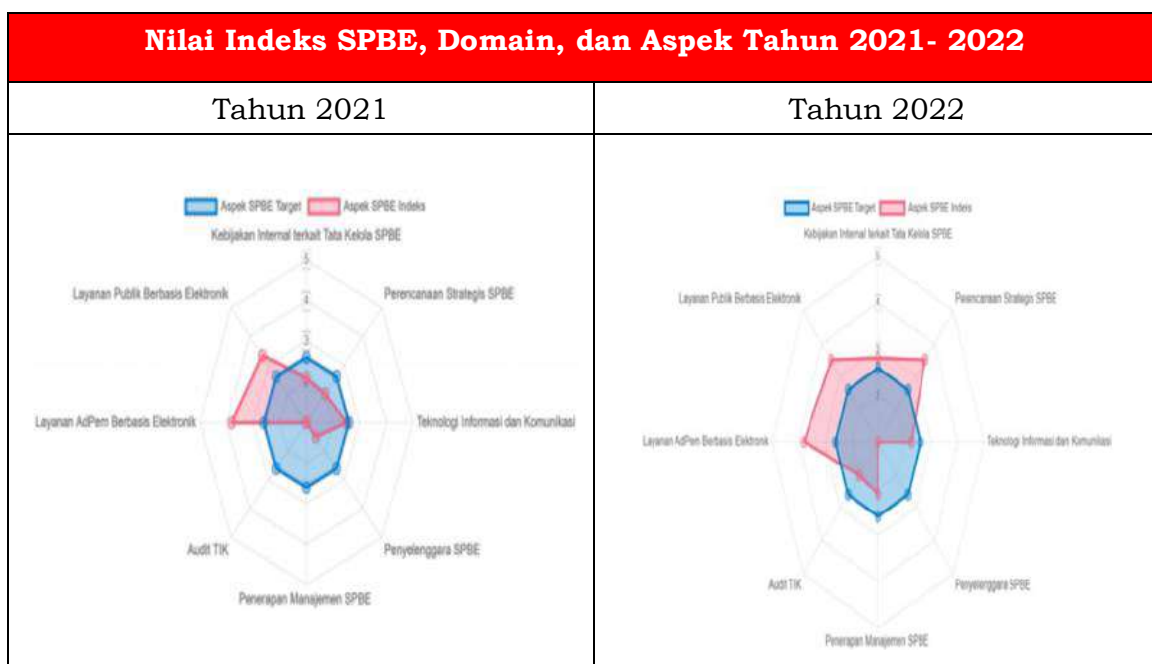
Dengan adanya penataan tersebut, Kementerian PANRB dapat memenuhi variabel untuk indikator penilaian tingkat kematangan UKPBJ serta meningkatkan nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Penambahan tugas dan fungsi UKPBJ telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Kementerian PANRB, pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Mempercepat implementasi sistem kerja baru yang menyesuaikan dengan penyederhanaan organisasi dengan pendekatan *squad team*; dan
- Melakukan reviu SOP yang sudah ditetapkan secara berkala, terutama pekerjaan yang pelaksanaannya sudah beralih ke digital.

## 7.2 Indeks SPBE Kementerian PANRB

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Indeks SPBE Kementerian PANRB tahun 2022 ditetapkan sebesar 3,01 atau pada kategori Baik. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,40 jika dibandingkan dengan nilai tahun 2021 meskipun secara predikat pada tahun 2021 telah memperoleh kategori Baik. Adapun realisasi nilai sebaran domain Indeks SPBE pada Kementerian PANRB dapat digambarkan sebagai berikut.



| Nama Indeks                                                                           | Nilai 2021  | Nilai 2022  | Naik/<br>Turun |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>SPBE</b>                                                                           | <b>2,61</b> | <b>3,01</b> | <b>0,40</b>    |
| Domain Kebijakan SPBE                                                                 | 2,10        | 2,80        | 0,70           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</li> </ul> | 2,10        | 2,80        | 0,70           |

|                                                         |      |      |       |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Domain Tata Kelola SPBE                                 | 2,10 | 2,50 | 0,40  |
| • Perencanaan Strategis SPBE                            | 2,00 | 3,50 | 1,50  |
| • Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | 2,50 | 2,55 | 0,05  |
| • Penyelenggara SPBE                                    | 1,50 | 1,00 | -0,50 |
| Domain Manajemen SPBE                                   | 1,00 | 2,09 | 1,09  |
| • Penerapan Manajemen SPBE                              | 1,00 | 2,13 | 1,13  |
| • Audit TIK                                             | 1,00 | 2,00 | 1,00  |
| Domain Layanan SPBE                                     | 3,62 | 3,68 | 0,06  |
| • Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,80 | 3,80 | 0     |
| • Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 3,33 | 3,50 | 0,17  |

Berdasarkan data di atas, realisasi nilai sebaran domain indeks SPBE Kementerian PANRB secara umum mengalami peningkatan. Meskipun demikian, terdapat satu sub komponen pada domain tata Kelola SPBE yang mengalami penurunan nilai. Hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap skor SPBE secara keseluruhan. Kenaikan nilai sebaran domain indek SPBE Kementerian PANRB tidak terlepas dari akselerasi transformasi digital dalam melakukan pelayanan tahun 2022, antara lain:

- **Aplikasi MAPAN**

Tersedianya aplikasi MAPAN pada platform iOS dan Android yang semakin memudahkan pegawai dalam menggunakan berbagai fitur yang ada seperti akses nota dinas, disposisi, approval, serta presensi. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Aplikasi SIMPAN.



**SIMPAN**

### All New Mobile Apps!

- Multi platform (iOS/Android/MacOS ARM)
- Modern User Interface
- Easy to use
- Push Notifications
- Reliability & security updated
- Performance improved
- More feature in the future



**MAPANRB**

### • Portal Satu Data

Terkait dengan inisiatif Satu Data, telah dilakukan pengembangan portal Satu Data Kementerian PANRB ([1data.menpan.go.id](https://1data.menpan.go.id)). Selain itu telah dilakukan integrasi data pada portal ini dengan Portal Satu Data Nasional terkait data Indeks SPBE, Nilai SAKIP, dan Indeks RB.



**Gambar 3.11 Tampilan halaman muka Portal Satu Data Kementerian PANRB**

### • Data Warehouse

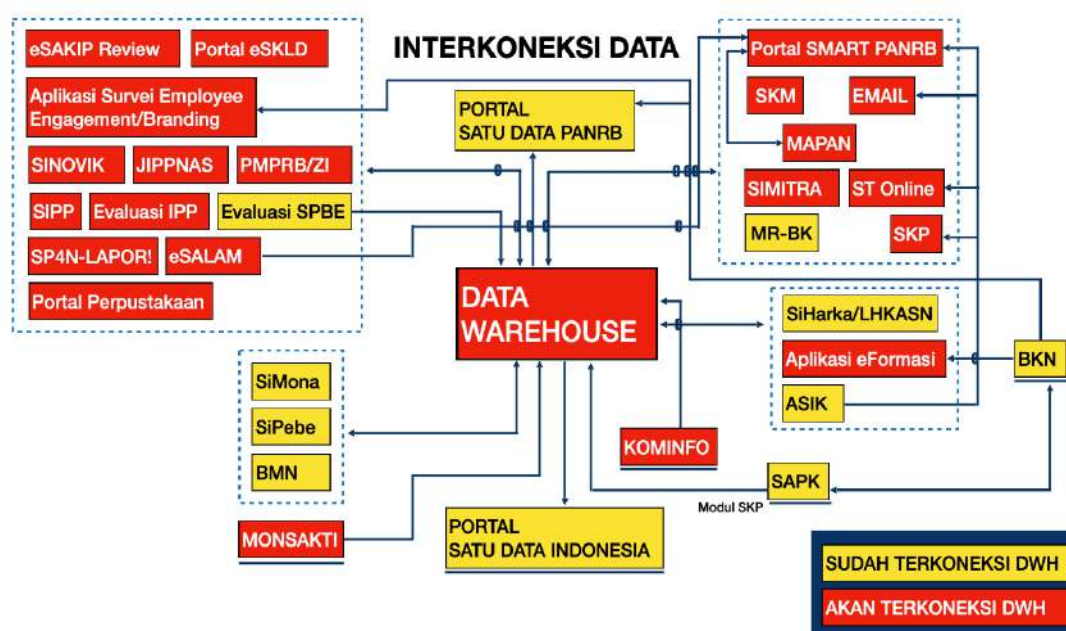
Penyelenggaraan SPBE harus menjamin berfungsinya sistem informasi sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem yang sudah tersedia sebelumnya dan/atau sistem lainnya yang terkait. Untuk itu, Kementerian

PANRB membangun sebuah *Data Warehouse* sebagai jembatan keterhubungan data antar aplikasi, baik internal maupun eksternal.

- **Kebijakan Tata Kelola SPBE**

Pada tahun 2022 Kementerian PANRB telah mengeluarkan empat kebijakan terkait penerapan SPBE di lingkungan internal yang menunjang domain kebijakan dan tata kelola SPBE. Kebijakan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian PANRB dapat dirinci sebagai berikut:

- Keputusan Menteri PANRB Nomor 255 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB;
- Keputusan Sekretaris Kementerian PANRB Nomor 334 Tahun 2022 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana/Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- Keputusan Sekretaris Kementerian PANRB Nomor 335 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB; dan
- Keputusan Sekretaris Kementerian PANRB Nomor 336 Tahun 2022 tentang Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB.



- **Layanan Teknologi Informasi Lainnya**

Selain kegiatan yang disampaikan di atas, pada tahun 2022 Kementerian PANRB juga mengembangkan sistem informasi pendukung kebijakan yang

dihasilkan Kementerian PANRB, seperti Berita Acara Hasil Evaluasi Online, Verifikasi Pendaftaran MPP, Pengajuan Formasi ASN , Layanan Survei Online, Pelaporan Harta Kekayaan ASN, Redesain Portal EsKLD, Aplikasi eTukin, ePoliklinik, Survei Kepuasan Masyarakat, serta Portal Layanan yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di Kementerian PANRB

Perbandingan realisasi Indeks SPBE Kementerian PANRB tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Indeks SPBE Kementerian PANRB tahun 2020 s.d 2022**

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 3,29<br>(Baik) | 2,61<br>(Baik) | 3,01<br>(Baik) |

Untuk meningkatkan penerapan SPBE Kementerian PANRB, pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Meningkatkan bentuk pelayanan melalui inovasi sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi perkantoran;
- Menggiatkan penggunaan *e-office* dalam kegiatan kerja, terutama seiring dengan perkembangan era teknologi, kecepatan informasi, dan penyelesaian tugas, yang berujung pada peningkatan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**Sasaran Strategis 8**  
**Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang Profesional, Berintegritas, dan Sejahtera**

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang Professional, Berintegritas, Kreatif, Inovatif, Netral, dan Sejahtera” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                 | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 8.1 Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB | 0,8    | 0,89      | 111,25% |

|                                                     |    |        |         |
|-----------------------------------------------------|----|--------|---------|
| 8.2 Indeks Profesionalitas ASN<br>Kementerian PANRB | 72 | 77,84* | 108,11% |
|-----------------------------------------------------|----|--------|---------|

Keterangan

\*: data realisasi merupakan perhitungan hasil rekonsiliasi data tahun 2021

### 8.1 Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB

Penilaian sistem merit didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit pada Manajemen ASN dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018, disebutkan bahwa penilaian penerapan sistem merit dilakukan berdasarkan penerapan aspek-aspek dokumen rencana aksi terkait *Road Map* Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN yang terdiri dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tersebut, hasil penilaian sistem merit menjadi dasar penetapan tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah yang meliputi:

| No | Nilai   | Indeks   | Kategori     | Sebutan     |
|----|---------|----------|--------------|-------------|
| 1. | 325-400 | 0,81-1   | Kategori IV  | Sangat Baik |
| 2. | 250-324 | 0,61-0,8 | Kategori III | Baik        |
| 3. | 175-249 | 0,41-0,6 | Kategori II  | Kurang      |
| 4. | 100-174 | 0,2-0,4  | Kategori I   | Buruk       |

Berdasarkan penilaian ISM tahun 2022, Kementerian PANRB memperoleh Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 366,5 atau dengan skor indeks sebesar 0,89. Hal ini sesuai dengan Keputusan KASN Nomor 39/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian PANRB tanggal 29 November 2022. Atas capaian itu, Kementerian PANRB juga mendapat penghargaan pada gelaran Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 yang digelar oleh KASN.

Pemberian Anugerah Meritokrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada instansi pemerintah supaya melakukan percepatan sistem merit. Selain itu pemberian Anugerah Meritokrasi adalah

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KASN atas penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penerapan sistem merit ini menjadi hal yang penting dalam memperbaiki kinerja ASN. Penguatan kebijakan kelembagaan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi sangat penting dalam upaya mendorong perbaikan pelayanan publik melalui terciptanya SDM ASN yang andal. Hal tersebut selaras dengan poin pertama pada lima prioritas presiden yaitu pembangunan SDM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ISM Kementerian PANRB tahun 2022 di antaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan perencanaan dan pengembangan pegawai, layanan mutasi pegawai (kenaikan pangkat pegawai), dan administrasi dan kesejahteraan pegawai untuk seluruh pegawai Kementerian PANRB;
- b. Melakukan *assessment* pegawai untuk melengkapi profil pemetaan kompetensi seluruh pegawai Kementerian PANRB;
- c. Menyelesaikan pengembangan aplikasi SKP *Online* sehingga dapat dipergunakan sebagai pengukuran kinerja pegawai Kementerian PANRB.



**Gambar 3.12 Sekretaris Kementerian PANRB menerima Anugerah Meritokrasi**

Perbandingan realisasi Indeks Sistem Merit (ISM) Kementerian PANRB tahun 2022 sampai dengan 2020 adalah:

**Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB Tahun 2020 s.d 2022**

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 0,816          | 0,80           | 0,89           |

## 8.2 Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPA) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disebutkan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan IPA pada empat dimensi di atas, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

| No | Nilai  | Kategori      |
|----|--------|---------------|
| 1. | 91-100 | Sangat Tinggi |
| 2. | 81-90  | Tinggi        |
| 3. | 71-80  | Sedang        |
| 4. | 61-70  | Rendah        |
| 5. | 0-60   | Sangat Rendah |

Saat ini, proses perhitungan untuk tahun 2022 tidak lagi diinformasikan secara resmi oleh BKN, sehingga data yang disajikan merupakan data hasil rekonsiliasi data IPA tahun 2021. Perbandingan realisasi IPA di lingkungan Kementerian PANRB tahun 2020 s.d 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB**

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 58,62          | 77,84          | 77,84*         |

*Keterangan*

*\* : realisasi merupakan realisasi tahun 2021*

Selain penilaian IPA, Kementerian PANRB meraih hasil positif dalam pengelolaan profesionalitas ASN. Kementerian PANRB meraih penghargaan dalam ajang *BKN Award 2022* dengan mendapat juara pertama pada Kategori Penilaian Kompetensi. Prestasi pada tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Kementerian PANRB berada di peringkat tiga pada kategori yang sama pada tahun 2021. Pada ajang yang sama, Kementerian PANRB juga menerima penghargaan dalam kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik.

*BKN Award* merupakan ajang penghargaan sebagai apresiasi bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan manajemen ASN. Penghargaan tersebut diberikan oleh BKN setiap tahunnya kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing. Dengan adanya capaian ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Kementerian PANRB untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN, terutama dalam penyelenggaraan sistem merit di masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan IPA Kementerian PANRB tahun 2022, telah dilakukan beberapa upaya di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dimensi kompetensi melalui pendataan pegawai dan mengirimkan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan supaya memenuhi jam pelatihan pegawai minimal 20 Jam Pelatihan;
- b. Menyebarkan angket pelatihan sesuai kebutuhan pegawai dan kepentingan organisasi.

Mulai tahun 2023 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ini yaitu IPA dan ISM akan beralih menjadi Indeks *Employee Engagement* (EE), *Employer Branding* (EB), dan Indeks BerAKHLAK (IB). Dengan peralihan indikator tersebut, Kementerian PANRB akan menindaklanjuti dengan menyiapkan strategi-strategi baru yang selaras dengan parameter-parameter pada indikator EE dan IB dengan.



**Gambar 3.13 Sekretaris Kementerian PANRB menerima BKN Award**

**Sasaran 9**  
**Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 9.1. Nilai Implementasi SAKIP<br>Kementerian PANRB              | 82     | 82,12*    | 100,15      |
| 9.2. Nilai Pelaksanaan Reformasi<br>Birokrasi Kementerian PANRB | 85     | 85,08*    | 105,04      |
| 9.3. Opini BPK                                                  | WTP    | WTP       | 100,00      |

*Keterangan*

*\*: realisasi merupakan realisasi tahun 2021*

## 9.1 Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB

Target Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB pada tahun 2022 adalah 82 (A). Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 masih belum diperoleh. Oleh karena itu, nilai realisasi implementasi SAKIP Kementerian PANRB 2022 yang disajikan di atas merupakan data realisasi tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan penilaian evaluasi SAKIP tahun 2021, Kementerian PANRB memperoleh nilai sebesar 82,12 kategori nilai “A” dengan interpretasi “Memuaskan” (memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel).

Kementerian PANRB telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan perjanjian kinerja mulai level kementerian sampai dengan pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses *cascading* kinerja;
- b. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui *coaching clinic* dan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pelaporan kinerja;
- c. Pengembangan Aplikasi SIPEBE sebagai penerapan *e-performance based budgeting* melalui menu pengajuan dan pembahasan revisi anggaran secara online. Pengembangan ini dilakukan agar proses penyusunan anggaran dan kinerja, monitoring, dan evaluasi dilakukan satu aplikasi yang terintegrasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SIPEBE dalam penyusunan rencana aksi, dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran secara periodik (triwulanan).

Perbandingan realisasi Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB tahun 2020 s.d 2022 adalah:

## Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB Tahun 2020 s.d 2022

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 81,21          | 82,12          | 82,12*         |

Keterangan

\*: realisasi merupakan realisasi tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP, Kementerian PANRB telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2023, antara lain:

- Melakukan reviu Renstra unit kerja periode 2020-2024. Hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PANRB dan IKU unit kerja, terutama pada aspek metode/cara pengukuran setiap IKU;
- Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya; dan
- Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan kinerja kepada pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun laporan kinerja.

### 9.2 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan RB di Kementerian PANRB dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, hasil evaluasi atas pelaksanaan RB Kementerian PANRB Tahun 2022 belum didapatkan. Oleh karena itu, nilai yang disajikan masih menggunakan nilai pelaksanaan RB tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2022, di antaranya:

- Sosialisasi program dan isu strategis RB termasuk didalamnya *Road Map* RB Kementerian PANRB melalui forum *Reform Corner (Reformers Club Morning Conversation)*. Sosialisasi juga dilakukan secara *online* melalui web Reform Kita ([kita.menpan.go.id](http://kita.menpan.go.id)). Selain itu juga dilakukan melalui *email blast* sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada

seluruh pegawai;

- b. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (triwulanan). Hal ini dilakukan guna mengetahui progres pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi solusi yang dapat dilakukan;
- c. Internalisasi *core values* ASN melalui kegiatan BerAKHLAK *series*. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2022, yaitu seri Adaptif dan seri Kolaboratif. Series tersebut menghadirkan profesional dalam bidang dimaksud serta praktisi sebagai *benchmarking* Kementerian PANRB dalam lingkup BUMN. Sebagai bentuk kegiatan yang terbuka dan memperluas pengetahuan, kegiatan BerAKHLAK *series* juga mengundang seluruh pegawai untuk mengikuti secara daring. Harapannya, internalisasi budaya dilakukan secara berkelanjutan hingga mengakar pada pola pikir setiap pegawai Kementerian PANRB;
- d. Pembangunan *knowledge management* RB Kementerian PANRB melalui aplikasi berbasis web yaitu portal [kita.menpan.go.id](http://kita.menpan.go.id). Dalam aplikasi ini memuat konten, modul, berita, dan artikel yang *update* memuat informasi program RB dan dapat diakses secara luas. Sekretariat Kementerian PANRB terus melakukan pengembangan dan *updating* Aplikasi Reform Kita sebagai salah satu data pengambilan keputusan yang diperlukan; dan
- e. Penyusunan *Road Map* RB Kementerian PANRB tahun 2020-2024 berdasarkan *Road Map* RB nasional, Renstra Kementerian PANRB, dan inisiatif lainnya sesuai dinamika lingkungan strategis. *Road Map* RB Kementerian PANRB juga telah mencakup *quick wins* dan memuat program kerja tahunan pada setiap area perubahan. *Road Map* RB Kementerian PANRB 2020-2024 disusun, didiskusikan, dan disepakati oleh seluruh unit organisasi dengan adanya paraf persetujuan pelaksanaan oleh para pimpinan unit organisasi untuk kemudian ditetapkan dalam Permen-PANRB Nomor 18 Tahun 2021.

Untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB, pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Pelaksanaan rekrutmen agen perubahan Kementerian PANRB yang selektif. Hal ini dilakukan guna mendapatkan agen perubahan yang mampu menjadi

*prime mover* perubahan dan membawa percepatan perubahan Kementerian PANRB. Rekrutmen dilakukan dengan mekanisme *assessment* tertentu yang disusun berdasarkan hasil evaluasi rekrutmen sebelumnya.

- b. Penyusunan *reward* bagi unit kerja yang paling berhasil melaksanakan program kerja RB. *Reward* diberikan tidak hanya bagi individual pegawai namun juga seluruh pegawai termasuk adanya peran pimpinan. Hal ini dilakukan guna mendorong keterlibatan setiap pimpinan unit kerja pada program RB yang tidak hanya program RB level unit kerja, namun juga level Kementerian.

Perbandingan realisasi Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB tahun 2020 s.d 2022 adalah:

**Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB Tahun 2020 sd. 2022**

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 85,08          | 85,74          | 85,74*         |

*Keterangan:*

\* : realisasi merupakan realisasi tahun 2021

### 9.3 Opini BPK

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Penilaian didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah:

**Opini BPK Tahun 2020 s.d 2022**

| <b>Realisasi 2020</b> | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2022</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| WTP                   | WTP                   | WTP                   |

Kementerian PANRB berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2014 atau selama delapan tahun berturut-turut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2021 (Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan) Nomor 42A/LHP/XVI/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 menyatakan bahwa laporan keuangan Kementerian PANRB telah menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan Opini BPK tersebut, maka bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan di Kementerian PANRB telah bebas dari temuan yang material.

Kementerian PANRB telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan Opini WTP tersebut, di antaranya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara berkelanjutan, perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, dan minimalisasi penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK pada tahun 2023, Kementerian PANRB akan melakukan beberapa hal, di antaranya:

- Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIMONA dan SIPEBE sebagai aplikasi monitoring anggaran dan kinerja secara berkala;
- Meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelola keuangan unit kerja dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sasaran Strategis 10**  
**Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang Prima**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang Prima” adalah sebagai berikut:

| Indikator                                      | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 10.1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB | 4,05   | 4,51      | 111,36      |

### 10.1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB

Indikator kinerja IPP Kementerian PANRB merupakan indikator untuk mewujudkan kualitas pelayanan Kementerian PANRB yang prima. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja unit penyelenggaraan publik di lingkungan Kementerian PANRB pada setiap tahunnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi IPP tahun 2022, Kementerian PANRB memperoleh nilai sebesar 4,51 dengan Kategori A (Pelayanan Prima). Hasil ini tertuang pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Pelayanan Publik Nomor B/567/PP.02/2022 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pada tabel perbandingan di atas, terjadi kenaikan realisasi IPP Kementerian PANRB 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0,17 poin.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik mempunyai beberapa aspek yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek tersebut yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Hasil nilai IPP Kementerian PANRB beserta perbandingannya dengan hasil penilaian tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

| <b>Komponen</b>                   | <b>Indeks 2021</b> | <b>Indeks 2022</b> | <b>Naik/<br/>Turun</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Kebijakan Pelayanan               | 4, 60              | 4,86               | 0,26                   |
| Profesionalisme SDM               | 3, 68              | 4,30               | 0,62                   |
| Sarana Prasarana                  | 4, 51              | 4,34               | -0,17                  |
| Sistem Informasi Pelayanan Publik | 4, 67              | 5                  | 0,33                   |
| Konsultasi dan Pengaduan          | 4, 89              | 4                  | -0,89                  |
| Inovasi                           | 2, 75              | 4                  | 1,25                   |
| <b>Total</b>                      | <b>4,34</b>        | <b>4,51</b>        | <b>0,17</b>            |

Berdasarkan data di atas, nilai komponen IPP Kementerian PANRB tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan. Akan tetapi terdapat dua komponen penilaian IPP yang menurun yaitu komponen sarana prasarana dan komponen konsultasi dan pengaduan.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan IPP Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) reviu standar pelayanan publik Kementerian PANRB. Pelaksanaan reviu standar pelayanan melibatkan beberapa *stakeholders* sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman tersebut mewajibkan agar pelaksanaan reviu standar pelayanan melibatkan lima unsur masyarakat yaitu masyarakat pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Perbandingan realisasi IPP Kementerian PANRB tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

### Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB Tahun 2020 s.d 2022

| Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|----------------|----------------|----------------|
| 4,46           | 4,34           | 4,51           |

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, Kementerian PANRB telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan, antara lain:

- Melakukan reviu kebijakan standar pelayanan di Kementerian PANRB selaras dengan perkembangan strategis;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan *hospitality* bagi seluruh pegawai;
- Memastikan pelaksana pelayanan termasuk *front office* telah menerapkan budaya BerAKHLAK; dan
- Meningkatkan fasilitas ramah difabel sesuai kapabilitas Kementerian PANRB.

### C. Capaian Kinerja Lain

#### 1. Penghargaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Award Tahun 2022

Kementerian PANRB berhasil menjuarai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Awards pada Kategori Pembudayaan GERMAS Kementerian/Lembaga Terbaik Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). GERMAS merupakan bagian dari gerakan revolusi mental dalam bentuk karakter, budaya, serta kondisi SDM yang cerdas, produktif, dan siap bersaing dengan bangsa lain. Kegiatan GERMAS diikuti sebanyak 37 K/L yang telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Kemenko PMK. Adanya penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen para pimpinan instansi pemerintah untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan GERMAS di instansi masing-masing.



**Gambar 3.13 Staf Ahli Kementerian PANRB menerima GERMAS Award**

## **2. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022**

Kementerian PANRB kembali mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 dengan predikat Badan Publik Informatif. Capaian ini berhasil dipertahankan sejak tahun 2020. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2022, Kementerian PANRB mendapatkan nilai 98,18. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kementerian PANRB telah memiliki keterbukaan atas akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kementerian PANRB menjadi salah satu badan publik yang berhasil melaksanakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian PANRB berharap dapat terus melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian PANRB akan terus berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* dan melakukan berbagai langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Kementerian PANRB.



#### D. Realisasi Anggaran

Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2022 adalah sebesar **Rp237.035.819.000,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp236.298.093.372,-** atau sebesar 99,69%. Dengan rincian sebagai berikut.

| No           | Unit Kerja                             | Anggaran<br>(Rp.000,-) | Realisasi<br>(Rp)      | %            |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.           | Deputi RBKunwas                        | 12.186.871             | 12.102.394.843         | <b>99,31</b> |
| 2.           | Deputi Kelembagaan<br>dan Tata Laksana | 24.816.518             | 24.718.505.891         | <b>99,61</b> |
| 3.           | Deputi SDMA                            | 14.413.575             | 14.298.918.833         | <b>99,20</b> |
| 4.           | Deputi Pelayanan Publik                | 20.742.513             | 20.676.617.490         | <b>99,68</b> |
| 5.           | Sekretariat Kementerian                | 164.876.342            | 164.501.656.315        | <b>99,77</b> |
| <b>Total</b> |                                        | <b>237.035.819</b>     | <b>236.298.093.372</b> | <b>99,69</b> |

Sumber: Realisasi SP2D berdasarkan aplikasi MONSAKTI

# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 19 dari 26 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 17 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2022 Kementerian PANRB juga menjadi tinggi yaitu sebesar Rp236.298.093.372,- atau 99,69% dari total pagu anggaran sebesar 237.035.819.000,-.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

| No. | Sasaran Strategis                                                                                       | No. | Indikator Kinerja                                                                                    | Target                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi | 1   | Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional                                             | 62 (Efektif)                                    |
|     |                                                                                                         | 2   | Persentase K/L/Pemda dengan indeks matuntas SPBE "Baik" ke atas                                      | K/L: 80%<br>Prov: 60%<br>Kab/Kota: 30%          |
|     |                                                                                                         | 3   | Indeks SPBE Nasional                                                                                 | 2,3                                             |
| 2   | Terwujudnya ASN yang profesional                                                                        | 1   | Indeks BerAKHLAK                                                                                     | 10%                                             |
| 3   | Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel                                     | 1   | Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional                                                     | 68                                              |
|     |                                                                                                         | 2   | Persentase instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"                                    | K/L: 93,90%<br>Prov: 100%<br>Kab/Kota: 69,88%   |
| 4   | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas                                                     | 1   | Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis                 | 850 Unit (Akumulatif)                           |
| 5   | Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima                                                        | 1   | Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional                                                         | 3,50                                            |
| 6   | Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional                                                    | 1   | Nilai Pelaksanaan RB Nasional                                                                        | K/L: 75;<br>Prov: 65;<br>Kab/Kota: 55           |
|     |                                                                                                         | 2   | Persentase instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik"(kategori "B" ke atas) | K/L: 92,70%<br>Prov: 88,20%<br>Kab/Kota: 30,31% |
| 7   | Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien                                      | 1   | Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB                                    | Skor 73,85 (Efektif)                            |
|     |                                                                                                         | 2   | Indeks SPBE Kementerian PANRB                                                                        | 2,89                                            |
| 8   | Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera                        | 1   | Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB                                                                | 0,8                                             |
|     |                                                                                                         | 2   | Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB                                                         | 72                                              |
| 9   | Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel                                     | 1   | Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB                                                           | 82                                              |
|     |                                                                                                         | 2   | Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB                                              | 85                                              |
|     |                                                                                                         | 3   | Opini BPK                                                                                            | WTP                                             |
| 10  | Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima                                      | 1   | Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB                                                            | 4,05                                            |

**Program:**

- 1 Dukungan Manajemen
- 2 Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN

**TOTAL**

**Anggaran (Rp)**

176.272.250.000  
60.763.569.000  
**237.035.819.000**

Jakarta, 23 Desember 2022

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas

**Realisasi Anggaran**  
**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**  
**Tahun 2022**

| Kode      | Uraian                                                                                                    | Pagu                   | Realisasi              | % Realisasi  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|           | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI                                         | 237.035.819.000        | 236.331.930.630        | 99,70        |
| <b>CO</b> | <b>Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN</b>                                          | <b>60.763.569.000</b>  | <b>60.452.716.581</b>  | <b>99,49</b> |
| 4350      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik                                            | 2.911.076.000          | 2.896.211.686          | 99,49        |
| 6189      | Perumusan Kebijakan PANRB                                                                                 | 13.214.248.000         | 13.104.076.753         | 99,17        |
| 6190      | Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat                                                             | 1.791.886.000          | 1.785.409.389          | 99,64        |
| 6191      | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan | 9.080.654.000          | 9.022.136.389          | 99,36        |
| 6192      | Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                              | 11.736.714.000         | 11.680.673.581         | 99,52        |
| 6193      | Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana                                 | 6.089.352.000          | 6.070.281.793          | 99,69        |
| 6194      | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur                                              | 4.455.017.000          | 4.441.132.590          | 99,69        |
| 6195      | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik                                            | 11.484.622.000         | 11.452.794.400         | 99,72        |
| <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                         | <b>176.272.250.000</b> | <b>175.879.214.049</b> | <b>99,78</b> |
| 2818      | Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB                                                       | 770.244.000            | 759.985.251            | 98,67        |
| 6178      | Pengelolaan Legislasi dan Litigasi                                                                        | 825.267.000            | 824.171.585            | 99,87        |
| 6179      | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik                                                               | 5.871.847.000          | 5.832.093.405          | 99,32        |
| 6180      | Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum                                                                        | 148.481.489.000        | 148.191.294.328        | 99,80        |
| 6181      | Pengelolaan Sistem dan Teknologi                                                                          | 2.517.625.000          | 2.504.674.836          | 99,49        |
| 6182      | Pengelolaan Organisasi dan SDM                                                                            | 14.144.147.000         | 14.108.908.018         | 99,75        |
| 6183      | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal                                                 | 3.661.631.000          | 3.658.086.626          | 99,90        |



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (*empat ratus lima puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (*seratus tiga*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2022

HASIL PEMANTAUAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

**Hasil Pemantauan SPBE Kementerian**

| No | Nama Instansi                                                     | Indeks | Predikat    |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan        | 2,92   | Baik        |
| 2  | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       | 2,60   | Baik        |
| 3  | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 2,93   | Baik        |
| 4  | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman                        | 2,68   | Baik        |
| 5  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 | 2,90   | Baik        |
| 6  | Kementerian Badan Usaha Milik Negara                              | 3,84   | Sangat Baik |
| 7  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 3,01   | Baik        |
| 8  | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                   | 3,32   | Baik        |
| 9  | Kementerian Dalam Negeri                                          | 3,63   | Sangat Baik |
| 10 | Kementerian Pertahanan                                            | 2,62   | Baik        |
| 11 | Kementerian Pertanian                                             | 3,75   | Sangat Baik |
| 12 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                        | 3,51   | Sangat Baik |
| 13 | Kementerian Perhubungan                                           | 3,33   | Baik        |

| No | Nama Instansi                                                                       | Indeks | Predikat    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 14 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                               | 3,86   | Sangat Baik |
| 15 | Kementerian Kesehatan                                                               | 2,94   | Baik        |
| 16 | Kementerian Agama                                                                   | 2,26   | Cukup       |
| 17 | Kementerian Ketenagakerjaan                                                         | 2,84   | Baik        |
| 18 | Kementerian Sosial                                                                  | 2,28   | Cukup       |
| 19 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                          | 2,73   | Baik        |
| 20 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                  | 3,30   | Baik        |
| 21 | Kementerian Perindustrian                                                           | 2,87   | Baik        |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                                       | 3,17   | Baik        |
| 23 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif     | 3,42   | Baik        |
| 24 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 3,62   | Sangat Baik |
| 25 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional                        | 3,55   | Sangat Baik |

**Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)**

| No | Nama Instansi                                      | Indeks | Predikat    |
|----|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Badan Siber dan Sandi Negara                       | 2,87   | Baik        |
| 2  | Lembaga Administrasi Negara                        | 3,57   | Sangat Baik |
| 3  | Arsip Nasional Republik Indonesia                  | 2,74   | Baik        |
| 4  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2,96   | Baik        |
| 5  | Perpustakaan Nasional RI                           | 3,51   | Sangat Baik |
| 6  | Badan Pengawas Obat dan Makanan                    | 3,12   | Baik        |
| 7  | Lembaga Ketahanan Nasional RI                      | 2,57   | Cukup       |
| 8  | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika       | 2,69   | Baik        |
| 9  | Badan Narkotika Nasional                           | 2,17   | Cukup       |
| 10 | Badan Keamanan Laut                                | 2,71   | Baik        |
| 11 | Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan           | 2,85   | Baik        |
| 12 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 3,21   | Baik        |
| 13 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme            | 2,00   | Cukup       |
| 14 | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia        | 3,05   | Baik        |

### Hasil Pemantauan SPBE Alat Negara

| No | Nama Instansi          | Indeks | Predikat |
|----|------------------------|--------|----------|
| 1  | Badan Intelijen Negara | 3,13   | Baik     |

### Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Kabinet

| No | Nama Instansi       | Indeks | Predikat |
|----|---------------------|--------|----------|
| 1  | Sekretariat Kabinet | 2,30   | Cukup    |

### Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

| No | Nama Instansi                  | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------|--------|----------|
| 1  | Kejaksaan Agung                | 2,18   | Cukup    |
| 2  | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 2,77   | Baik     |
| 3  | Dewan Perwakilan Rakyat        | 2,95   | Baik     |
| 4  | Mahkamah Agung RI              | 2,61   | Baik     |
| 5  | Badan Pemeriksa Keuangan       | 2,68   | Baik     |
| 6  | Mahkamah Konstitusi            | 1,80   | Cukup    |
| 7  | Komisi Yudisial                | 1,82   | Cukup    |
| 8  | Dewan Perwakilan Daerah        | 2,18   | Cukup    |

### Hasil Pemantauan SPBE Instansi Lainnya

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 2,32   | Cukup    |

### Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Penyiaran Publik

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|----------|
| 1  | Televisi Republik Indonesia | 2,09   | Cukup    |
| 2  | Radio Republik Indonesia    | 2,01   | Cukup    |

### Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

| No | Nama Instansi                                   | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Dewan Ketahanan Nasional                        | 2,63   | Baik     |
| 2  | Komisi Pemilihan Umum                           | 2,73   | Baik     |
| 3  | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 2,85   | Baik     |
| 4  | Ombudsman Republik Indonesia                    | 3,01   | Baik     |
| 5  | Komisi Pengawas Persaingan Usaha                | 1,39   | Kurang   |
| 6  | Badan Pengawas Pemilihan Umum                   | 1,88   | Cukup    |

| No | Nama Instansi                         | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------------|--------|----------|
| 7  | Komisi Penyiaran Indonesia            | 2,34   | Cukup    |
| 8  | Komisi Kejaksaan                      | 1,08   | Kurang   |
| 9  | Komisi Aparatur Sipil Negara          | 3,31   | Baik     |
| 10 | Dewan Pers                            | 1,42   | Kurang   |
| 11 | Dewan Jaminan Sosial Nasional         | 2,71   | Baik     |
| 12 | Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban | 1,71   | Kurang   |
| 13 | Lembaga Sensor Film                   | 2,14   | Cukup    |
| 14 | Konsil Kedokteran Indonesia           | 2,03   | Cukup    |
| 15 | Kantor Staf Presiden                  | 2,44   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

| No | Nama Instansi                | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Aceh              | 2,76   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Aceh Timur   | 2,29   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Aceh Barat   | 2,63   | Baik     |
| 4  | Pemerintah Kab. Bireuen      | 2,10   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang | 2,62   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kab. Nagan Raya   | 2,20   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Bener Meriah | 2,60   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kota Sabang       | 1,59   | Kurang   |
| 9  | Pemerintah Kota Banda Aceh   | 3,15   | Baik     |
| 10 | Pemerintah Kota Langsa       | 1,82   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kota Subulussalam | 1,76   | Kurang   |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 2,81   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Deli Serdang       | 3,32   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Karo               | 2,42   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Langkat            | 3,02   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah    | 1,62   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Labuhanbatu        | 1,85   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Dairi              | 2,05   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara     | 2,39   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan   | 2,68   | Baik     |
| 10 | Pemerintah Kab. Asahan             | 1,49   | Kurang   |
| 11 | Pemerintah Kab. Toba               | 1,86   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal   | 2,58   | Cukup    |
| 13 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | 1,84   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat      | 2,40   | Cukup    |
| 15 | Pemerintah Kab. Samosir            | 2,62   | Baik     |

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 16 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai    | 1,92   | Cukup    |
| 17 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | 1,91   | Cukup    |
| 18 | Pemerintah Kab. Batubara           | 2,18   | Cukup    |
| 19 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi      | 2,04   | Cukup    |
| 20 | Pemerintah Kota Binjai             | 1,82   | Cukup    |
| 21 | Pemerintah Kota Pematang Siantar   | 2,35   | Cukup    |
| 22 | Pemerintah Kota Tanjung Balai      | 2,30   | Cukup    |
| 23 | Pemerintah Kota Sibolga            | 1,73   | Kurang   |
| 24 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan    | 1,95   | Cukup    |
| 25 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli      | 2,01   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Riau

| No | Nama Instansi                     | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Riau          | 3,00   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Kampar            | 2,22   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu    | 2,24   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Rokan Hulu        | 2,38   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Siak              | 2,34   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti | 2,12   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kota Pekanbaru         | 2,83   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kota Dumai             | 2,63   | Baik     |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 2,68   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Bintan             | 2,10   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Natuna             | 2,50   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas  | 1,85   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kota Batam              | 2,85   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kota Tanjungpinang      | 1,85   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 3,18   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Agam               | 2,38   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Pasaman            | 1,91   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota     | 3,29   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Solok              | 3,12   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kab. Padang Pariaman    | 2,60   | Baik     |

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 7  | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | 3,48   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kab. Tanah Datar     | 3,21   | Baik     |
| 9  | Pemerintah Kab. Sijunjung       | 2,18   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Solok Selatan   | 2,26   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kab. Dharmasraya     | 2,41   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat   | 2,36   | Cukup    |
| 13 | Pemerintah Kota Bukittinggi     | 2,46   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kota Padang Panjang  | 2,81   | Baik     |
| 15 | Pemerintah Kota Sawahlunto      | 2,84   | Baik     |
| 16 | Pemerintah Kota Solok           | 2,71   | Baik     |
| 17 | Pemerintah Kota Padang          | 3,01   | Baik     |
| 18 | Pemerintah Kota Payakumbuh      | 3,02   | Baik     |
| 19 | Pemerintah Kota Pariaman        | 2,64   | Baik     |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

| No | Nama Instansi                        | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Jambi            | 2,19   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Batang Hari          | 3,04   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 1,63   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Bungo                | 1,50   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Merangin             | 1,56   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Kerinci              | 1,52   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Sarolangun           | 2,63   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kab. Tebo                 | 2,11   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Muaro Jambi          | 1,92   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 2,16   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kota Jambi                | 2,79   | Baik     |
| 12 | Pemerintah Kota Sungai Penuh         | 1,97   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

| No | Nama Instansi                          | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin         | 2,80   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu      | 2,67   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Muara Enim             | 2,91   | Baik     |
| 4  | Pemerintah Kab. Lahat                  | 2,14   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Musi Rawas             | 1,92   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir     | 2,39   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Banyuasin              | 1,86   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | 1,93   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Ogan Ilir              | 2,52   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Empat Lawang           | 1,86   | Cukup    |

| No | Nama Instansi                              | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------------------|--------|----------|
| 11 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara           | 1,53   | Kurang   |
| 12 | Pemerintah Kota Pagar Alam                 | 2,01   | Cukup    |
| 13 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau              | 2,45   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kota Prabumulih                 | 2,62   | Baik     |
| 15 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 1,83   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

| No | Nama Instansi                            | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 3,01   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Bangka                   | 1,85   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Belitung                 | 3,02   | Baik     |
| 4  | Pemerintah Kab. Bangka Barat             | 2,30   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Bangka Tengah            | 2,80   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kab. Bangka Selatan           | 3,01   | Baik     |
| 7  | Pemerintah Kab. Belitung Timur           | 2,70   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kota Pangkal Pinang           | 2,22   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

| No | Nama Instansi                    | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Bengkulu     | 3,11   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara   | 2,17   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | 2,31   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Rejang Lebong    | 2,80   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Seluma           | 2,54   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Mukomuko         | 2,04   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Kepahiang        | 2,13   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Lebong           | 1,55   | Kurang   |
| 9  | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah  | 2,34   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kota Bengkulu         | 2,19   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

| No | Nama Instansi                  | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Lampung    | 3,37   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | 2,10   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Lampung Utara  | 2,43   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Lampung Barat  | 2,26   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Tanggamus      | 1,60   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Way Kanan      | 2,24   | Cukup    |

| No | Nama Instansi                       | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------------|--------|----------|
| 7  | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 2,07   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Pringsewu           | 2,00   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Mesuji              | 2,59   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kota Metro               | 2,49   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kota Bandar Lampung      | 1,50   | Kurang   |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat    |
|----|---------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 3,67   | Sangat Baik |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

| No | Nama Instansi                  | Indeks | Predikat    |
|----|--------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 3,37   | Baik        |
| 2  | Pemerintah Kab. Bogor          | 3,33   | Baik        |
| 3  | Pemerintah Kab. Sukabumi       | 2,29   | Cukup       |
| 4  | Pemerintah Kab. Cianjur        | 2,37   | Cukup       |
| 5  | Pemerintah Kab. Bekasi         | 1,71   | Kurang      |
| 6  | Pemerintah Kab. Karawang       | 3,08   | Baik        |
| 7  | Pemerintah Kab. Purwakarta     | 2,28   | Cukup       |
| 8  | Pemerintah Kab. Subang         | 2,35   | Cukup       |
| 9  | Pemerintah Kab. Bandung        | 2,82   | Baik        |
| 10 | Pemerintah Kab. Sumedang       | 3,84   | Sangat Baik |
| 11 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya    | 2,58   | Cukup       |
| 12 | Pemerintah Kab. Ciamis         | 2,64   | Baik        |
| 13 | Pemerintah Kab. Cirebon        | 2,66   | Baik        |
| 14 | Pemerintah Kab. Kuningan       | 2,88   | Baik        |
| 15 | Pemerintah Kab. Indramayu      | 3,09   | Baik        |
| 16 | Pemerintah Kab. Bandung Barat  | 2,65   | Baik        |
| 17 | Pemerintah Kab. Pangandaran    | 2,82   | Baik        |
| 18 | Pemerintah Kota Bandung        | 3,61   | Sangat Baik |
| 19 | Pemerintah Kota Bogor          | 2,75   | Baik        |
| 20 | Pemerintah Kota Cirebon        | 3,17   | Baik        |
| 21 | Pemerintah Kota Bekasi         | 2,78   | Baik        |
| 22 | Pemerintah Kota Depok          | 3,42   | Baik        |
| 23 | Pemerintah Kota Cimahi         | 3,09   | Baik        |
| 24 | Pemerintah Kota Tasikmalaya    | 2,62   | Baik        |
| 25 | Pemerintah Kota Banjar         | 2,38   | Cukup       |

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Banten

| No | Nama Instansi                     | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Banten        | 3,03   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Serang            | 2,64   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Pandeglang        | 2,47   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Lebak             | 2,63   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Tangerang         | 2,66   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kota Tangerang         | 2,60   | Baik     |
| 7  | Pemerintah Kota Cilegon           | 2,01   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kota Serang            | 2,49   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 2,54   | Cukup    |

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah D.I. Yogyakarta  | 3,02   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Sleman      | 3,19   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Gunungkidul | 2,62   | Baik     |

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 3,34   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Semarang        | 2,13   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Kendal          | 2,93   | Baik     |
| 4  | Pemerintah Kab. Grobogan        | 3,37   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Pekalongan      | 2,62   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kab. Batang          | 2,85   | Baik     |
| 7  | Pemerintah Kab. Tegal           | 3,07   | Baik     |
| 8  | Pemerintah Kab. Brebes          | 2,40   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Kudus           | 3,38   | Baik     |
| 10 | Pemerintah Kab. Pemalang        | 2,23   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kab. Jepara          | 3,14   | Baik     |
| 12 | Pemerintah Kab. Rembang         | 3,19   | Baik     |
| 13 | Pemerintah Kab. Blora           | 2,36   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kab. Banyumas        | 2,60   | Baik     |
| 15 | Pemerintah Kab. Cilacap         | 2,87   | Baik     |
| 16 | Pemerintah Kab. Purbalingga     | 3,20   | Baik     |
| 17 | Pemerintah Kab. Banjarnegara    | 2,86   | Baik     |
| 18 | Pemerintah Kab. Magelang        | 3,13   | Baik     |
| 19 | Pemerintah Kab. Wonosobo        | 2,90   | Baik     |
| 20 | Pemerintah Kab. Purworejo       | 2,80   | Baik     |
| 21 | Pemerintah Kab. Kebumen         | 3,44   | Baik     |

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat    |
|----|-----------------------------|--------|-------------|
| 22 | Pemerintah Kab. Sragen      | 3,10   | Baik        |
| 23 | Pemerintah Kab. Sukoharjo   | 3,42   | Baik        |
| 24 | Pemerintah Kab. Karanganyar | 3,32   | Baik        |
| 25 | Pemerintah Kab. Wonogiri    | 3,34   | Baik        |
| 26 | Pemerintah Kota Semarang    | 3,38   | Baik        |
| 27 | Pemerintah Kota Salatiga    | 2,84   | Baik        |
| 28 | Pemerintah Kota Tegal       | 3,05   | Baik        |
| 29 | Pemerintah Kota Magelang    | 2,67   | Baik        |
| 30 | Pemerintah Kota Surakarta   | 3,73   | Sangat Baik |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

| No | Nama Instansi                  | Indeks | Predikat    |
|----|--------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 3,30   | Baik        |
| 2  | Pemerintah Kab. Gresik         | 3,27   | Baik        |
| 3  | Pemerintah Kab. Mojokerto      | 2,73   | Baik        |
| 4  | Pemerintah Kab. Sidoarjo       | 2,29   | Cukup       |
| 5  | Pemerintah Kab. Jombang        | 2,96   | Baik        |
| 6  | Pemerintah Kab. Sampang        | 2,55   | Cukup       |
| 7  | Pemerintah Kab. Pamekasan      | 2,10   | Cukup       |
| 8  | Pemerintah Kab. Sumenep        | 2,05   | Cukup       |
| 9  | Pemerintah Kab. Bangkalan      | 1,89   | Cukup       |
| 10 | Pemerintah Kab. Bondowoso      | 2,23   | Cukup       |
| 11 | Pemerintah Kab. Situbondo      | 3,19   | Baik        |
| 12 | Pemerintah Kab. Jember         | 1,99   | Cukup       |
| 13 | Pemerintah Kab. Malang         | 2,22   | Cukup       |
| 14 | Pemerintah Kab. Pasuruan       | 2,04   | Cukup       |
| 15 | Pemerintah Kab. Probolinggo    | 2,42   | Cukup       |
| 16 | Pemerintah Kab. Lumajang       | 2,60   | Baik        |
| 17 | Pemerintah Kab. Kediri         | 2,61   | Baik        |
| 18 | Pemerintah Kab. Tulungagung    | 2,38   | Cukup       |
| 19 | Pemerintah Kab. Nganjuk        | 2,18   | Cukup       |
| 20 | Pemerintah Kab. Trenggalek     | 2,55   | Cukup       |
| 21 | Pemerintah Kab. Blitar         | 2,61   | Baik        |
| 22 | Pemerintah Kab. Magetan        | 2,27   | Cukup       |
| 23 | Pemerintah Kab. Ponorogo       | 2,32   | Cukup       |
| 24 | Pemerintah Kab. Pacitan        | 2,31   | Cukup       |
| 25 | Pemerintah Kab. Bojonegoro     | 2,65   | Baik        |
| 26 | Pemerintah Kab. Tuban          | 2,32   | Cukup       |
| 27 | Pemerintah Kab. Lamongan       | 2,82   | Baik        |
| 28 | Pemerintah Kota Surabaya       | 3,69   | Sangat Baik |
| 29 | Pemerintah Kota Mojokerto      | 3,32   | Baik        |

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|----------|
| 30 | Pemerintah Kota Malang      | 2,60   | Baik     |
| 31 | Pemerintah Kota Pasuruan    | 2,66   | Baik     |
| 32 | Pemerintah Kota Probolinggo | 1,97   | Cukup    |
| 33 | Pemerintah Kota Blitar      | 2,81   | Baik     |
| 34 | Pemerintah Kota Kediri      | 2,96   | Baik     |
| 35 | Pemerintah Kota Madiun      | 2,86   | Baik     |
| 36 | Pemerintah Kota Batu        | 2,41   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

| No | Nama Instansi                        | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 3,42   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Sambas               | 2,44   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Sanggau              | 2,88   | Baik     |
| 4  | Pemerintah Kab. Sintang              | 1,03   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Mempawah             | 2,61   | Baik     |
| 6  | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu          | 2,76   | Baik     |
| 7  | Pemerintah Kab. Ketapang             | 1,91   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Bengkayang           | 1,87   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Landak               | 2,13   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Sekadau              | 2,46   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kab. Kubu Raya            | 2,34   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kab. Kayong Utara         | 1,88   | Cukup    |
| 13 | Pemerintah Kota Pontianak            | 3,28   | Baik     |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

| No | Nama Instansi                         | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 1,90   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Barito Utara          | 1,42   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Barito Selatan        | 2,37   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur    | 2,38   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat    | 2,15   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Pulang Pisau          | 1,64   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Lamandau              | 2,15   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Sukamara              | 1,84   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Katingan              | 2,25   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Barito Timur          | 1,71   | Kurang   |
| 11 | Pemerintah Kota Palangka Raya         | 2,66   | Baik     |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan**

| <b>No</b> | <b>Nama Instansi</b>               | <b>Indeks</b> | <b>Predikat</b> |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1         | Pemerintah Kab. Banjar             | 2,56          | Cukup           |
| 2         | Pemerintah Kab. Tanah Laut         | 3,11          | Baik            |
| 3         | Pemerintah Kab. Tapin              | 2,29          | Cukup           |
| 4         | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah | 2,69          | Baik            |
| 5         | Pemerintah Kab. Barito Kuala       | 2,59          | Cukup           |
| 6         | Pemerintah Kab. Tabalong           | 2,00          | Cukup           |
| 7         | Pemerintah Kab. Kotabaru           | 2,04          | Cukup           |
| 8         | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu        | 3,16          | Baik            |
| 9         | Pemerintah Kab. Balangan           | 2,44          | Cukup           |
| 10        | Pemerintah Kota Banjarmasin        | 3,31          | Baik            |
| 11        | Pemerintah Kota Banjarbaru         | 2,26          | Cukup           |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur**

| <b>No</b> | <b>Nama Instansi</b>                 | <b>Indeks</b> | <b>Predikat</b> |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1         | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 2,11          | Cukup           |
| 2         | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara    | 1,94          | Cukup           |
| 3         | Pemerintah Kab. Paser                | 2,13          | Cukup           |
| 4         | Pemerintah Kab. Kutai Barat          | 1,81          | Cukup           |
| 5         | Pemerintah Kab. Kutai Timur          | 2,79          | Baik            |
| 6         | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara  | 1,82          | Cukup           |
| 7         | Pemerintah Kota Samarinda            | 2,44          | Cukup           |
| 8         | Pemerintah Kota Balikpapan           | 3,05          | Baik            |
| 9         | Pemerintah Kota Bontang              | 2,70          | Baik            |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara**

| <b>No</b> | <b>Nama Instansi</b>                 | <b>Indeks</b> | <b>Predikat</b> |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1         | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 1,98          | Cukup           |
| 2         | Pemerintah Kab. Bulungan             | 2,32          | Cukup           |
| 3         | Pemerintah Kota Tarakan              | 2,11          | Cukup           |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara**

| <b>No</b> | <b>Nama Instansi</b>               | <b>Indeks</b> | <b>Predikat</b> |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1         | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | 2,28          | Cukup           |
| 2         | Pemerintah Kab. Minahasa           | 1,80          | Cukup           |
| 3         | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow  | 2,74          | Baik            |
| 4         | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe  | 1,68          | Kurang          |
| 5         | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud   | 2,09          | Cukup           |
| 6         | Pemerintah Kab. Minahasa Utara     | 1,51          | Kurang          |

| No | Nama Instansi                             | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------------------|--------|----------|
| 7  | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara   | 2,04   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara         | 2,22   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2,15   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kota Manado                    | 1,82   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kota Bitung                    | 2,57   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kota Tomohon                   | 1,76   | Kurang   |
| 13 | Pemerintah Kota Kota Mobagu               | 2,25   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

| No | Nama Instansi                 | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Gorontalo | 2,48   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Gorontalo     | 2,03   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Bone Bolango  | 2,30   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kota Gorontalo     | 2,59   | Cukup    |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

| No | Nama Instansi                       | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 2,26   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Poso                | 1,81   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Buol                | 2,08   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Morowali            | 1,97   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan   | 2,04   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Sigi                | 1,91   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kota Palu                | 1,76   | Kurang   |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

| No | Nama Instansi                        | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 2,35   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Wajo                 | 2,51   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Bone                 | 2,11   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Maros                | 2,04   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Luwu                 | 2,26   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Sinjai               | 2,07   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Bulukumba            | 1,81   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kab. Bantaeng             | 2,29   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Jeneponto            | 2,16   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar    | 1,83   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kab. Barru                | 2,06   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang    | 2,32   | Cukup    |

| No | Nama Instansi                            | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------------|--------|----------|
| 13 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 2,12   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kab. Soppeng                  | 2,67   | Baik     |
| 15 | Pemerintah Kab. Enrekang                 | 2,65   | Baik     |
| 16 | Pemerintah Kab. Luwu Utara               | 2,93   | Baik     |
| 17 | Pemerintah Kota Makassar                 | 2,45   | Cukup    |
| 18 | Pemerintah Kota Parepare                 | 2,50   | Cukup    |
| 19 | Pemerintah Kota Palopo                   | 2,90   | Baik     |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

| No | Nama Instansi                         | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 1,74   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Kolaka                | 3,15   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Konawe Selatan        | 2,01   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Kolaka Utara          | 1,87   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Buton Utara           | 2,02   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Buton Tengah          | 2,50   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kota Kendari               | 2,02   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kota Baubau                | 1,38   | Kurang   |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat    |
|----|------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 2,28   | Cukup       |
| 2  | Pemerintah Kab. Mamuju             | 1,90   | Cukup       |
| 3  | Pemerintah Kab. Polewali Mandar    | 3,58   | Sangat Baik |
| 4  | Pemerintah Kab. Majene             | 2,55   | Cukup       |

#### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bali

| No | Nama Instansi              | Indeks | Predikat    |
|----|----------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pemerintah Kab. Buleleng   | 3,03   | Baik        |
| 2  | Pemerintah Kab. Jembrana   | 2,76   | Baik        |
| 3  | Pemerintah Kab. Karangasem | 2,16   | Cukup       |
| 4  | Pemerintah Kab. Bangli     | 2,28   | Cukup       |
| 5  | Pemerintah Kab. Badung     | 2,48   | Cukup       |
| 6  | Pemerintah Kab. Tabanan    | 2,74   | Baik        |
| 7  | Pemerintah Kota Denpasar   | 3,68   | Sangat Baik |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat**

| No | Nama Instansi                 | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi NTB       | 3,24   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Lombok Barat  | 2,62   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 2,08   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Sumbawa       | 2,23   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Dompu         | 1,20   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 2,66   | Baik     |
| 7  | Pemerintah Kab. Lombok Utara  | 2,40   | Cukup    |
| 8  | Pemerintah Kota Mataram       | 3,16   | Baik     |
| 9  | Pemerintah Kota Bima          | 1,91   | Cukup    |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur**

| No | Nama Instansi                        | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi NTT              | 3,35   | Baik     |
| 2  | Pemerintah Kab. Kupang               | 1,85   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara   | 1,21   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 2,61   | Baik     |
| 5  | Pemerintah Kab. Alor                 | 1,81   | Cukup    |
| 6  | Pemerintah Kab. Sikka                | 1,83   | Cukup    |
| 7  | Pemerintah Kab. Flores Timur         | 1,52   | Kurang   |
| 8  | Pemerintah Kab. Manggarai            | 1,76   | Kurang   |
| 9  | Pemerintah Kab. Sumba Timur          | 2,31   | Cukup    |
| 10 | Pemerintah Kab. Sumba Barat          | 2,25   | Cukup    |
| 11 | Pemerintah Kab. Rote Ndao            | 2,48   | Cukup    |
| 12 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat      | 3,01   | Baik     |
| 13 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur      | 2,46   | Cukup    |
| 14 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya     | 1,35   | Kurang   |
| 15 | Pemerintah Kab. Nagekeo              | 1,14   | Kurang   |
| 16 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah         | 1,25   | Kurang   |
| 17 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua          | 2,14   | Cukup    |
| 18 | Pemerintah Kab. Malaka               | 1,99   | Cukup    |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku**

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Maluku         | 2,23   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat | 1,75   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya  | 1,84   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kota Ambon              | 2,24   | Cukup    |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara**

| No | Nama Instansi                    | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 2,47   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Halmahera Utara  | 2,33   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 1,71   | Kurang   |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat**

| No | Nama Instansi                     | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Papua Barat   | 2,10   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Sorong            | 2,09   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Manokwari         | 1,60   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Fak-Fak           | 1,53   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Kaimana           | 1,16   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Manokwari Selatan | 1,39   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kota Sorong            | 1,72   | Kurang   |

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua**

| No | Nama Instansi              | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Provinsi Papua  | 1,88   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Jayapura   | 2,61   | Baik     |
| 3  | Pemerintah Kab. Jayawijaya | 1,51   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Keerom     | 1,39   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kota Jayapura   | 1,85   | Cukup    |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2022

HASIL EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

**Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)**

| No | Nama Instansi                    | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Badan Riset dan Inovasi Nasional | 3,43   | Baik     |

**Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)**

| No | Nama Instansi                            | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia        | 2,42   | Cukup    |
| 2  | Badan Nasional Sertifikasi Profesi       | 1,54   | Kurang   |
| 3  | Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi | 2,77   | Baik     |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh**

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Aceh Besar      | 1,85   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Pidie           | 2,03   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Aceh Utara      | 1,62   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Aceh Selatan    | 1,47   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Aceh Tengah     | 1,13   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara   | 1,65   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya | 1,62   | Kurang   |
| 8  | Pemerintah Kab. Gayo Lues       | 1,62   | Kurang   |
| 9  | Pemerintah Kab. Aceh Jaya       | 2,01   | Cukup    |

| No | Nama Instansi              | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------|--------|----------|
| 10 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya | 1,54   | Kurang   |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

| No | Nama Instansi                | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Simalungun   | 1,74   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Nias         | 2,02   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Nias Selatan | 1,37   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Padang Lawas | 1,72   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Nias Barat   | 1,79   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Nias Utara   | 1,48   | Kurang   |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Bengkalis       | 2,21   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir | 2,13   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Rokan Hilir     | 2,12   | Cukup    |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

| No | Nama Instansi           | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Karimun | 1,58   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Lingga  | 1,97   | Cukup    |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

| No | Nama Instansi                 | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai | 1,23   | Kurang   |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

| No | Nama Instansi                           | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 2,25   | Cukup    |

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

| No | Nama Instansi        | Indeks | Predikat |
|----|----------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Kaur | 1,27   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 1,70   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Tulang Bawang   | 2,09   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Lampung Timur   | 1,90   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Pesawaran       | 1,95   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Pesisir Barat   | 1,94   | Cukup    |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

| No | Nama Instansi          | Indeks | Predikat |
|----|------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Melawi | 1,27   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Kapuas      | 1,83   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Gunung Mas  | 1,99   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Murung Raya | 1,77   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Seruyan     | 1,35   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

| No | Nama Instansi                       | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | 2,35   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara   | 1,76   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

| No | Nama Instansi         | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Berau | 1,97   | Cukup    |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

| No | Nama Instansi               | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Malinau     | 2,04   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Nunukan     | 2,35   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Tana Tidung | 2,06   | Cukup    |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

| No | Nama Instansi                           | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan        | 1,64   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro  | 1,90   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2,04   | Cukup    |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

| No | Nama Instansi                   | Indeks | Predikat |
|----|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Boalemo         | 2,02   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Pohuwato        | 2,06   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara | 1,55   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

| No | Nama Instansi                  | Indeks | Predikat |
|----|--------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Donggala       | 1,38   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Tolitoli       | 1,66   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Banggai        | 2,07   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | 1,51   | Kurang   |
| 5  | Pemerintah Kab. Tojo Una Una   | 1,03   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Banggai Laut   | 1,22   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Morowali Utara | 1,67   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

| No | Nama Instansi                | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Tana Toraja  | 1,62   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Takalar      | 1,96   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Luwu Timur   | 2,42   | Cukup    |
| 4  | Pemerintah Kab. Toraja Utara | 1,77   | Kurang   |

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

| No | Nama Instansi                | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Konawe       | 1,70   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Buton        | 1,65   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Muna         | 1,38   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Bombana      | 2,08   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Wakatobi     | 1,27   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Konawe Utara | 1,61   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Kolaka Timur | 1,33   | Kurang   |

| No | Nama Instansi                    | Indeks | Predikat |
|----|----------------------------------|--------|----------|
| 8  | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | 1,94   | Cukup    |
| 9  | Pemerintah Kab. Muna Barat       | 1,53   | Kurang   |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat**

| No | Nama Instansi                 | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Pasangkayu    | 1,09   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Mamasa        | 1,00   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Mamuju Tengah | 1,83   | Cukup    |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat**

| No | Nama Instansi                | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 1,91   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Bima         | 1,36   | Kurang   |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur**

| No | Nama Instansi           | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Belu    | 1,92   | Cukup    |
| 2  | Pemerintah Kab. Ngada   | 1,31   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Lembata | 1,67   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kota Kupang  | 2,05   | Cukup    |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku**

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Maluku Tengah      | 1,15   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara    | 1,92   | Cukup    |
| 3  | Pemerintah Kab. Buru               | 1,34   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar | 2,02   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur | 1,34   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Buru Selatan       | 1,14   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kota Tual               | 2,05   | Cukup    |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara**

| No | Nama Instansi                     | Indeks | Predikat |
|----|-----------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Halmahera Barat   | 1,30   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | 1,72   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Pulau Morotai     | 1,42   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Pulau Taliabu     | 1,55   | Kurang   |

| No | Nama Instansi           | Indeks | Predikat |
|----|-------------------------|--------|----------|
| 5  | Pemerintah Kota Ternate | 1,06   | Kurang   |

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua**

| No | Nama Instansi                      | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Pemerintah Kab. Merauke            | 1,06   | Kurang   |
| 2  | Pemerintah Kab. Nabire             | 1,46   | Kurang   |
| 3  | Pemerintah Kab. Puncak Jaya        | 1,61   | Kurang   |
| 4  | Pemerintah Kab. Mimika             | 1,83   | Cukup    |
| 5  | Pemerintah Kab. Boven Digoel       | 1,34   | Kurang   |
| 6  | Pemerintah Kab. Mappi              | 1,59   | Kurang   |
| 7  | Pemerintah Kab. Yahukimo           | 1,06   | Kurang   |
| 8  | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang | 1,00   | Kurang   |
| 9  | Pemerintah Kab. Supiori            | 1,42   | Kurang   |
| 10 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah   | 1,42   | Kurang   |
| 11 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya         | 1,06   | Kurang   |
| 12 | Pemerintah Kab. Intan Jaya         | 1,06   | Kurang   |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN DARI TAHUN 2020 S.D TAHUN 2022

| NO | NAMA K/L/D                                                                        | PREDIKAT            | NILAI | TAHUN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1  | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                        | P4 (Efektif)        | 72,58 | 2022  |
| 2  | Kementerian Dalam Negeri                                                          | P4 (Efektif)        | 72,83 | 2022  |
| 3  | Kementerian Hukum dan HAM                                                         | P5 (Sangat Efektif) | 83,93 | 2022  |
| 4  | Kementerian Pertahanan                                                            | P4 (Efektif)        | 78,06 | 2022  |
| 5  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                 | P5 (Sangat Efektif) | 82,64 | 2022  |
| 6  | Kementerian Perdagangan                                                           | P4 (Efektif)        | 77,89 | 2022  |
| 7  | Kementerian Pertanian                                                             | P4 (Efektif)        | 79,75 | 2022  |
| 8  | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)                | P5 (Sangat Efektif) | 80,99 | 2022  |
| 9  | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                                     | P4 (Efektif)        | 78,85 | 2022  |
| 10 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                 | P5 (Sangat Efektif) | 81,25 | 2022  |
| 11 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan                   | P4 (Efektif)        | 72,46 | 2022  |
| 12 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | P4 (Efektif)        | 77,61 | 2022  |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                        | P4 (Efektif)        | 75,23 | 2022  |
| 14 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)                                  | P4 (Efektif)        | 79,75 | 2022  |
| 15 | Badan Kepegawaian Negara (BKN)                                                    | P5 (Sangat Efektif) | 82,57 | 2022  |
| 16 | Badan Narkotika Nasional (BNN)                                                    | P4 (Efektif)        | 70,45 | 2022  |
| 17 | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)                                             | P4 (Efektif)        | 65,79 | 2022  |

| NO | NAMA K/L/D                                                 | PREDIKAT            | NILAI | TAHUN |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 18 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)             | P4 (Efektif)        | 73,35 | 2022  |
| 19 | Badan Pusat Statistik (BPS)                                | P4 (Efektif)        | 61,51 | 2022  |
| 20 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | P4 (Efektif)        | 68,07 | 2022  |
| 21 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI)/BNP2TKI | P5 (Sangat Efektif) | 81,62 | 2022  |
| 22 | Kejaksaan Agung                                            | P4 (Efektif)        | 79,63 | 2022  |
| 23 | Badan Intelijen Negara (BIN)                               | P4 (Efektif)        | 73,55 | 2022  |
| 24 | Setjen DPD                                                 | P5 (Sangat Efektif) | 82,78 | 2022  |
| 25 | Komisi Yudisial (KY)                                       | P4 (Efektif)        | 64,15 | 2022  |
| 26 | Mahkamah Konstitusi (MK)                                   | P5 (Sangat Efektif) | 82,33 | 2022  |
| 27 | Mahkamah Agung (MA)                                        | P4 (Efektif)        | 64,48 | 2022  |
| 28 | Bada Riset dan Inovasi Nasional                            | P4 (Efektif)        | 64,38 | 2022  |
| 29 | Ombudsman                                                  | P4 (Efektif)        | 80,13 | 2022  |
| 30 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                        | P5 (Sangat Efektif) | 81,35 | 2022  |
| 31 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)               | P4 (Efektif)        | 69,80 | 2022  |
| 32 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)             | P4 (Efektif)        | 70,59 | 2022  |
| 33 | Komisi Pemilihan Umum (KPU)                                | P4 (Efektif)        | 70,61 | 2022  |
| 34 | Badan Pengawasan Pemilihan Umum                            | P4 (Efektif)        | 68,07 | 2022  |
| 35 | Setjen Dewan Ketahanan Nasional                            | P4 (Efektif)        | 77,40 | 2022  |
| 36 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi                   | P4 (Efektif)        | 75,23 | 2022  |
| 37 | Setjen Dewan Energi Nasional                               | P4 (Efektif)        | 75,23 | 2022  |
| 38 | Kabupaten Bekasi                                           | P4 (Efektif)        | 79,55 | 2022  |
| 39 | Kota Bogor                                                 | P4 (Efektif)        | 86,97 | 2022  |
| 40 | Kab. Aceh Besar                                            | P4 (Efektif)        | 67,20 | 2022  |
| 41 | Kota Sabang                                                | P5 (Sangat Efektif) | 69,32 | 2022  |
| 42 | Kab. Indragiri Hilir                                       | P4 (Efektif)        | 69,31 | 2022  |

| NO | NAMA K/L/D                     | PREDIKAT     | NILAI | TAHUN |
|----|--------------------------------|--------------|-------|-------|
| 43 | Kab. Indragiri Hulu            | P4 (Efektif) | 68,89 | 2022  |
| 44 | Kabupaten Kampar               | P4 (Efektif) | 71,13 | 2022  |
| 45 | Kabupaten Pelalawan            | P4 (Efektif) | 64,04 | 2022  |
| 46 | Kabupaten Rokan Hilir          | P4 (Efektif) | 61,96 | 2022  |
| 47 | Kota Dumai                     | P4 (Efektif) | 63,31 | 2022  |
| 48 | Kota Pekanbaru                 | P4 (Efektif) | 61,65 | 2022  |
| 49 | Kabupaten Batanghari           | P4 (Efektif) | 66,18 | 2022  |
| 50 | Kabupaten Bungo                | P4 (Efektif) | 61,61 | 2022  |
| 51 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | P4 (Efektif) | 63,30 | 2022  |
| 52 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | P4 (Efektif) | 64,30 | 2022  |
| 53 | Kabupaten Tebo                 | P4 (Efektif) | 64,30 | 2022  |
| 54 | Kota Jambi                     | P4 (Efektif) | 69,68 | 2022  |
| 55 | Kabupaten Lahat                | P4 (Efektif) | 77,78 | 2022  |
| 56 | Kabupaten Muara Enim           | P4 (Efektif) | 75,00 | 2022  |
| 57 | Kabupaten Musi Rawas Utara     | P4 (Efektif) | 66,16 | 2022  |
| 58 | Kota Pagar Alam                | P4 (Efektif) | 66,16 | 2022  |
| 59 | Kabupaten Bangka               | P4 (Efektif) | 69,02 | 2022  |
| 60 | Kabupaten Bangka Barat         | P4 (Efektif) | 67,77 | 2022  |
| 61 | Kabupaten Bangka Tengah        | P4 (Efektif) | 63,55 | 2022  |
| 62 | Kabupaten Karawang             | P4 (Efektif) | 67,41 | 2022  |
| 63 | Kabupaten Sumedang             | P4 (Efektif) | 62,24 | 2022  |
| 64 | Kota Banjar                    | P4 (Efektif) | 63,10 | 2022  |
| 65 | Kabupaten Tasikmalaya          | P4 (Efektif) | 77,18 | 2022  |

| NO | NAMA K/L/D                   | PREDIKAT     | NILAI | TAHUN |
|----|------------------------------|--------------|-------|-------|
| 66 | Kabupaten Serang             | P4 (Efektif) | 65,80 | 2022  |
| 67 | Kota Tangerang               | P4 (Efektif) | 69,52 | 2022  |
| 68 | Kabupaten Kendal             | P4 (Efektif) | 67,95 | 2022  |
| 69 | Kabupaten Batul              | P4 (Efektif) | 78,94 | 2022  |
| 70 | Kabupaten Gunung Kidul       | P4 (Efektif) | 64,39 | 2022  |
| 71 | Kabupaten Kulon Progo        | P4 (Efektif) | 60,60 | 2022  |
| 72 | Kabupaten Sleman             | P4 (Efektif) | 68,27 | 2022  |
| 73 | Kota Yogyakarta              | P4 (Efektif) | 66,27 | 2022  |
| 74 | Kabuaten Balangan            | P4 (Efektif) | 62,87 | 2022  |
| 75 | Kabupaten Tabalog            | P4 (Efektif) | 72,54 | 2022  |
| 76 | Kabupaten Barito Selatan     | P4 (Efektif) | 61,21 | 2022  |
| 77 | Kabupaten Barito Timur       | P4 (Efektif) | 68,90 | 2022  |
| 78 | Kabupaten Barito Utara       | P4 (Efektif) | 66,40 | 2022  |
| 79 | Kabupaten Kapuas             | P4 (Efektif) | 61,59 | 2022  |
| 80 | Kabupaten Katingan           | P4 (Efektif) | 62,02 | 2022  |
| 81 | Kabupaten Kotawaringin Timur | P4 (Efektif) | 64,77 | 2022  |
| 82 | Kabupaten Lamandau           | P4 (Efektif) | 70,71 | 2022  |
| 83 | Kabupaten Seruyan            | P4 (Efektif) | 67,27 | 2022  |
| 84 | Kabupaten Sukamara           | P4 (Efektif) | 64,77 | 2022  |
| 85 | Kabupaten Tanah Laut         | P4 (Efektif) | 75,91 | 2022  |
| 86 | Kabupaten Manggarai          | P4 (Efektif) | 62,59 | 2022  |
| 87 | Kabupaten Manggarai Timur    | P4 (Efektif) | 61,83 | 2022  |
| 88 | Kota Banjar Baru             | P4 (Efektif) | 66,84 | 2022  |
| 89 | Kota Banjarmasin             | P4 (Efektif) | 73,17 | 2022  |
| 90 | NTT                          | P4 (Efektif) | 67,40 | 2022  |
| 91 | Kalimantan Utara             | P4 (Efektif) | 73,12 | 2022  |
| 92 | Lampung                      | P4 (Efektif) | 69,74 | 2022  |
| 93 | Riau                         | P4 (Efektif) | 72,62 | 2022  |
| 94 | Jawa Tengah                  | P4 (Efektif) | 74,71 | 2022  |

| NO  | NAMA K/L/D                                         | PREDIKAT            | NILAI | TAHUN |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 95  | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)             | P4 (Efektif)        | 64,41 | 2021  |
| 96  | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | P4 (Efektif)        | 61,50 | 2021  |
| 97  | Badan Informasi dan Geospasial (BIG)               | P4 (Efektif)        | 62,23 | 2021  |
| 98  | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)             | P5 (Sangat Efektif) | 84,49 | 2021  |
| 99  | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)                     | P4 (Efektif)        | 76,25 | 2021  |
| 100 | Kabupaten Banyuwangi                               | P4 (Efektif)        | 65,75 | 2021  |
| 101 | Kabupaten Bojonegoro                               | P4 (Efektif)        | 61,36 | 2021  |
| 102 | Kabupaten Bondowoso                                | P4 (Efektif)        | 62,07 | 2021  |
| 103 | Kabupaten Jombang                                  | P4 (Efektif)        | 65,06 | 2021  |
| 104 | Kabupaten Kediri                                   | P4 (Efektif)        | 60,50 | 2021  |
| 105 | Kabupaten Lamongan                                 | P4 (Efektif)        | 64,57 | 2021  |
| 106 | Kabupaten Lumajang                                 | P4 (Efektif)        | 65,57 | 2021  |
| 107 | Kabupaten Madiun                                   | P4 (Efektif)        | 62,13 | 2021  |
| 108 | Kabupaten Magetan                                  | P4 (Efektif)        | 65,61 | 2021  |
| 109 | Kabupaten Mojokerto                                | P4 (Efektif)        | 61,79 | 2021  |
| 110 | Kabupaten Ngawi                                    | P4 (Efektif)        | 62,99 | 2021  |
| 111 | Kabupaten Pacitan                                  | P4 (Efektif)        | 64,56 | 2021  |
| 112 | Kota Kediri                                        | P4 (Efektif)        | 63,70 | 2021  |
| 113 | Kabupaten Badung                                   | P4 (Efektif)        | 66,03 | 2021  |
| 114 | Kabupaten Gianyar                                  | P4 (Efektif)        | 67,17 | 2021  |
| 115 | Kabupaten Klungkung                                | P4 (Efektif)        | 63,20 | 2021  |
| 116 | Kabupaten Kupang                                   | P3 (Cukup Efektif)  | 60,04 | 2021  |
| 117 | Kabupaten Manggarai                                | P4 (Efektif)        | 62,83 | 2021  |
| 118 | Kabupaten Manggarai Timur                          | P3 (Cukup Efektif)  | 59,06 | 2021  |
| 119 | Kabupaten Sumba Barat                              | P3 (Cukup Efektif)  | 58,86 | 2021  |
| 120 | Kabupaten Sumba Tengah                             | P4 (Efektif)        | 61,48 | 2021  |
| 121 | Kabupaten Sumba Timur                              | P4 (Efektif)        | 60,79 | 2021  |

| NO  | NAMA K/L/D                                                                          | PREDIKAT            | NILAI | TAHUN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 122 | Kabupaten Timor Tengah Utara                                                        | P3 (Cukup Efektif)  | 59,27 | 2021  |
| 123 | Kota Kupang                                                                         | P4 (Efektif)        | 76,18 | 2021  |
| 124 | Kabupaten Maluku Tengah                                                             | P4 (Efektif)        | 66,06 | 2021  |
| 125 | Kabupaten Maluku Tenggara                                                           | P4 (Efektif)        | 68,19 | 2021  |
| 126 | Banten                                                                              | P4 (Efektif)        | 69,79 | 2021  |
| 127 | Bali                                                                                | P4 (Efektif)        | 67,17 | 2021  |
| 128 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | P4 (Efektif)        | 78,77 | 2020  |
| 129 | Kementerian Kesehatan                                                               | P4 (Efektif)        | 77,24 | 2020  |
| 130 | Kementerian Agama                                                                   | P3 (Cukup Efektif)  | 58,69 | 2020  |
| 131 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                  | P5 (Sangat Efektif) | 91,47 | 2020  |
| 132 | Badan Standardisasi Nasional (BSN)                                                  | P5 (Sangat Efektif) | 87,08 | 2020  |



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1034 TAHUN 2022  
TENTANG  
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
TAHUN 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;
- b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Desember 2022

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR : 1034 TAHUN 2022**

**TENTANG : UNIT KERJA BERPREDIKAT  
MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) TAHUN 2022**

**NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
TAHUN 2022**

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK)**

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                             | <b>NAMA INSTANSI<br/>PEMERINTAH</b>                |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | Direktorat Layanan dan Pemanfaatan                 | Arsip Nasional Republik Indonesia                  |
| 2         | Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika       | Badan Informasi Geospasial                         |
| 3         | Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                   | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| 4         | Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura                 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika       |
| 5         | Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang                 | Badan Narkotika Nasional                           |
| 6         | Balai Besar POM di Makassar                        | Badan Pengawas Obat dan Makanan                    |
| 7         | Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau            | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan          |
| 8         | Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan          |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                         | <b>NAMA INSTANSI<br/>PEMERINTAH</b>                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9         | Perwakilan BPKP Provinsi Riau                                                  | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                    |
| 10        | BPS Kabupaten Jembrana                                                         | Badan Pusat Statistik                                        |
| 11        | BPS Kota Tasikmalaya                                                           | Badan Pusat Statistik                                        |
| 12        | BPS Kabupaten Boalemo                                                          | Badan Pusat Statistik                                        |
| 13        | BPS Kabupaten Klungkung                                                        | Badan Pusat Statistik                                        |
| 14        | BPS Provinsi Kalimantan Tengah                                                 | Badan Pusat Statistik                                        |
| 15        | BPS Provinsi Jambi                                                             | Badan Pusat Statistik                                        |
| 16        | Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi | Badan Standardisasi Nasional                                 |
| 17        | Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia       | Badan Standardisasi Nasional                                 |
| 18        | Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang                                              | Kejaksaan Agung                                              |
| 19        | Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus                                                 | Kementerian Agama                                            |
| 20        | Madrasah Aliyah Negeri Karangasem                                              | Kementerian Agama                                            |
| 21        | Kantor Pertanahan Kota Kupang                                                  | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 22        | Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut                                         | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 23        | Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar                                        | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 24        | Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan                                       | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 25        | Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan                                            | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 26        | Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang                                           | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                          | <b>NAMA INSTANSI PEMERINTAH</b>                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 27        | Museum Geologi - Badan Geologi                                  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                      |
| 28        | Rupbasan Kelas II Blitar                                        | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                         |
| 29        | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari                             | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                         |
| 30        | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo                         | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                         |
| 31        | Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang        | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                              |
| 32        | Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru     | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                              |
| 33        | Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                              |
| 34        | Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta               | Kementerian Kesehatan                                                           |
| 35        | Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town               | Kementerian Luar Negeri                                                         |
| 36        | Politeknik Pariwisata Bali                                      | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 37        | Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores                      | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 38        | Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur                        | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 |
| 39        | Balai Sains Bangunan                                            | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 |
| 40        | Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak                                | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                        |
| 41        | Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur                                | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                        |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                                                                  | <b>NAMA INSTANSI PEMERINTAH</b>                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 42        | Balai Bahasa Provinsi Bali                                                                                              | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                            |
| 43        | Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan                                                                        | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                            |
| 44        | Balai Standardisasi Metrologi Legal I                                                                                   | Kementerian Perdagangan                                                             |
| 45        | Balai Standardisasi Metrologi Legal IV                                                                                  | Kementerian Perdagangan                                                             |
| 46        | Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga                                                               | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 47        | Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Guntur Melati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat | Kementerian Perhubungan                                                             |
| 48        | Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar                                                                                | Kementerian Perhubungan                                                             |
| 49        | Politeknik Transportasi Darat Bali                                                                                      | Kementerian Perhubungan                                                             |
| 50        | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam                                     | Kementerian Perindustrian                                                           |
| 51        | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru                                                               | Kementerian Perindustrian                                                           |
| 52        | Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar                                                                                 | Kementerian Perindustrian                                                           |
| 53        | Balai Diklat Industri Makassar                                                                                          | Kementerian Perindustrian                                                           |
| 54        | Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Makassar                                                                                 | Kementerian Perindustrian                                                           |
| 55        | Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potan Kemhan                                                        | Kementerian Pertahanan                                                              |
| 56        | Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo                                                                            | Kementerian Pertanian                                                               |
| 57        | Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak                                                                             | Kementerian Pertanian                                                               |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                                                                          | <b>NAMA INSTANSI<br/>PEMERINTAH</b>                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 58        | Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur                                                     | Kementerian Sekretariat Negara                     |
| 59        | Biro SDM Polda Sulsel                                                                                                           | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |
| 60        | KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                                                | Komisi Pemilihan Umum                              |
| 61        | Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                      | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 62        | Direktorat Sertifikasi Profesi                                                                                                  | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 63        | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara                                                     | Mahkamah Agung                                     |
| 64        | Pengadilan Tinggi Agama Kendari                                                                                                 | Mahkamah Agung                                     |
| 65        | Pengadilan Tinggi Agama Medan                                                                                                   | Mahkamah Agung                                     |
| 66        | Pengadilan Agama Mimika                                                                                                         | Mahkamah Agung                                     |
| 67        | Pengadilan Agama Unaaha                                                                                                         | Mahkamah Agung                                     |
| 68        | Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan                                                                                        | Mahkamah Konstitusi                                |
| 69        | Brigif Para Raider 18/Trisula Divif 2 Kostrad                                                                                   | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 70        | Lanud Roesmin Nurjadin                                                                                                          | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 71        | Pushidrosal (Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut)                                                                         | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 72        | Pusdikarhanud Pussenarhanud Kodiklatad (Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara) | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 73        | Puspomad (Pusat Polisi Militer TNI AD)                                                                                          | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 74        | Pussenarmed (Pusat Kesenjataan Artileri Medan) Kodiklatad                                                                       | Tentara Nasional Indonesia                         |
| 75        | UPTD Puskesmas Mengwi I                                                                                                         | Pemerintah Kabupaten Badung                        |
| 76        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro                                                     | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro                    |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                               | <b>NAMA INSTANSI PEMERINTAH</b>          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 77        | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali                                             | Pemerintah Kabupaten Boyolali            |
| 78        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 79        | Puskesmas Bareng                                                                     | Pemerintah Kabupaten Jombang             |
| 80        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Pemerintah Kabupaten Kebumen             |
| 81        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Pemerintah Kabupaten Kediri              |
| 82        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                              | Pemerintah Kabupaten Lumajang            |
| 83        | UPT Puskesmas Penanggal                                                              | Pemerintah Kabupaten Lumajang            |
| 84        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Pemerintah Kabupaten Magetan             |
| 85        | RSUD Dr. Soeroto                                                                     | Pemerintah Kabupaten Ngawi               |
| 86        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Pemerintah Kabupaten Pacitan             |
| 87        | Puskesmas Gemaharjo                                                                  | Pemerintah Kabupaten Pacitan             |
| 88        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                              | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman     |
| 89        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)                     | Pemerintah Kabupaten Pasuruan            |
| 90        | Badan Pelayanan Pajak Daerah                                                         | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo            |
| 91        | Kecamatan Taman                                                                      | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo            |
| 92        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Pemerintah Kabupaten Trenggalek          |
| 93        | Puskesmas Trenggalek                                                                 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek          |
| 94        | Kecamatan Kepanjenkidul                                                              | Pemerintah Kota Blitar                   |
| 95        | Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada                                                 | Pemerintah Kota Bontang                  |

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                | <b>NAMA INSTANSI PEMERINTAH</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 96        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)      | Pemerintah Kota Kediri          |
| 97        | Badan Pendapatan Daerah                                               | Pemerintah Kota Malang          |
| 98        | Puskesmas Gedongan                                                    | Pemerintah Kota Mojokerto       |
| 99        | Puskesmas Kanigaran                                                   | Pemerintah Kota Probolinggo     |
| 100       | Puskesmas Sukabumi                                                    | Pemerintah Kota Sukabumi        |
| 101       | Kecamatan Banjarsari                                                  | Pemerintah Kota Surakarta       |
| 102       | UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek, Badan Pendapatan Daerah | Pemerintah Provinsi Jawa Timur  |

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

| <b>NO</b> | <b>NAMA UNIT KERJA</b>                                                                | <b>NAMA INSTANSI PEMERINTAH</b>           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1         | Auditorat Utama Investigasi                                                           | Badan Pemeriksa Keuangan                  |
| 2         | BPK Perwakilan Provinsi Riau                                                          | Badan Pemeriksa Keuangan                  |
| 3         | BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu                                                      | Badan Pemeriksa Keuangan                  |
| 4         | BPK Perwakilan Provinsi Jambi                                                         | Badan Pemeriksa Keuangan                  |
| 5         | Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat                                          | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 6         | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul                                             | Kementerian Agama                         |
| 7         | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali                                        | Kementerian Agama                         |
| 8         | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar | Kementerian Kelautan dan Perikanan        |
| 9         | Politeknik STTT Bandung                                                               | Kementerian Perindustrian                 |

| NO | NAMA UNIT KERJA                                       | NAMA INSTANSI PEMERINTAH             |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10 | Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang                 | Kementerian Pertanian                |
| 11 | Polres Barito Selatan                                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 12 | Polres Kulon Progo                                    | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 13 | Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta                   | Mahkamah Agung                       |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Pemerintah Kabupaten Wonogiri        |
| 15 | RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak    | Pemerintah Kota Pontianak            |
| 16 | Kecamatan Kademangan                                  | Pemerintah Kota Probolinggo          |
| 17 | Rumah Sakit Mata Bali Mandara                         | Pemerintah Provinsi Bali             |

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1035 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Shi Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN            KEPUTUSAN            MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 1035 TAHUN  
TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA,  
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                    | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                             | INDEKS | KATEGORI |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1.  | Badan Pusat Statistik                      | Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan                      | 4,75   | A        |
| 2.  | Kementerian Komunikasi dan Informatika     | Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi                     | 4,62   | A        |
| 3.  | Kementerian Kelautan dan Perikanan         | Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar               | 4,58   | A        |
| 4.  | Kementerian Perindustrian                  | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang              | 4,58   | A        |
| 5.  | Badan Narkotika Nasional                   | Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Provinsi Kalimantan Timur                                       | 4,57   | A        |
| 6.  | Badan Pengawas Obat dan Makanan            | Balai Besar POM di Yogyakarta                                                                     | 4,56   | A        |
| 7.  | Lembaga Administrasi Negara                | Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Bandung                  | 4,56   | A        |
| 8.  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Perizinan Ketenagalistrikan dan Pengaduan konsumen listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | 4,56   | A        |
| 9.  | Kementerian Agama                          | Pelayanan Terpadu Kantor Kabupaten Bantul                                                         | 4,56   | A        |
| 10. | Kementerian Perhubungan                    | Pelayanan Jasa Transportasi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan                   | 4,55   | A        |

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                                           | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                       | INDEKS | KATEGORI |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 11. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                        | Biro Komunikasi                                                                                                                                             | 4,54   | A        |
| 12. | Kementerian Perdagangan                                           | Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu                                                                                                              | 4,54   | A        |
| 13. | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)               | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Pembinaan Tenaga dan Potensi Pencarian Pertolongan                                               | 4,53   | A        |
| 14. | Kementerian Pertanian                                             | Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian                                                                                                 | 4,53   | A        |
| 15. | Mahkamah Konstitusi                                               | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                                                                                    | 4,53   | A        |
| 16. | Kementerian Keuangan                                              | Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia                                                                                                           | 4,53   | A        |
| 17. | Badan Riset dan Inovasi Nasional                                  | Pengujian, Analisis Pengukuran, Kalibrasi Pembinaan, Magang dan Sewa, Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi | 4,52   | A        |
| 18. | Perpustakaan Nasional                                             | Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara                                                                                          | 4,51   | A        |
| 19. | Badan Kepegawaian Negara                                          | Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional Regional X BKN Denpasar                                                        | 4,51   | A        |
| 20. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Deputi Bidang Pelayanan Publik                                                                                                                              | 4,51   | A        |
| 21. | Kementerian Luar Negeri                                           | Museum Konferensi Asia Afrika                                                                                                                               | 4,51   | A        |
| 22. | Badan Informasi Geospasial                                        | Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial                                                                            | 4,49   | A-       |
| 23. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   | Balai Teknologi Air Minum                                                                                                                                   | 4,46   | A-       |
| 24. | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan       | Layanan Informasi Publik (PPID), Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat                                                                           | 4,42   | A-       |
| 25. | Kementerian Kesehatan                                             | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo                                                                                                      | 4,41   | A-       |

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                                  | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                                                              | INDEKS | KATEGORI |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 26. | Kementerian Ketenagakerjaan                              | Layanan Pelatihan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Jakarta         | 4,36   | A-       |
| 27. | Lembaga Ketahanan Nasional                               | Layanan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan                                         | 4,35   | A-       |
| 28. | Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan              | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme                                              | 4,35   | A-       |
| 29. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                             | Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif                                                                          | 4,34   | A-       |
| 30. | Kementerian Sekretariat Negara                           | Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, Biro Administrasi Pejabat Negara | 4,34   | A-       |
| 31. | Komisi Pemilihan Umum                                    | Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur                                         | 4,34   | A-       |
| 32. | Badan Pengusahaan Batam                                  | Layanan Kepelabuhan                                                                                                                | 4,33   | A-       |
| 33. | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI          | Layanan Dukungan Persidangan Kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan                                                               | 4,31   | A-       |
| 34. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Penyediaan Data dan Informasi Publik, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi                         | 4,3    | A-       |
| 35. | Ombudsman RI                                             | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat                                                                                             | 4,28   | A-       |
| 36. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah   | Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)                                        | 4,25   | A-       |
| 37. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                | Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                  | 4,24   | A-       |
| 38. | Badan Intelijen Negara                                   | Deputi Komunikasi dan Informasi                                                                                                    | 4,18   | A-       |
| 39. | Badan Siber dan Sandi Negara                             | Layanan GoV- CISRT Direktorat Operasi Keamanan Siber                                                                               | 4,13   | A-       |

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                                           | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                                           | INDEKS | KATEGORI |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40. | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Layanan Konsultasi dan Audiensi, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama | 4,13   | A-       |
| 41. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                             | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana                                                           | 4,12   | A-       |
| 42. | Kementerian Pertahanan                                            | Pelayanan Perizinan Ekspor/Impor Alpalhankam                                                                    | 4,09   | A-       |
| 43. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas             | Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana                                                             | 4,07   | A-       |
| 44. | Kementerian Dalam Negeri                                          | Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kedinasan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri                                  | 4,06   | A-       |
| 45. | Kementerian Sosial                                                | Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi                                                                        | 4,05   | A-       |
| 46. | Badan Pemeriksa Keuangan                                          | Layanan Komunikasi Stakeholder dan Pengaduan, BPK Provinsi Jawa Timur                                           | 4,04   | A-       |
| 47. | Komisi Pemberantasan Korupsi                                      | Layanan Pelaporan Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik                                      | 4,03   | A-       |
| 48. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban                             | Biro Penelaahan Permohonan                                                                                      | 4,03   | A-       |
| 49. | Komisi Yudisial                                                   | Biro Pengawasan Perilaku Hakim                                                                                  | 4,02   | A-       |
| 50. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                               | Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong                                                                         | 4,01   | A-       |
| 51. | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia                       | Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah   | 4,01   | A-       |
| 52. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi          | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah                                                        | 4,01   | A-       |
| 53. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | Layanan Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan                    | 4,01   | A-       |
| 54. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Pusat Jakarta    | 4      | B        |

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                                | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                          | INDEKS | KATEGORI |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 55. | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                | Layanan Kunjungan Keluarga di Lapas Khusus Terorisme, Direktorat Deradikalisasi                                                                | 3,99   | B        |
| 56. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan             | Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XI Yogyakarta | 3,92   | B        |
| 57. | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha                                                                                                        | 3,91   | B        |
| 58. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian            | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama                                                                                       | 3,91   | B        |
| 59. | Tentara Nasional Indonesia (TNI)                       | Lembaga Pendidikan Militer, Akademi Angkatan Udara (AAU) TNI Angkatan Udara (4,05/A-)                                                          | 3,91   | B        |
|     |                                                        | Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) Kodiklatad TNI Angkatan Darat (4,54/A)                                             |        |          |
|     |                                                        | Keamanan Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II, Komando Armada II TNI Angkatan Laut (3,14/B-).                                              |        |          |
| 60. | Komisi Aparatur Sipil Negara                           | Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN                                           | 3,88   | B        |
| 61. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                | Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia                                                                                              | 3,9    | B        |
| 62. | Mahkamah Agung                                         | Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia                                                                                              | 3,87   | B        |
| 63. | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah      | Layanan Pengelola Dana Bergulir koperasi dan UMKM                                                                                              | 3,85   | B        |
| 64. | Kementerian Pemuda dan Olahraga                        | Layanan Kepemudaan, Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON)                                                                    | 3,85   | B        |
| 65. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                      | Layanan Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia                                 | 3,82   | B        |
| 66. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia      | Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha                                                                                                      | 3,8    | B        |
| 67. | Arsip Nasional Republik Indonesia                      | Pusat Jasa Kearsipan                                                                                                                           | 3,78   | B        |
| 68. | Kementerian Desa, Pembangunan                          | Layanan Perizinan IPT Direktorat Pelayanan Investasi                                                                                           | 3,78   | B        |

| NO. | KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA                                         | UNIT PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                  | INDEKS | KATEGORI |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     | Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi                          | Desa, Daerah Tertinggal dan<br>Transmigrasi                                                                                            |        |          |
| 69. | Kementerian Agraria<br>dan Tata Ruang/<br>BPN*                  | Unit Lokus Tertentu pada 33<br>Provinsi di Indonesia                                                                                   | 3,78   | B        |
| 70. | Badan Meteorologi,<br>Klimatologi, dan<br>Geofisika             | Layanan Meteorologi,<br>Klimatologi dan Geofisika,<br>Stasiun Geofisika Kelas I<br>Bandung                                             | 3,76   | B        |
| 71. | Kementerian Badan<br>Usaha Milik Negara                         | Asisten Deputi Bidang Industri<br>Kesehatan                                                                                            | 3,69   | B        |
| 72. | Kepolisian Republik<br>Indonesia                                | 332 Polres/Polresta/<br>Polrestabes/Polres Metro                                                                                       | 3,88   | B        |
| 73. | Badan Pembinaan<br>Ideologi Pancasila                           | Pelayanan Pembentukan<br>Pasukan Pengibar Bendera<br>Pusaka                                                                            | 3,64   | B        |
| 74. | Badan Standarisasi<br>Nasional                                  | Layanan Kalibrasi                                                                                                                      | 3,62   | B        |
| 75. | Sekretariat Jenderal<br>Dewan Perwakilan<br>Daerah RI           | Layanan PPID, Biro Protokol,<br>Hubungan Masyarakat, dan<br>Media                                                                      | 3,59   | B        |
| 76. | Badan Koordinator<br>Keamanan Laut                              | Layanan Pembinaan Masyarakat<br>Maritim Direktorat Kerjasama                                                                           | 3,56   | B        |
| 77. | Televisi Republik<br>Indonesia                                  | Layanan Pengaduan Kualitas<br>dan Isi Siaran Program dan<br>Berita, Direktorat Program Dan<br>Berita                                   | 3,48   | B-       |
| 78. | Kejaksaan Agung                                                 | Unit Lokus Tertentu pada 34<br>Provinsi di Indonesia                                                                                   | 3,46   | B-       |
| 79. | Dewan Ketahanan<br>Nasional                                     | Biro Persidangan, Sistem<br>Informasi dan Pengawasan<br>Internal                                                                       | 3,44   | B-       |
| 80. | Sekretariat Jenderal<br>Majelis<br>Permusyawaratan<br>Rakyat RI | Layanan Informasi Publik<br>Pejabat Pengelola Informasi dan<br>Dokumentasi MPR RI, Biro<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sistem Informasi | 3,24   | B-       |
| 81. | Badan Pengawasan<br>Pemilihan Umum                              | Biro Fasilitasi Penyelesaian<br>Sengketa Proses Pemilu                                                                                 | 3      | C        |

B. LIMA KEMENTERIAN/LEMBAGA KHUSUS

| No | Provinsi                     | Kejaksaan Agung |          | Kementerian Keuangan |          | Kementerian Hukum dan HAM |          | Kementerian ATR/BPN |          | Mahkamah Agung |          |
|----|------------------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|
|    |                              | Indeks          | Kategori | Indeks               | Kategori | Indeks                    | Kategori | Indeks              | Kategori | Indeks         | Kategori |
| 1  | Provinsi Aceh                | 3,54            | B        | 4,35                 | A-       | 4                         | B        | 3,87                | B        | 3,93           | B        |
| 2  | Provinsi Bali                | 3,72            | B        | 4,74                 | A        | 4,02                      | A-       | 4,48                | A-       | 3,95           | B        |
| 3  | Provinsi Bangka Belitung     | 3,4             | B-       | 4,59                 | A        | 4,55                      | A        | 3,82                | B        | 3,58           | B        |
| 4  | Provinsi Banten              | 3,03            | B-       | 4,65                 | A        | 3,73                      | B        | 3,56                | B        | 3,64           | B        |
| 5  | Provinsi Bengkulu            | 4,3             | A-       | 4,44                 | A-       | 2,79                      | C        | 3,63                | B        | 3,51           | B        |
| 6  | Provinsi DIY                 | 3,24            | B-       | 4,77                 | A        | 4,69                      | A        | 4,48                | A-       | 4,36           | A-       |
| 7  | Provinsi DKI Jakarta         | 3,84            | B        | 4,75                 | A        | 4,45                      | A-       | 4,18                | A-       | 4,3            | A-       |
| 8  | Provinsi Gorontalo           | 3,46            | B-       | 4,58                 | A        | 3,98                      | B        | 4,01                | A-       | 4,18           | A-       |
| 9  | Provinsi Jambi               | 3,15            | B-       | 4,39                 | A-       | 4,02                      | A-       | 3,58                | B        | 4,6            | A        |
| 10 | Provinsi Jawa Barat          | 3,63            | B        | 4,38                 | A-       | 4,62                      | A        | 4,13                | A-       | 4,04           | A-       |
| 11 | Provinsi Jawa Tengah         | 3,32            | B-       | 4,69                 | A        | 4,19                      | A-       | 3,29                | B-       | 2,87           | C        |
| 12 | Provinsi Jawa Timur          | 3,8             | B        | 4,5                  | A-       | 3,67                      | B        | 3,82                | B        | 4,57           | A        |
| 13 | Provinsi Kalimantan Barat    | 3,06            | B-       | 4,58                 | A        | 3,04                      | B-       | 4,33                | A-       | 3,16           | B-       |
| 14 | Provinsi Kalimantan Selatan  | 2,49            | C-       | 4,76                 | A        | 3,72                      | B        | 4,45                | A-       | 4,68           | A        |
| 15 | Provinsi Kalimantan Tengah   | 3,07            | B-       | 4,8                  | A        | 3,68                      | B        | 4,36                | A-       | 2,98           | C        |
| 16 | Provinsi Kalimantan Timur    | 3,06            | B-       | 4,76                 | A        | 3,92                      | B        | 3,53                | B        | 4,36           | A-       |
| 17 | Provinsi Kalimantan Utara    | 3,1             | B-       | 4,51                 | A        | 3,99                      | B        | 3,2                 | B-       | 4,42           | A-       |
| 18 | Provinsi Kepulauan Riau      | 4,68            | A        | 4,21                 | A-       | 4,51                      | A        | 4,35                | A-       | 3,36           | B-       |
| 19 | Provinsi Lampung             | 3,73            | B        | 4,22                 | A-       | 3,77                      | B        | 3,87                | B        | 3,57           | B        |
| 20 | Provinsi Maluku              | 3,54            | B        | 4,12                 | A-       | 3,68                      | B        | 3,44                | B-       | 3,89           | B        |
| 21 | Provinsi Maluku Utara        | 2,63            | C        | 4,78                 | A        | 3,51                      | B        | 4,29                | A-       | 4,12           | A-       |
| 22 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3,99            | B        | 4,57                 | A        | 3,52                      | B        | 3,53                | B        | 4,47           | A-       |

| No | Provinsi                     | Kejaksaan Agung |          | Kementerian Keuangan |          | Kementerian Hukum dan HAM |          | Kementerian ATR/BPN |          | Mahkamah Agung |          |
|----|------------------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|
|    |                              | Indeks          | Kategori | Indeks               | Kategori | Indeks                    | Kategori | Indeks              | Kategori | Indeks         | Kategori |
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3,32            | B-       | 4,68                 | A        | 3,6                       | B        | 3,21                | B-       | 4,65           | A        |
| 24 | Provinsi Papua               | 4,01            | A-       | 4,32                 | A-       | 4,03                      | A-       | 3,2                 | B-       | 3,05           | B-       |
| 25 | Provinsi Papua Barat         | 3,65            | B        | 4,21                 | A-       | 3,81                      | B        | 2,99                | C        | 3,07           | B-       |
| 26 | Provinsi Riau                | 3,8             | B        | 4,52                 | A        | 2,31                      | C-       | 4,62                | A        | 4,24           | A-       |
| 27 | Provinsi Sulawesi Barat      | 3,66            | B        | 4,21                 | A-       | 3,58                      | B        |                     |          | 3,76           | B        |
| 28 | Provinsi Sulawesi Selatan    | 3,61            | B        | 4,63                 | A        | 3,91                      | B        | 3,37                | B-       | 4,27           | A-       |
| 29 | Provinsi Sulawesi Tengah     | 2,93            | C        | 4,79                 | A        | 4,51                      | A        | 3,22                | B-       | 4,17           | A-       |
| 30 | Provinsi Sulawesi Tenggara   | 3,25            | B-       | 4,7                  | A        | 3,85                      | B        | 3,06                | B-       | 3,45           | B-       |
| 31 | Provinsi Sulawesi Utara      | 3,6             | B        | 4,47                 | A-       | 4,07                      | A-       | 3,23                | B-       | 3,41           | B-       |
| 32 | Provinsi Sumatera Barat      | 3,09            | B-       | 4,15                 | A-       | 4,52                      | A        | 3,48                | B-       | 3,84           | B        |
| 33 | Provinsi Sumatera Selatan    | 3,59            | B        | 4,75                 | A        | 3,74                      | B        | 3,61                | B        | 3,52           | B        |
| 34 | Provinsi Sumatera Utara      | 3,4             | B-       | 4,4                  | A-       | 4,52                      | A        | 4,51                | A        | 3,69           | B        |

C. DPM-PTSP PROVINSI

| No  | DPMPTSP Provinsi             | Indeks | Kategori |
|-----|------------------------------|--------|----------|
| 1.  | Provinsi Jawa Barat          | 4,64   | A        |
| 2.  | Provinsi DKI Jakarta         | 4,63   | A        |
| 3.  | Provinsi DIY                 | 4,59   | A        |
| 4.  | Provinsi Jawa Tengah         | 4,56   | A        |
| 5.  | Provinsi Bali                | 4,54   | A        |
| 6.  | Provinsi Riau                | 4,53   | A        |
| 7.  | Provinsi Gorontalo           | 4,52   | A        |
| 8.  | Provinsi Kalimantan Selatan  | 4,51   | A        |
| 9.  | Provinsi Jawa Timur          | 4,51   | A        |
| 10. | Provinsi Sumatera Selatan    | 4,48   | A-       |
| 11. | Provinsi Kalimantan Barat    | 4,46   | A-       |
| 12. | Provinsi Sulawesi Tenggara   | 4,45   | A-       |
| 13. | Provinsi Sulawesi Selatan    | 4,44   | A-       |
| 14. | Provinsi Bangka Belitung     | 4,4    | A-       |
| 15. | Provinsi Banten              | 4,36   | A-       |
| 16. | Provinsi Maluku Utara        | 4,26   | A-       |
| 17. | Provinsi Bengkulu            | 4,23   | A-       |
| 18. | Provinsi Kepulauan Riau      | 4,19   | A-       |
| 19. | Provinsi Lampung             | 4,11   | A-       |
| 20. | Provinsi Sulawesi Tengah     | 4,08   | A-       |
| 21. | Provinsi Kalimantan Utara    | 4,06   | A-       |
| 22. | Provinsi Sumatera Utara      | 4,03   | A-       |
| 23. | Provinsi Maluku              | 4,03   | A-       |
| 24. | Provinsi Aceh                | 4,01   | A-       |
| 25. | Provinsi Kalimantan Tengah   | 3,96   | B        |
| 26. | Provinsi Sumatera Barat      | 3,93   | B        |
| 27. | Provinsi Sulawesi Utara      | 3,93   | B        |
| 28. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3,9    | B        |
| 29. | Provinsi Sulawesi Barat      | 3,83   | B        |
| 30. | Provinsi Jambi               | 3,7    | B        |
| 31. | Provinsi Kalimantan Timur    | 3,53   | B        |
| 32. | Provinsi Papua Barat         | 3,32   | B-       |
| 33. | Provinsi Papua               | 3,27   | B-       |
| 34. | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3,04   | B-       |

D. SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP/SAMSAT PROVINSI

| No  | Samsat Provinsi              | Indeks | Kategori |
|-----|------------------------------|--------|----------|
| 1.  | Provinsi Jawa Timur          | 4,65   | A        |
| 2.  | Provinsi DIY                 | 4,62   | A        |
| 3.  | Provinsi Jawa Barat          | 4,59   | A        |
| 4.  | Provinsi Sumatera Selatan    | 4,58   | A        |
| 5.  | Provinsi Bengkulu            | 4,57   | A        |
| 6.  | Provinsi Papua Barat         | 4,52   | A        |
| 7.  | Provinsi Jawa Tengah         | 4,51   | A        |
| 8.  | Provinsi Lampung             | 4,50   | A-       |
| 9.  | Provinsi Kepulauan Riau      | 4,49   | A-       |
| 10. | Provinsi Bangka Belitung     | 4,49   | A-       |
| 11. | Provinsi Kalimantan Timur    | 4,47   | A-       |
| 12. | Provinsi Jambi               | 4,38   | A-       |
| 13. | Provinsi Kalimantan Barat    | 4,38   | A-       |
| 14. | Provinsi Sulawesi Utara      | 4,35   | A-       |
| 15. | Provinsi Sulawesi Selatan    | 4,24   | A-       |
| 16. | Provinsi Sulawesi Tenggara   | 4,21   | A-       |
| 17. | Provinsi DKI Jakarta         | 4,16   | A-       |
| 18. | Provinsi Gorontalo           | 4,15   | A-       |
| 19. | Provinsi Maluku Utara        | 4,11   | A-       |
| 20. | Provinsi Kalimantan Selatan  | 4,02   | A-       |
| 21. | Provinsi Aceh                | 4,01   | A-       |
| 22. | Provinsi Sumatera Utara      | 3,96   | B        |
| 23. | Provinsi Maluku              | 3,78   | B        |
| 24. | Provinsi Sumatera Barat      | 3,74   | B        |
| 25. | Provinsi Banten              | 3,61   | B        |
| 26. | Provinsi Kalimantan Utara    | 3,54   | B        |
| 27. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3,52   | B        |
| 28. | Provinsi Bali                | 3,45   | B-       |
| 29. | Provinsi Papua               | 3,22   | B-       |
| 30. | Provinsi Sulawesi Barat      | 3,14   | B-       |
| 31. | Provinsi Kalimantan Tengah   | 3,01   | B-       |
| 32. | Provinsi Sulawesi Tengah     | 2,99   | C        |
| 33. | Provinsi Riau                | 2,88   | C        |
| 34. | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2,58   | C        |

E. DPM-PTSP KABUPATEN/KOTA

| No | DPM-PTSP KAB/KOTA             | Indeks | Kategori |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1  | Kota Pekanbaru                | 4,75   | A        |
| 2  | Kota Palembang                | 4,74   | A        |
| 3  | Kabupaten Banyuwangi          | 4,73   | A        |
| 4  | Kabupaten Pandeglang          | 4,72   | A        |
| 5  | Kabupaten Badung              | 4,71   | A        |
| 6  | Kota Bogor                    | 4,68   | A        |
| 7  | Kabupaten Tabalong            | 4,68   | A        |
| 8  | Kabupaten Madiun              | 4,67   | A        |
| 9  | Kabupaten Probolinggo         | 4,67   | A        |
| 10 | Kabupaten Kulonprogo          | 4,67   | A        |
| 11 | Kabupaten Sleman              | 4,67   | A        |
| 12 | Kota Bandung                  | 4,66   | A        |
| 13 | Kabupaten Bandung             | 4,66   | A        |
| 14 | Kabupaten Sumedang            | 4,66   | A        |
| 15 | Kota Banjarbaru               | 4,66   | A        |
| 16 | Kabupaten Banyumas            | 4,66   | A        |
| 17 | Kota Surakarta                | 4,66   | A        |
| 18 | Kabupaten Kutai Kartanegara   | 4,65   | A        |
| 19 | Kota Denpasar                 | 4,64   | A        |
| 20 | Kabupaten Gunung Kidul        | 4,64   | A        |
| 21 | Kota Kendari                  | 4,63   | A        |
| 22 | Kota Bekasi                   | 4,62   | A        |
| 23 | Kabupaten Bantul              | 4,62   | A        |
| 24 | Kabupaten Bone Bolango        | 4,62   | A        |
| 25 | Kabupaten Kendal              | 4,61   | A        |
| 26 | Kota Banda Aceh               | 4,6    | A        |
| 27 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 4,6    | A        |
| 28 | Kota Bandar lampung           | 4,59   | A        |

| No | DPM-PTSP KAB/KOTA         | Indeks | Kategori |
|----|---------------------------|--------|----------|
| 29 | Kota Metro                | 4,59   | A        |
| 30 | Kabupaten Tulang Bawang   | 4,59   | A        |
| 31 | Kabupaten Magetan         | 4,59   | A        |
| 32 | Kabupaten Jepara          | 4,59   | A        |
| 33 | Kota Semarang             | 4,59   | A        |
| 34 | Kota Payakumbuh           | 4,58   | A        |
| 35 | Kota Tangerang Selatan    | 4,58   | A        |
| 36 | Kabupaten Gresik          | 4,58   | A        |
| 37 | Kota Bukittinggi          | 4,57   | A        |
| 38 | Kota Surabaya             | 4,57   | A        |
| 39 | Kabupaten Sidoarjo        | 4,57   | A        |
| 40 | Kota Yogyakarta           | 4,57   | A        |
| 41 | Kabupaten Padang Pariaman | 4,56   | A        |
| 42 | Kabupaten Siak            | 4,56   | A        |
| 43 | Kota Tanjungpinang        | 4,56   | A        |
| 44 | Kabupaten Tuban           | 4,56   | A        |
| 45 | Kota Salatiga             | 4,56   | A        |
| 46 | Kabupaten Bekasi          | 4,55   | A        |
| 47 | Kabupaten Purwakarta      | 4,55   | A        |
| 48 | Kabupaten Gianyar         | 4,55   | A        |
| 49 | Kabupaten Kebumen         | 4,55   | A        |
| 50 | Kabupaten Bantaeng        | 4,55   | A        |
| 51 | Kota Jambi                | 4,54   | A        |
| 52 | Kabupaten Lamongan        | 4,54   | A        |
| 53 | Kota Samarinda            | 4,54   | A        |
| 54 | Kota Manado               | 4,54   | A        |
| 55 | Kabupaten Pinrang         | 4,54   | A        |
| 56 | Kota Tebing Tinggi        | 4,53   | A        |

| No | DPM-PTSP KAB/KOTA        | Indeks | Kategori |
|----|--------------------------|--------|----------|
| 57 | Kota Batam               | 4,53   | A        |
| 58 | Kabupaten Banyuasin      | 4,53   | A        |
| 59 | Kabupaten Karawang       | 4,53   | A        |
| 60 | Kota Mojokerto           | 4,53   | A        |
| 61 | Kota Singkawang          | 4,53   | A        |
| 62 | Kota Balikpapan          | 4,53   | A        |
| 63 | Kabupaten Cilacap        | 4,53   | A        |
| 64 | Kabupaten Batang         | 4,53   | A        |
| 65 | Kabupaten Karanganyar    | 4,53   | A        |
| 66 | Kabupaten Pati           | 4,53   | A        |
| 67 | Kabupaten Barru          | 4,53   | A        |
| 68 | Kota Sawahlunto          | 4,52   | A        |
| 69 | Kabupaten Musi Banyuasin | 4,52   | A        |
| 70 | Kota Tasikmalaya         | 4,52   | A        |
| 71 | Kabupaten Bojonegoro     | 4,52   | A        |
| 72 | Kabupaten Tanah Laut     | 4,52   | A        |
| 73 | Kabupaten Blora          | 4,52   | A        |
| 74 | Kabupaten Sukoharjo      | 4,52   | A        |
| 75 | Kota Cimahi              | 4,52   | A        |
| 76 | Kota Pariaman            | 4,51   | A        |
| 77 | Kabupaten Bandung Barat  | 4,51   | A        |
| 78 | Kabupaten Sanggau        | 4,51   | A        |
| 79 | Kota Banjarmasin         | 4,51   | A        |
| 80 | Kabupaten Barito Kuala   | 4,51   | A        |
| 81 | Kabupaten Belu           | 4,51   | A        |
| 82 | Kabupaten Purbalingga    | 4,51   | A        |
| 83 | Kabupaten Wonogiri       | 4,51   | A        |
| 84 | Kota Magelang            | 4,51   | A        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                 | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| 85  | Kabupaten Purworejo               | 4,51   | A        |
| 86  | Kota Palu                         | 4,51   | A        |
| 87  | Kabupaten Maros                   | 4,51   | A        |
| 88  | Kota Pare-Pare                    | 4,51   | A        |
| 89  | Kabupaten Kepulauan Selayar       | 4,51   | A        |
| 90  | Kabupaten Boyolali                | 4,5    | A-       |
| 91  | Kota Bengkulu                     | 4,49   | A-       |
| 92  | Kabupaten Buleleng                | 4,48   | A-       |
| 93  | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4,47   | A-       |
| 94  | Kota Blitar                       | 4,47   | A-       |
| 95  | Kota Probolinggo                  | 4,47   | A-       |
| 96  | Kabupaten Temanggung              | 4,46   | A-       |
| 97  | Kabupaten Kuningan                | 4,45   | A-       |
| 98  | Kota Tangerang                    | 4,45   | A-       |
| 99  | Kabupaten Seruyan                 | 4,45   | A-       |
| 100 | Kota Tegal                        | 4,45   | A-       |
| 101 | Kota Solok                        | 4,44   | A-       |
| 102 | Kota Pontianak                    | 4,44   | A-       |
| 103 | Kabupaten Grobogan                | 4,44   | A-       |
| 104 | Kota Malang                       | 4,42   | A-       |
| 105 | Kabupaten Klungkung               | 4,42   | A-       |
| 106 | Kabupaten Klaten                  | 4,42   | A-       |
| 107 | Kota Padang                       | 4,41   | A-       |
| 108 | Kabupaten Karangasem              | 4,41   | A-       |
| 109 | Kota Lubuklinggau                 | 4,4    | A-       |
| 110 | Kota Palopo                       | 4,4    | A-       |
| 111 | Kota Administrasi Jakarta Utara   | 4,4    | A-       |
| 112 | Kabupaten Cianjur                 | 4,39   | A-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                 | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| 113 | Kota Padang Panjang               | 4,38   | A-       |
| 114 | Kabupaten Bombana                 | 4,37   | A-       |
| 115 | Kabupaten Lampung Utara           | 4,37   | A-       |
| 116 | Kabupaten Malang                  | 4,37   | A-       |
| 117 | Kota Batu                         | 4,37   | A-       |
| 118 | Kabupaten Bangka Tengah           | 4,36   | A-       |
| 119 | Kabupaten Bogor                   | 4,35   | A-       |
| 120 | Kota Madiun                       | 4,35   | A-       |
| 121 | Kota Tomohon                      | 4,34   | A-       |
| 122 | Kabupaten Semarang                | 4,34   | A-       |
| 123 | Kabupaten Merauke                 | 4,34   | A-       |
| 124 | Kabupaten Natuna                  | 4,33   | A-       |
| 125 | Kabupaten Ngawi                   | 4,32   | A-       |
| 126 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 4,31   | A-       |
| 127 | Kabupaten Garut                   | 4,3    | A-       |
| 128 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah      | 4,3    | A-       |
| 129 | Kota Pekalongan                   | 4,29   | A-       |
| 130 | Kabupaten Brebes                  | 4,29   | A-       |
| 131 | Kabupaten Kotawaringin Barat      | 4,27   | A-       |
| 132 | Kabupaten Sukabumi                | 4,26   | A-       |
| 133 | Kabupaten Trenggalek              | 4,26   | A-       |
| 134 | Kabupaten Sintang                 | 4,26   | A-       |
| 135 | Kabupaten Pesawaran               | 4,25   | A-       |
| 136 | Kota Administrasi Jakarta Timur   | 4,25   | A-       |
| 137 | Kabupaten Pulang Pisau            | 4,25   | A-       |
| 138 | Kabupaten Banjar                  | 4,25   | A-       |
| 139 | Kabupaten Serang                  | 4,24   | A-       |
| 140 | Kabupaten Kotabaru                | 4,24   | A-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA               | Indeks | Kategori |
|-----|---------------------------------|--------|----------|
| 141 | Kabupaten Pekalongan            | 4,23   | A-       |
| 142 | Kabupaten Tanah Datar           | 4,22   | A-       |
| 143 | Kabupaten Bintan                | 4,22   | A-       |
| 144 | Kota Depok                      | 4,22   | A-       |
| 145 | Kabupaten Tulungagung           | 4,22   | A-       |
| 146 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 4,2    | A-       |
| 147 | Kota Bontang                    | 4,2    | A-       |
| 148 | Kabupaten Tabanan               | 4,2    | A-       |
| 149 | Kota Bitung                     | 4,19   | A-       |
| 150 | Kota Prabumulih                 | 4,18   | A-       |
| 151 | Kabupaten Lebak                 | 4,18   | A-       |
| 152 | Kota Cilegon                    | 4,17   | A-       |
| 153 | Kabupaten Lampung Barat         | 4,17   | A-       |
| 154 | Kabupaten Jombang               | 4,17   | A-       |
| 155 | Kabupaten Lampung Tengah        | 4,16   | A-       |
| 156 | Kota Gorontalo                  | 4,16   | A-       |
| 157 | Kota Ternate                    | 4,16   | A-       |
| 158 | Kabupaten Gorontalo             | 4,14   | A-       |
| 159 | Kabupaten Kayong Utara          | 4,13   | A-       |
| 160 | Kabupaten Gowa                  | 4,13   | A-       |
| 161 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat  | 4,12   | A-       |
| 162 | Kabupaten Pemalang              | 4,12   | A-       |
| 163 | Kabupaten Gorontalo Utara       | 4,1    | A-       |
| 164 | Kabupaten Kediri                | 4,09   | A-       |
| 165 | Kota Kediri                     | 4,09   | A-       |
| 166 | Kabupaten Kubu Raya             | 4,09   | A-       |
| 167 | Kabupaten Jemberana             | 4,09   | A-       |
| 168 | Kabupaten Konawe Selatan        | 4,09   | A-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                       | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 169 | Kabupaten Karimun                       | 4,08   | A-       |
| 170 | Kabupaten Bondowoso                     | 4,08   | A-       |
| 171 | Kota Sukabumi                           | 4,05   | A-       |
| 172 | Kota Mataram                            | 4,05   | A-       |
| 173 | Kabupaten Tegal                         | 4,04   | A-       |
| 174 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 4,04   | A-       |
| 175 | Kabupaten Deli Serdang                  | 4,03   | A-       |
| 176 | Kota Baubau                             | 4,03   | A-       |
| 177 | Kabupaten Indragiri Hilir               | 4,02   | A-       |
| 178 | Kabupaten Musi Rawas                    | 4,02   | A-       |
| 179 | Kota Pasuruan                           | 4,02   | A-       |
| 180 | Kabupaten Murung Raya                   | 4,02   | A-       |
| 181 | Kabupaten Sinjai                        | 4,02   | A-       |
| 182 | Kota Makassar                           | 4,02   | A-       |
| 183 | Kabupaten Batanghari                    | 4,01   | A-       |
| 184 | Kabupaten Ogan Ilir                     | 4,01   | A-       |
| 185 | Kabupaten Halmahera Utara               | 4,01   | A-       |
| 186 | Kabupaten Bengkulu Selatan              | 4      | B        |
| 187 | Kabupaten Empat Lawang                  | 4      | B        |
| 188 | Kabupaten Blitar                        | 4      | B        |
| 189 | Kabupaten Sekadau                       | 4      | B        |
| 190 | Kota Tarakan                            | 4      | B        |
| 191 | Kabupaten Kudus                         | 4      | B        |
| 192 | Kabupaten Mamuju                        | 4      | B        |
| 193 | Kabupaten Bireuen                       | 3,99   | B        |
| 194 | Kabupaten Agam                          | 3,99   | B        |
| 195 | Kabupaten Tanah Bumbu                   | 3,99   | B        |
| 196 | Kabupaten Pohuwato                      | 3,99   | B        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA               | Indeks | Kategori |
|-----|---------------------------------|--------|----------|
| 197 | Kabupaten Muara Enim            | 3,98   | B        |
| 198 | Kabupaten Pacitan               | 3,98   | B        |
| 199 | Kabupaten Tapin                 | 3,98   | B        |
| 200 | Kabupaten Ogan Komering Ulu     | 3,97   | B        |
| 201 | Kabupaten Tanggamus             | 3,97   | B        |
| 202 | Kabupaten Pasuruan              | 3,97   | B        |
| 203 | Kota Bima                       | 3,97   | B        |
| 204 | Kabupaten Banjarnegara          | 3,97   | B        |
| 205 | Kabupaten Pasaman               | 3,96   | B        |
| 206 | Kabupaten Lampung Selatan       | 3,96   | B        |
| 207 | Kabupaten Kapuas                | 3,96   | B        |
| 208 | Kabupaten Dompu                 | 3,96   | B        |
| 209 | Kabupaten Tasikmalaya           | 3,95   | B        |
| 210 | Kabupaten Tulang Bawang Barat   | 3,95   | B        |
| 211 | Kabupaten Magelang              | 3,95   | B        |
| 212 | Kabupaten Lingga                | 3,94   | B        |
| 213 | Kabupaten Kepulauan Anambas     | 3,94   | B        |
| 214 | Kabupaten Demak                 | 3,94   | B        |
| 215 | Kabupaten Aceh Besar            | 3,93   | B        |
| 216 | Kabupaten Asahan                | 3,93   | B        |
| 217 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 3,93   | B        |
| 218 | Kabupaten Ketapang              | 3,93   | B        |
| 219 | Kabupaten Indragiri Hulu        | 3,92   | B        |
| 220 | Kabupaten Tangerang             | 3,92   | B        |
| 221 | Kota Medan                      | 3,91   | B        |
| 222 | Kabupaten Dharmasraya           | 3,91   | B        |
| 223 | Kabupaten Sragen                | 3,89   | B        |
| 224 | Kabupaten Solok Selatan         | 3,88   | B        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA            | Indeks | Kategori |
|-----|------------------------------|--------|----------|
| 225 | Kota Banjar                  | 3,88   | B        |
| 226 | Kabupaten Kampar             | 3,87   | B        |
| 227 | Kabupaten Majalengka         | 3,87   | B        |
| 228 | Kabupaten Aceh Barat         | 3,86   | B        |
| 229 | Kabupaten Bangka             | 3,85   | B        |
| 230 | Kabupaten Polewali Mandar    | 3,85   | B        |
| 231 | Kabupaten Karo               | 3,84   | B        |
| 232 | Kabupaten Way Kanan          | 3,84   | B        |
| 233 | Kabupaten Manokwari          | 3,84   | B        |
| 234 | Kabupaten Aceh Tengah        | 3,83   | B        |
| 235 | Kabupaten Solok              | 3,83   | B        |
| 236 | Kabupaten Sampang            | 3,82   | B        |
| 237 | Kabupaten Mempawah           | 3,82   | B        |
| 238 | Kabupaten Bolaang Mongondow  | 3,82   | B        |
| 239 | Kota Langsa                  | 3,81   | B        |
| 240 | Kabupaten Serdang Bedagai    | 3,81   | B        |
| 241 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 3,81   | B        |
| 242 | Kabupaten Wonosobo           | 3,81   | B        |
| 243 | Kota Pangkalpinang           | 3,8    | B        |
| 244 | Kabupaten Kepahiang          | 3,79   | B        |
| 245 | Kabupaten Banggai            | 3,78   | B        |
| 246 | Kabupaten Lebong             | 3,77   | B        |
| 247 | Kabupaten Pamekasan          | 3,77   | B        |
| 248 | Kabupaten Sambas             | 3,77   | B        |
| 249 | Kabupaten Seluma             | 3,76   | B        |
| 250 | Kabupaten Subang             | 3,75   | B        |
| 251 | Kabupaten Bangli             | 3,75   | B        |
| 252 | Kabupaten Pringsewu          | 3,73   | B        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA              | Indeks | Kategori |
|-----|--------------------------------|--------|----------|
| 253 | Kabupaten Kutai Barat          | 3,73   | B        |
| 254 | Kabupaten Kaur                 | 3,72   | B        |
| 255 | Kabupaten Bungo                | 3,72   | B        |
| 256 | Kota Cirebon                   | 3,72   | B        |
| 257 | Kabupaten Nunukan              | 3,72   | B        |
| 258 | Kabupaten Ciamis               | 3,68   | B        |
| 259 | Kabupaten Indramayu            | 3,67   | B        |
| 260 | Kabupaten Soppeng              | 3,67   | B        |
| 261 | Kabupaten Muaro Jambi          | 3,66   | B        |
| 262 | Kabupaten Jember               | 3,66   | B        |
| 263 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 3,66   | B        |
| 264 | Kabupaten Rokan Hulu           | 3,65   | B        |
| 265 | Kabupaten Nias Barat           | 3,64   | B        |
| 266 | Kabupaten Cirebon              | 3,64   | B        |
| 267 | Kabupaten Bulungan             | 3,64   | B        |
| 268 | Kabupaten Pasangkayu           | 3,64   | B        |
| 269 | Kabupaten Luwu Utara           | 3,64   | B        |
| 270 | Kota Sabang                    | 3,63   | B        |
| 271 | Kabupaten Rejang Lebong        | 3,63   | B        |
| 272 | Kabupaten Minahasa Utara       | 3,63   | B        |
| 273 | Kabupaten Bengkulu Utara       | 3,62   | B        |
| 274 | Kabupaten Boalemo              | 3,62   | B        |
| 275 | Kabupaten Lumajang             | 3,61   | B        |
| 276 | Kabupaten Pelalawan            | 3,6    | B        |
| 277 | Kabupaten Bone                 | 3,6    | B        |
| 278 | Kabupaten Biak Numfor          | 3,6    | B        |
| 279 | Kabupaten Kepulauan Sula       | 3,59   | B        |
| 280 | Kabupaten Manggarai Timur      | 3,58   | B        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                   | Indeks | Kategori |
|-----|-------------------------------------|--------|----------|
| 281 | Kota Kotamobagu                     | 3,58   | B        |
| 282 | Kabupaten Nganjuk                   | 3,57   | B        |
| 283 | Kabupaten Pidie Jaya                | 3,56   | B        |
| 284 | Kota Sungaipenuh                    | 3,56   | B        |
| 285 | Kabupaten Balangan                  | 3,56   | B        |
| 286 | Kabupaten Malinau                   | 3,55   | B        |
| 287 | Kabupaten Yapen*                    | 3,55   | B        |
| 288 | Kabupaten Langkat                   | 3,54   | B        |
| 289 | Kabupaten Lima Puluh Kota           | 3,54   | B        |
| 290 | Kota Sorong                         | 3,54   | B        |
| 291 | Kota Subulussalam                   | 3,53   | B        |
| 292 | Kota Lhokseumawe                    | 3,53   | B        |
| 293 | Kota Tidore                         | 3,53   | B        |
| 294 | Kota Jayapura                       | 3,53   | B        |
| 295 | Kabupaten Jayapura                  | 3,53   | B        |
| 296 | Kota Padangsidempuan                | 3,52   | B        |
| 297 | Kabupaten Wakatobi                  | 3,52   | B        |
| 298 | Kabupaten Bangkalan                 | 3,52   | B        |
| 299 | Kabupaten Bengkalis                 | 3,51   | B        |
| 300 | Kabupaten Musi Rawas Utara          | 3,51   | B        |
| 301 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 3,51   | B        |
| 302 | Kabupaten Majene                    | 3,51   | B        |
| 303 | Kabupaten Kolaka Utara              | 3,51   | B        |
| 304 | Kabupaten Dairi                     | 3,5    | B-       |
| 305 | Kabupaten Kuantan Singingi          | 3,5    | B-       |
| 306 | Kabuapten Mesuji                    | 3,5    | B-       |
| 307 | Kabupaten Bengkayang                | 3,5    | B-       |
| 308 | Kabupaten Minahasa Selatan          | 3,5    | B-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA              | Indeks | Kategori |
|-----|--------------------------------|--------|----------|
| 309 | Kabupaten Halmahera Timur      | 3,5    | B-       |
| 310 | Kabupaten Nabire               | 3,5    | B-       |
| 311 | Kabupaten Tapanuli Utara       | 3,49   | B-       |
| 312 | Kabupaten Mukomuko             | 3,49   | B-       |
| 313 | Kabupaten Berau                | 3,49   | B-       |
| 314 | Kabupaten Buton Selatan        | 3,49   | B-       |
| 315 | Kota Tual                      | 3,49   | B-       |
| 316 | Kabupaten Bener Meriah         | 3,48   | B-       |
| 317 | Kabupaten Pakpak Bharat        | 3,48   | B-       |
| 318 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 3,48   | B-       |
| 319 | Kabupaten Manggarai Barat      | 3,48   | B-       |
| 320 | Kabupaten Jeneponto            | 3,48   | B-       |
| 321 | Kabupaten Sijunjung            | 3,47   | B-       |
| 322 | Kabupaten Rokan Hilir          | 3,47   | B-       |
| 323 | Kabupaten Mojokerto            | 3,47   | B-       |
| 324 | Kabupaten Pulau Morotai        | 3,47   | B-       |
| 325 | Kabupaten Sorong               | 3,47   | B-       |
| 326 | Kabupaten Nias                 | 3,46   | B-       |
| 327 | Kabupaten Sumbawa Barat        | 3,46   | B-       |
| 328 | Kabupaten Mamuju Tengah        | 3,46   | B-       |
| 329 | Kabupaten Tebo                 | 3,45   | B-       |
| 330 | Kota Pematang Siantar          | 3,44   | B-       |
| 331 | Kabupaten Bangka Selatan       | 3,44   | B-       |
| 332 | Kabupaten Halmahera Selatan    | 3,44   | B-       |
| 333 | Kabupaten Simeulue             | 3,43   | B-       |
| 334 | Kabupaten Kepulauan Mentawai   | 3,43   | B-       |
| 335 | Kabupaten Pasaman Barat        | 3,43   | B-       |
| 336 | Kabupaten Pesisir Selatan      | 3,43   | B-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                    | Indeks | Kategori |
|-----|--------------------------------------|--------|----------|
| 337 | Kabupaten Situbondo                  | 3,43   | B-       |
| 338 | Kabupaten Landak                     | 3,43   | B-       |
| 339 | Kabupaten Bima                       | 3,43   | B-       |
| 340 | Kabupaten Aceh Tamiang               | 3,42   | B-       |
| 341 | Kabupaten Ogan Komering Ilir         | 3,42   | B-       |
| 342 | Kabupaten Pangandaran                | 3,41   | B-       |
| 343 | Kabupaten Pesisir Barat              | 3,41   | B-       |
| 344 | Kabupaten Ponorogo                   | 3,41   | B-       |
| 345 | Kota Tanjungbalai                    | 3,4    | B-       |
| 346 | Kabupaten Boven Digoel               | 3,4    | B-       |
| 347 | Kabupaten Kapuas Hulu                | 3,39   | B-       |
| 348 | Kota Gunungsitoli                    | 3,38   | B-       |
| 349 | Kabupaten Luwu Timur                 | 3,36   | B-       |
| 350 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 3,35   | B-       |
| 351 | Kabupaten Buton Tengah               | 3,35   | B-       |
| 352 | Kabupaten Lampung Timur              | 3,33   | B-       |
| 353 | Kota Palangkaraya                    | 3,32   | B-       |
| 354 | Kabupaten Lombok Utara               | 3,32   | B-       |
| 355 | Kabupaten Maluku Tengah              | 3,31   | B-       |
| 356 | Kabupaten Labuhan Batu               | 3,3    | B-       |
| 357 | Kabupaten Lamandau                   | 3,3    | B-       |
| 358 | Kota Sibolga                         | 3,28   | B-       |
| 359 | Kabupaten Kepulauan Sangihe          | 3,27   | B-       |
| 360 | Kabupaten Sumenep                    | 3,25   | B-       |
| 361 | Kabupaten Penajam Paser Utara        | 3,25   | B-       |
| 362 | Kabupaten Katingan                   | 3,25   | B-       |
| 363 | Kota Ambon                           | 3,25   | B-       |
| 364 | Kabupaten Bulukumba                  | 3,23   | B-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                   | Indeks | Kategori |
|-----|-------------------------------------|--------|----------|
| 365 | Kabupaten Fak-fak                   | 3,23   | B-       |
| 366 | Kabupaten Belitung Timur            | 3,22   | B-       |
| 367 | Kabupaten Enrekang                  | 3,22   | B-       |
| 368 | Kabupaten Tapanuli Selatan          | 3,21   | B-       |
| 369 | Kabupaten Raja Ampat                | 3,21   | B-       |
| 370 | Kabupaten Humbang Hasundutan        | 3,19   | B-       |
| 371 | Kabupaten Jayawijaya                | 3,19   | B-       |
| 372 | Kabupaten Teluk Wondama             | 3,19   | B-       |
| 373 | Kabupaten Toba Samosir              | 3,18   | B-       |
| 374 | Kabupaten Banggai Laut              | 3,17   | B-       |
| 375 | Kabupaten Asmat                     | 3,17   | B-       |
| 376 | Kota Dumai                          | 3,16   | B-       |
| 377 | Kabupaten Sarolangun                | 3,15   | B-       |
| 378 | Kabupaten Sukamara                  | 3,15   | B-       |
| 379 | Kabupaten Lombok Tengah             | 3,15   | B-       |
| 380 | Kabupaten Konawe Kepulauan          | 3,15   | B-       |
| 381 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 3,14   | B-       |
| 382 | Kabupaten Aceh Selatan              | 3,13   | B-       |
| 383 | Kabupaten Aceh Barat Daya           | 3,11   | B-       |
| 384 | Kabupaten Aceh Timur                | 3,11   | B-       |
| 385 | Kabupaten Padang Lawas              | 3,1    | B-       |
| 386 | Kabupaten Padang Lawas Utara        | 3,1    | B-       |
| 387 | Kabupaten Bengkulu Tengah           | 3,1    | B-       |
| 388 | Kabupaten Ngada                     | 3,1    | B-       |
| 389 | Kabupaten Timor Tengah Utara        | 3,1    | B-       |
| 390 | Kabupaten Buru                      | 3,1    | B-       |
| 391 | Kabupaten Bangka Barat              | 3,09   | B-       |
| 392 | Kabupaten Barito Utara              | 3,09   | B-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                 | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| 393 | Kabupaten Buton Utara             | 3,09   | B-       |
| 394 | Kabupaten Samosir                 | 3,08   | B-       |
| 395 | Kabupaten Manggarai               | 3,08   | B-       |
| 396 | Kabupaten Rembang                 | 3,08   | B-       |
| 397 | Kabupaten Aceh Singkil            | 3,07   | B-       |
| 398 | Kabupaten Lombok Barat            | 3,05   | B-       |
| 399 | Kabupaten Gayo Lues               | 3,04   | B-       |
| 400 | Kota Pagar Alam                   | 3,03   | B-       |
| 401 | Kabupaten Lahat                   | 3,03   | B-       |
| 402 | Kota Kupang                       | 3,02   | B-       |
| 403 | Kabupaten Flores Timur            | 3,02   | B-       |
| 404 | Kabupaten Toraja Utara            | 3,02   | B-       |
| 405 | Kabupaten Maluku Tenggara         | 3,02   | B-       |
| 406 | Kabupaten Nagan Raya              | 3,01   | B-       |
| 407 | Kabupaten Kepulauan Talaud        | 3,01   | B-       |
| 408 | Kabupaten Muna Barat              | 3      | C        |
| 409 | Kabupaten Belitung                | 2,99   | C        |
| 410 | Kota Serang                       | 2,99   | C        |
| 411 | Kabupaten Kutai Timur             | 2,98   | C        |
| 412 | Kabupaten Aceh Jaya               | 2,97   | C        |
| 413 | Kabupaten Buton                   | 2,96   | C        |
| 414 | Kabupaten Paser                   | 2,95   | C        |
| 415 | Kabupaten Minahasa Tenggara       | 2,95   | C        |
| 416 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 2,94   | C        |
| 417 | Kabupaten Kepulauan Meranti       | 2,93   | C        |
| 418 | Kabupaten Kolaka                  | 2,92   | C        |
| 419 | Kabupaten Buol                    | 2,9    | C        |
| 420 | Kabupaten Pidie                   | 2,87   | C        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA                 | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| 421 | Kabupaten Sumbawa                 | 2,87   | C        |
| 422 | Kabupaten Lombok Timur            | 2,86   | C        |
| 423 | Kabupaten Konawe                  | 2,86   | C        |
| 424 | Kabupaten Nias Utara              | 2,83   | C        |
| 425 | Kabupaten Morowali                | 2,81   | C        |
| 426 | Kabupaten Parigi Moutong          | 2,79   | C        |
| 427 | Kabupaten Kerinci                 | 2,78   | C        |
| 428 | Kab, Konawe Utara                 | 2,78   | C        |
| 429 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan     | 2,77   | C        |
| 430 | Kabupaten Batu Bara               | 2,76   | C        |
| 431 | Kabupaten Halmahera Barat         | 2,76   | C        |
| 432 | Kabupaten Merangin                | 2,74   | C        |
| 433 | Kabupaten Banggai Kepulauan       | 2,74   | C        |
| 434 | Kabupaten Sidenreng Rappang       | 2,74   | C        |
| 435 | Kabupaten Hulu Sungai Utara       | 2,73   | C        |
| 436 | Kabupaten Aceh Tenggara           | 2,71   | C        |
| 437 | Kabupaten Mappi                   | 2,71   | C        |
| 438 | Kabupaten Mandailing Natal        | 2,69   | C        |
| 439 | Kabupaten Barito Selatan          | 2,69   | C        |
| 440 | Kabupaten Morowali Utara          | 2,67   | C        |
| 441 | Kabupaten Wajo                    | 2,67   | C        |
| 442 | Kab, Seram Bagian Timur           | 2,67   | C        |
| 443 | Kabupaten Melawi                  | 2,66   | C        |
| 444 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 2,66   | C        |
| 445 | Kabupaten Tana Toraja             | 2,66   | C        |
| 446 | Kab, Seram Bagian Barat           | 2,66   | C        |
| 447 | Kabupaten Maluku Barat Daya       | 2,64   | C        |
| 448 | Kabupaten Tapanuli Tengah         | 2,63   | C        |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA              | Indeks | Kategori |
|-----|--------------------------------|--------|----------|
| 449 | Kabupaten Aceh Utara           | 2,62   | C        |
| 450 | Kabupaten Gunung Mas           | 2,62   | C        |
| 451 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 2,6    | C        |
| 452 | Kabupaten Sarmi                | 2,6    | C        |
| 453 | Kabupaten Simalungun           | 2,59   | C        |
| 454 | Kabupaten Teluk Bintuni        | 2,58   | C        |
| 455 | Kabupaten Poso                 | 2,57   | C        |
| 456 | Kabupaten Luwu                 | 2,57   | C        |
| 457 | Kabupaten Kepulauan Aru        | 2,57   | C        |
| 458 | Kabupaten Kaimana              | 2,56   | C        |
| 459 | Kabupaten Mamasa               | 2,55   | C        |
| 460 | Kabupaten Kolaka Timur         | 2,55   | C        |
| 461 | Kabupaten Takalar              | 2,54   | C        |
| 462 | Kabupaten Minahasa             | 2,53   | C        |
| 463 | Kabupaten Tojo Unauna          | 2,53   | C        |
| 464 | Kabupaten Kupang               | 2,52   | C        |
| 465 | Kabupaten Halmahera Tengah     | 2,52   | C        |
| 466 | Kabupaten Kepulauan Sitaro     | 2,44   | C-       |
| 467 | Kabupaten Pulau Taliabu        | 2,43   | C-       |
| 468 | Kabupaten Labuhanbatu Utara    | 2,41   | C-       |
| 469 | Kota Binjai                    | 2,39   | C-       |
| 470 | Kabupaten Nagekeo              | 2,34   | C-       |
| 471 | Kabupaten Mimika               | 2,33   | C-       |
| 472 | Kabupaten Supiori              | 2,3    | C-       |
| 473 | Kabupaten Muna                 | 2,29   | C-       |
| 474 | Kabupaten Donggala             | 2,28   | C-       |
| 475 | Kabupaten Sumba Barat Daya     | 2,26   | C-       |
| 476 | Kabupaten Tolitoli             | 2,23   | C-       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA            | Indeks | Kategori |
|-----|------------------------------|--------|----------|
| 477 | Kabupaten Barito Timur       | 2,2    | C-       |
| 478 | Kabupaten Manokwari Selatan  | 2,15   | C-       |
| 479 | Kabupaten Ende               | 2,14   | C-       |
| 480 | Kabupaten Sumba Timur        | 2,14   | C-       |
| 481 | Kabupaten Nias Selatan       | 2,11   | C-       |
| 482 | Kabupaten Mamberamo Raya     | 2,1    | C-       |
| 483 | Kabupaten Sumba Barat        | 2,09   | C-       |
| 484 | Kabupaten Tanimbar           | 2,07   | C-       |
| 485 | Kabupaten Tana Tidung        | 2,06   | C-       |
| 486 | Kabupaten Rote Ndao          | 2,06   | C-       |
| 487 | Kabupaten Sabu Raijua        | 2,05   | C-       |
| 488 | Kabupaten Buru Selatan       | 2,05   | C-       |
| 489 | Kabupaten Yahukimo           | 2,01   | C-       |
| 490 | Kabupaten Sigi               | 1,88   | D        |
| 491 | Kabupaten Tolikara           | 1,82   | D        |
| 492 | Kabupaten Sorong Selatan     | 1,76   | D        |
| 493 | Kabupaten Tambrauw           | 1,69   | D        |
| 494 | Kabupaten Mahakam Ulu        | 1,55   | D        |
| 495 | Kabupaten Malaka             | 1,51   | D        |
| 496 | Kabupaten Sumba Tengah       | 1,51   | D        |
| 497 | Kabupaten Sikka              | -      | NA       |
| 498 | Kabupaten Lembata            | -      | NA       |
| 499 | Kabupaten Alor               | -      | NA       |
| 500 | Kabupaten Paniai             | -      | NA       |
| 501 | Kabupaten Puncak Jaya        | -      | NA       |
| 502 | Kabupaten Keerom             | -      | NA       |
| 503 | Kabupaten Pegunungan Bintang | -      | NA       |
| 504 | Kabupaten Waropen            | -      | NA       |

| No  | DPM-PTSP KAB/KOTA          | Indeks | Kategori |
|-----|----------------------------|--------|----------|
| 505 | Kabupaten Mamberamo Tengah | -      | NA       |
| 506 | Kabupaten Yalimo           | -      | NA       |
| 507 | Kabupaten Lanny Jaya       | -      | NA       |
| 508 | Kabupaten Nduga            | -      | NA       |
| 509 | Kabupaten Puncak           | -      | NA       |
| 510 | Kabupaten Dogiyai          | -      | NA       |
| 511 | Kabupaten Intan Jaya       | -      | NA       |
| 512 | Kabupaten Deiyai           | -      | NA       |
| 513 | Kabupaten Maybrat          | -      | NA       |
| 514 | Kabupaten Pegunungan Arfak | -      | NA       |

F. DISDUKCAPIL KABUPATEN/KOTA

| No | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Kabupaten Badung                        | 4,76   | A        |
| 2  | Kabupaten Bantul                        | 4,75   | A        |
| 3  | Kabupaten Padang Pariaman               | 4,74   | A        |
| 4  | Kabupaten Banyumas                      | 4,72   | A        |
| 5  | Kota Administrasi Jakarta Selatan       | 4,68   | A        |
| 6  | Kota Denpasar                           | 4,68   | A        |
| 7  | Kabupaten Banyuwangi                    | 4,67   | A        |
| 8  | Kota Surakarta                          | 4,67   | A        |
| 9  | Kota Tebing Tinggi                      | 4,66   | A        |
| 10 | Kota Samarinda                          | 4,65   | A        |
| 11 | Kabupaten Sleman                        | 4,64   | A        |
| 12 | Kota Metro                              | 4,61   | A        |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang                 | 4,6    | A        |
| 14 | Kabupaten Madiun                        | 4,59   | A        |
| 15 | Kabupaten Sumedang                      | 4,59   | A        |

| No | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 16 | Kabupaten Grobogan                      | 4,58   | A        |
| 17 | Kota Bandar lampung                     | 4,58   | A        |
| 18 | Kabupaten Kulonprogo                    | 4,57   | A        |
| 19 | Kabupaten Karanganyar                   | 4,57   | A        |
| 20 | Kota Banda Aceh                         | 4,56   | A        |
| 21 | Kota Pekanbaru                          | 4,55   | A        |
| 22 | Kota Bandung                            | 4,55   | A        |
| 23 | Kota Surabaya                           | 4,54   | A        |
| 24 | Kota Banjarbaru                         | 4,54   | A        |
| 25 | Kabupaten Tapin                         | 4,54   | A        |
| 26 | Kabupaten Tanah Laut                    | 4,54   | A        |
| 27 | Kabupaten Jepara                        | 4,53   | A        |
| 28 | Kota Semarang                           | 4,53   | A        |
| 29 | Kabupaten Cilacap                       | 4,53   | A        |
| 30 | Kabupaten Gunung Kidul                  | 4,53   | A        |
| 31 | Kota Payakumbuh                         | 4,53   | A        |
| 32 | Kota Palembang                          | 4,52   | A        |
| 33 | Kabupaten Banyuasin                     | 4,52   | A        |
| 34 | Kota Banjarmasin                        | 4,52   | A        |
| 35 | Kabupaten Tabalong                      | 4,52   | A        |
| 36 | Kota Yogyakarta                         | 4,52   | A        |
| 37 | Kota Malang                             | 4,52   | A        |
| 38 | Kota Mojokerto                          | 4,51   | A        |
| 39 | Kabupaten Magetan                       | 4,51   | A        |
| 40 | Kota Magelang                           | 4,51   | A        |
| 41 | Kabupaten Bone Bolango                  | 4,51   | A        |
| 42 | Kota Medan                              | 4,5    | A-       |
| 43 | Kota Administrasi Jakarta Timur         | 4,5    | A-       |

| No | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 44 | Kabupaten Kapuas                        | 4,5    | A-       |
| 45 | Kota Solok                              | 4,49   | A-       |
| 46 | Kabupaten Tulungagung                   | 4,49   | A-       |
| 47 | Kabupaten Klungkung                     | 4,49   | A-       |
| 48 | Kabupaten Aceh Tengah                   | 4,47   | A-       |
| 49 | Kabupaten Sidoarjo                      | 4,47   | A-       |
| 50 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan           | 4,47   | A-       |
| 51 | Kabupaten Kendal                        | 4,47   | A-       |
| 52 | Kabupaten Tanah Datar                   | 4,46   | A-       |
| 53 | Kota Administrasi Jakarta Pusat         | 4,46   | A-       |
| 54 | Kabupaten Kutai Kartanegara             | 4,46   | A-       |
| 55 | Kota Administrasi Jakarta Barat         | 4,45   | A-       |
| 56 | Kabupaten Purbalingga                   | 4,45   | A-       |
| 57 | Kabupaten Pasuruan                      | 4,44   | A-       |
| 58 | Kabupaten Bangka Tengah                 | 4,43   | A-       |
| 59 | Kabupaten Bangka                        | 4,43   | A-       |
| 60 | Kota Jayapura                           | 4,43   | A-       |
| 61 | Kabupaten Solok                         | 4,41   | A-       |
| 62 | Kabupaten Sanggau                       | 4,41   | A-       |
| 63 | Kota Pare-Pare                          | 4,41   | A-       |
| 64 | Kota Tegal                              | 4,4    | A-       |
| 65 | Kota Depok                              | 4,39   | A-       |
| 66 | Kabupaten Kudus                         | 4,39   | A-       |
| 67 | Kabupaten Wonogiri                      | 4,39   | A-       |
| 68 | Kabupaten Sijunjung                     | 4,37   | A-       |
| 69 | Kota Tangerang Selatan                  | 4,37   | A-       |
| 70 | Kota Madiun                             | 4,37   | A-       |
| 71 | Kota Balikpapan                         | 4,36   | A-       |

| No | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 72 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah            | 4,36   | A-       |
| 73 | Kota Bekasi                             | 4,35   | A-       |
| 74 | Kabupaten Karangasem                    | 4,35   | A-       |
| 75 | Kabupaten Temanggung                    | 4,35   | A-       |
| 76 | Kabupaten Gorontalo                     | 4,35   | A-       |
| 77 | Kabupaten Boalemo                       | 4,35   | A-       |
| 78 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir    | 4,34   | A-       |
| 79 | Kabupaten Probolinggo                   | 4,34   | A-       |
| 80 | Kota Probolinggo                        | 4,34   | A-       |
| 81 | Kabupaten Tanah Bumbu                   | 4,34   | A-       |
| 82 | Kota Tangerang                          | 4,33   | A-       |
| 83 | Kabupaten Banjar                        | 4,33   | A-       |
| 84 | Kabupaten Semarang                      | 4,33   | A-       |
| 85 | Kabupaten Tangerang                     | 4,32   | A-       |
| 86 | Kabupaten Tasikmalaya                   | 4,32   | A-       |
| 87 | Kota Blitar                             | 4,32   | A-       |
| 88 | Kabupaten Kotawaringin Barat            | 4,32   | A-       |
| 89 | Kota Padang Panjang                     | 4,31   | A-       |
| 90 | Kota Batu                               | 4,31   | A-       |
| 91 | Kabupaten Buleleng                      | 4,31   | A-       |
| 92 | Kabupaten Klaten                        | 4,31   | A-       |
| 93 | Kabupaten Ogan Komering Ilir            | 4,3    | A-       |
| 94 | Kota Bogor                              | 4,3    | A-       |
| 95 | Kabupaten Tanggamus                     | 4,3    | A-       |
| 96 | Kota Administrasi Jakarta Utara         | 4,3    | A-       |
| 97 | Kota Salatiga                           | 4,3    | A-       |
| 98 | Kota Pariaman                           | 4,29   | A-       |
| 99 | Kabupaten Pasaman                       | 4,29   | A-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 100 | Kota Palu                               | 4,29   | A-       |
| 101 | Kota Cilegon                            | 4,28   | A-       |
| 102 | Kabupaten Tuban                         | 4,28   | A-       |
| 103 | Kabupaten Sukoharjo                     | 4,28   | A-       |
| 104 | Kabupaten Garut                         | 4,27   | A-       |
| 105 | Kota Pasuruan                           | 4,26   | A-       |
| 106 | Kabupaten Kolaka Utara                  | 4,26   | A-       |
| 107 | Kabupaten Pulau Morotai                 | 4,26   | A-       |
| 108 | Kabupaten Musi Banyuasin                | 4,25   | A-       |
| 109 | Kota Sukabumi                           | 4,24   | A-       |
| 110 | Kabupaten Seruyan                       | 4,24   | A-       |
| 111 | Kabupaten Muara Enim                    | 4,23   | A-       |
| 112 | Kabupaten Pekalongan                    | 4,23   | A-       |
| 113 | Kabupaten Gianyar                       | 4,22   | A-       |
| 114 | Kabupaten Lampung Selatan               | 4,2    | A-       |
| 115 | Kota Tanjungpinang                      | 4,19   | A-       |
| 116 | Kabupaten Majalengka                    | 4,19   | A-       |
| 117 | Kabupaten Purworejo                     | 4,19   | A-       |
| 118 | Kabupaten Kebumen                       | 4,19   | A-       |
| 119 | Kabupaten Kediri                        | 4,18   | A-       |
| 120 | Kabupaten Kubu Raya                     | 4,18   | A-       |
| 121 | Kota Pontianak                          | 4,16   | A-       |
| 122 | Kota Pangkalpinang                      | 4,15   | A-       |
| 123 | Kabupaten Bojonegoro                    | 4,15   | A-       |
| 124 | Kabupaten Banjarnegara                  | 4,15   | A-       |
| 125 | Kabupaten Pinrang                       | 4,15   | A-       |
| 126 | Kabupaten Belitung                      | 4,14   | A-       |
| 127 | Kabupaten Pati                          | 4,14   | A-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 128 | Kota Lubuklinggau                       | 4,13   | A-       |
| 129 | Kabupaten Bogor                         | 4,11   | A-       |
| 130 | Kabupaten Malang                        | 4,11   | A-       |
| 131 | Kota Cimahi                             | 4,1    | A-       |
| 132 | Kabupaten Langkat                       | 4,1    | A-       |
| 133 | Kabupaten Sukabumi                      | 4,1    | A-       |
| 134 | Kabupaten Jember                        | 4,09   | A-       |
| 135 | Kota Bontang                            | 4,09   | A-       |
| 136 | Kota Banjar                             | 4,08   | A-       |
| 137 | Kabupaten Lampung Utara                 | 4,06   | A-       |
| 138 | Kabupaten Hulu Sungai Utara             | 4,06   | A-       |
| 139 | Kota Makassar                           | 4,05   | A-       |
| 140 | Kabupaten Lombok Timur                  | 4,04   | A-       |
| 141 | Kota Ternate                            | 4,04   | A-       |
| 142 | Kabupaten Deli Serdang                  | 4,03   | A-       |
| 143 | Kota Bukittinggi                        | 4,03   | A-       |
| 144 | Kabupaten Bandung Barat                 | 4,03   | A-       |
| 145 | Kabupaten Subang                        | 4,03   | A-       |
| 146 | Kabupaten Ketapang                      | 4,03   | A-       |
| 147 | Kabupaten Lombok Barat                  | 4,03   | A-       |
| 148 | Kabupaten Halmahera Utara               | 4,03   | A-       |
| 149 | Kabupaten Demak                         | 4,02   | A-       |
| 150 | Kabupaten Bintan                        | 4,01   | A-       |
| 151 | Kota Prabumulih                         | 4,01   | A-       |
| 152 | Kabupaten Ogan Ilir                     | 4,01   | A-       |
| 153 | Kabupaten Musi Rawas                    | 4,01   | A-       |
| 154 | Kota Mataram                            | 4,01   | A-       |
| 155 | Kabupaten Belu                          | 4,01   | A-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 156 | Kabupaten Aceh Barat                    | 4      | B        |
| 157 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur       | 4      | B        |
| 158 | Kabupaten Karawang                      | 4      | B        |
| 159 | Kabupaten Lumajang                      | 4      | B        |
| 160 | Kabupaten Banggai                       | 4      | B        |
| 161 | Kabupaten Maros                         | 4      | B        |
| 162 | Kabupaten Soppeng                       | 4      | B        |
| 163 | Kabupaten Kepulauan Sula                | 4      | B        |
| 164 | Kabupaten Agam                          | 3,99   | B        |
| 165 | Kota Serang                             | 3,99   | B        |
| 166 | Kabupaten Natuna                        | 3,98   | B        |
| 167 | Kabupaten Bandung                       | 3,98   | B        |
| 168 | Kabupaten Kotabaru                      | 3,98   | B        |
| 169 | Kabupaten Blora                         | 3,98   | B        |
| 170 | Kabupaten Bengkulu                      | 3,97   | B        |
| 171 | Kabupaten Lampung Barat                 | 3,97   | B        |
| 172 | Kabupaten Tulang Bawang Barat           | 3,97   | B        |
| 173 | Kabupaten Barito Kuala                  | 3,97   | B        |
| 174 | Kabupaten Magelang                      | 3,97   | B        |
| 175 | Kabupaten Dharmasraya                   | 3,95   | B        |
| 176 | Kota Pekalongan                         | 3,95   | B        |
| 177 | Kabupaten Tegal                         | 3,95   | B        |
| 178 | Kabupaten Serang                        | 3,94   | B        |
| 179 | Kabupaten Way Kanan                     | 3,94   | B        |
| 180 | Kabupaten Berau                         | 3,94   | B        |
| 181 | Kabupaten Batang                        | 3,94   | B        |
| 182 | Kota Palopo                             | 3,94   | B        |
| 183 | Kabupaten Bulukumba                     | 3,93   | B        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 184 | Kota Padang                             | 3,92   | B        |
| 185 | Kabupaten Pidie Jaya                    | 3,91   | B        |
| 186 | Kabupaten Pasaman Barat                 | 3,91   | B        |
| 187 | Kabupaten Seluma                        | 3,91   | B        |
| 188 | Kabupaten Tabanan                       | 3,91   | B        |
| 189 | Kabupaten Lingga                        | 3,9    | B        |
| 190 | Kota Singkawang                         | 3,9    | B        |
| 191 | Kabupaten Sumbawa Barat                 | 3,9    | B        |
| 192 | Kota Sawahlunto                         | 3,89   | B        |
| 193 | Kabupaten Bangka Selatan                | 3,89   | B        |
| 194 | Kabupaten Lamongan                      | 3,89   | B        |
| 195 | Kota Bima                               | 3,89   | B        |
| 196 | Kabupaten Pemalang                      | 3,89   | B        |
| 197 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 3,88   | B        |
| 198 | Kabupaten Brebes                        | 3,88   | B        |
| 199 | Kota Jambi                              | 3,87   | B        |
| 200 | Kabupaten Gowa                          | 3,87   | B        |
| 201 | Kabupaten Bombana                       | 3,87   | B        |
| 202 | Kota Tomohon                            | 3,86   | B        |
| 203 | Kabupaten Bengkulu Selatan              | 3,85   | B        |
| 204 | Kabupaten Ponorogo                      | 3,85   | B        |
| 205 | Kota Tasikmalaya                        | 3,83   | B        |
| 206 | Kabupaten Lampung Timur                 | 3,83   | B        |
| 207 | Kabupaten Sinjai                        | 3,83   | B        |
| 208 | Kabupaten Sampang                       | 3,81   | B        |
| 209 | Kabupaten Mempawah                      | 3,81   | B        |
| 210 | Kabupaten Empat Lawang                  | 3,8    | B        |
| 211 | Kabupaten Gresik                        | 3,8    | B        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 212 | Kabupaten Boyolali                      | 3,8    | B        |
| 213 | Kota Kotamobagu                         | 3,8    | B        |
| 214 | Kabupaten Dairi                         | 3,79   | B        |
| 215 | Kota Manado                             | 3,79   | B        |
| 216 | Kabupaten Jombang                       | 3,78   | B        |
| 217 | Kabupaten Sumenep                       | 3,78   | B        |
| 218 | Kota Gorontalo                          | 3,78   | B        |
| 219 | Kota Bengkulu                           | 3,77   | B        |
| 220 | Kabupaten Merangin                      | 3,77   | B        |
| 221 | Kabupaten Bolaang Mongondow             | 3,77   | B        |
| 222 | Kabupaten Kaur                          | 3,75   | B        |
| 223 | Kabupaten Bekasi                        | 3,75   | B        |
| 224 | Kota Bitung                             | 3,73   | B        |
| 225 | Kabupaten Kepulauan Sangihe             | 3,73   | B        |
| 226 | Kabupaten Serdang Bedagai               | 3,72   | B        |
| 227 | Kabupaten Karimun                       | 3,72   | B        |
| 228 | Kabupaten Pandeglang                    | 3,71   | B        |
| 229 | Kabupaten Cirebon                       | 3,71   | B        |
| 230 | Kota Langsa                             | 3,69   | B        |
| 231 | Kabupaten Bener Meriah                  | 3,69   | B        |
| 232 | Kota Tanjungbalai                       | 3,69   | B        |
| 233 | Kabupaten Ogan Komering Ulu             | 3,68   | B        |
| 234 | Kabupaten Tojo Unauna                   | 3,68   | B        |
| 235 | Kota Kendari                            | 3,68   | B        |
| 236 | Kabuapten Mesuji                        | 3,67   | B        |
| 237 | Kabupaten Kayong Utara                  | 3,67   | B        |
| 238 | Kabupaten Lebong                        | 3,66   | B        |
| 239 | Kabupaten Musi Rawas Utara              | 3,66   | B        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 240 | Kabupaten Sragen                        | 3,66   | B        |
| 241 | Kota Sabang                             | 3,65   | B        |
| 242 | Kabupaten Indramayu                     | 3,65   | B        |
| 243 | Kabupaten Sintang                       | 3,65   | B        |
| 244 | Kabupaten Halmahera Selatan             | 3,65   | B        |
| 245 | Kabupaten Lampung Tengah                | 3,64   | B        |
| 246 | Kabupaten Takalar                       | 3,64   | B        |
| 247 | Kabupaten Kolaka Timur                  | 3,64   | B        |
| 248 | Kabupaten Bireuen                       | 3,63   | B        |
| 249 | Kabupaten Lebak                         | 3,63   | B        |
| 250 | Kabupaten Situbondo                     | 3,63   | B        |
| 251 | Kabupaten Landak                        | 3,63   | B        |
| 252 | Kabupaten Cianjur                       | 3,62   | B        |
| 253 | Kabupaten Lamandau                      | 3,62   | B        |
| 254 | Kota Batam                              | 3,61   | B        |
| 255 | Kabupaten Rejang Lebong                 | 3,61   | B        |
| 256 | Kabupaten Purwakarta                    | 3,61   | B        |
| 257 | Kabupaten Kapuas Hulu                   | 3,6    | B        |
| 258 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan     | 3,59   | B        |
| 259 | Kabupaten Sorong                        | 3,59   | B        |
| 260 | Kabupaten Kepulauan Anambas             | 3,58   | B        |
| 261 | Kabupaten Pacitan                       | 3,56   | B        |
| 262 | Kabupaten Gorontalo Utara               | 3,56   | B        |
| 263 | Kabupaten Morowali Utara                | 3,56   | B        |
| 264 | Kabupaten Luwu Utara                    | 3,56   | B        |
| 265 | Kota Tarakan                            | 3,55   | B        |
| 266 | Kabupaten Manggarai Barat               | 3,55   | B        |
| 267 | Kabupaten Wonosobo                      | 3,55   | B        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 268 | Kota Tidore                             | 3,55   | B        |
| 269 | Kabupaten Sumba Timur                   | 3,54   | B        |
| 270 | Kabupaten Asahan                        | 3,53   | B        |
| 271 | Kabupaten Kepahiang                     | 3,53   | B        |
| 272 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan          | 3,53   | B        |
| 273 | Kabupaten Aceh Jaya                     | 3,52   | B        |
| 274 | Kabupaten Aceh Tamiang                  | 3,52   | B        |
| 275 | Kabupaten Aceh Singkil                  | 3,52   | B        |
| 276 | Kabupaten Ende                          | 3,52   | B        |
| 277 | Kabupaten Bantaeng                      | 3,52   | B        |
| 278 | Kota Subulussalam                       | 3,51   | B        |
| 279 | Kabupaten Aceh Besar                    | 3,51   | B        |
| 280 | Kabupaten Majene                        | 3,51   | B        |
| 281 | Kabupaten Siak                          | 3,5    | B-       |
| 282 | Kabupaten Belitung Timur                | 3,5    | B-       |
| 283 | Kabupaten Lombok Utara                  | 3,5    | B-       |
| 284 | Kabupaten Tapanuli Utara                | 3,49   | B-       |
| 285 | Kabupaten Kepulauan Mentawai            | 3,49   | B-       |
| 286 | Kabupaten Mukomuko                      | 3,49   | B-       |
| 287 | Kota Sungaipenuh                        | 3,49   | B-       |
| 288 | Kabupaten Pringsewu                     | 3,49   | B-       |
| 289 | Kabupaten Katingan                      | 3,49   | B-       |
| 290 | Kabupaten Dompu                         | 3,49   | B-       |
| 291 | Kabupaten Mamuju Tengah                 | 3,49   | B-       |
| 292 | Kabupaten Toraja Utara                  | 3,49   | B-       |
| 293 | Kabupaten Halmahera Tengah              | 3,49   | B-       |
| 294 | Kabupaten Solok Selatan                 | 3,48   | B-       |
| 295 | Kabupaten Kuningan                      | 3,47   | B-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 296 | Kabupaten Balangan                      | 3,47   | B-       |
| 297 | Kabupaten Rembang                       | 3,46   | B-       |
| 298 | Kabupaten Mamuju                        | 3,46   | B-       |
| 299 | Kabupaten Buru                          | 3,46   | B-       |
| 300 | Kabupaten Nias                          | 3,45   | B-       |
| 301 | Kabupaten Pakpak Bharat                 | 3,45   | B-       |
| 302 | Kabupaten Bengkulu Utara                | 3,45   | B-       |
| 303 | Kabupaten Trenggalek                    | 3,45   | B-       |
| 304 | Kabupaten Pamekasan                     | 3,45   | B-       |
| 305 | Kabupaten Sidenreng Rappang             | 3,45   | B-       |
| 306 | Kota Baubau                             | 3,45   | B-       |
| 307 | Kabupaten Bengkulu Tengah               | 3,44   | B-       |
| 308 | Kabupaten Tebo                          | 3,44   | B-       |
| 309 | Kabupaten Sukamara                      | 3,44   | B-       |
| 310 | Kabupaten Bima                          | 3,44   | B-       |
| 311 | Kabupaten Barru                         | 3,44   | B-       |
| 312 | Kabupaten Pangandaran                   | 3,43   | B-       |
| 313 | Kota Tual                               | 3,43   | B-       |
| 314 | Kabupaten Fak-fak                       | 3,43   | B-       |
| 315 | Kabupaten Pesisir Selatan               | 3,42   | B-       |
| 316 | Kabupaten Sarolangun                    | 3,42   | B-       |
| 317 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat          | 3,42   | B-       |
| 318 | Kabupaten Barito Utara                  | 3,42   | B-       |
| 319 | Kabupaten Bangli                        | 3,42   | B-       |
| 320 | Kabupaten Pulang Pisau                  | 3,41   | B-       |
| 321 | Kabupaten Sumbawa                       | 3,41   | B-       |
| 322 | Kabupaten Bondowoso                     | 3,4    | B-       |
| 323 | Kabupaten Kutai Barat                   | 3,4    | B-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 324 | Kabupaten Bone                          | 3,38   | B-       |
| 325 | Kabupaten Pasangkayu                    | 3,37   | B-       |
| 326 | Kabupaten Kotawaringin Timur            | 3,35   | B-       |
| 327 | Kabupaten Pohuwato                      | 3,35   | B-       |
| 328 | Kabupaten Paser                         | 3,34   | B-       |
| 329 | Kabupaten Merauke                       | 3,34   | B-       |
| 330 | Kabupaten Penajam Paser Utara           | 3,33   | B-       |
| 331 | Kabupaten Polewali Mandar               | 3,33   | B-       |
| 332 | Kabupaten Manokwari                     | 3,32   | B-       |
| 333 | Kota Padangsidempuan                    | 3,3    | B-       |
| 334 | Kabupaten Lahat                         | 3,3    | B-       |
| 335 | Kabupaten Kaimana                       | 3,29   | B-       |
| 336 | Kabupaten Batanghari                    | 3,28   | B-       |
| 337 | Kota Kediri                             | 3,28   | B-       |
| 338 | Kabupaten Sambas                        | 3,28   | B-       |
| 339 | Kabupaten Lombok Tengah                 | 3,27   | B-       |
| 340 | Kabupaten Kepulauan Meranti             | 3,26   | B-       |
| 341 | Kabupaten Minahasa Utara                | 3,26   | B-       |
| 342 | Kabupaten Maluku Tenggara               | 3,26   | B-       |
| 343 | Kabupaten Jembrana                      | 3,25   | B-       |
| 344 | Kabupaten Manggarai Timur               | 3,25   | B-       |
| 345 | Kabupaten Lima Puluh Kota               | 3,24   | B-       |
| 346 | Kabupaten Wakatobi                      | 3,24   | B-       |
| 347 | Kabupaten Aceh Barat Daya               | 3,23   | B-       |
| 348 | Kabupaten Blitar                        | 3,23   | B-       |
| 349 | Kabupaten Toba Samosir                  | 3,22   | B-       |
| 350 | Kabupaten Mappi                         | 3,22   | B-       |
| 351 | Kabupaten Kampar                        | 3,21   | B-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 352 | Kabupaten Muaro Jambi                   | 3,21   | B-       |
| 353 | Kabupaten Minahasa                      | 3,19   | B-       |
| 354 | Kabupaten Konawe Selatan                | 3,19   | B-       |
| 355 | Kabupaten Tana Tidung                   | 3,18   | B-       |
| 356 | Kota Pematang Siantar                   | 3,17   | B-       |
| 357 | Kabupaten Morowali                      | 3,16   | B-       |
| 358 | Kabupaten Mojokerto                     | 3,15   | B-       |
| 359 | Kabupaten Raja Ampat                    | 3,15   | B-       |
| 360 | Kabupaten Mamasa                        | 3,14   | B-       |
| 361 | Kabupaten Luwu Timur                    | 3,14   | B-       |
| 362 | Kabupaten Teluk Bintuni                 | 3,14   | B-       |
| 363 | Kota Lhokseumawe                        | 3,13   | B-       |
| 364 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur          | 3,13   | B-       |
| 365 | Kota Cirebon                            | 3,13   | B-       |
| 366 | Kabupaten Ngawi                         | 3,13   | B-       |
| 367 | Kabupaten Bangkalan                     | 3,13   | B-       |
| 368 | Kabupaten Nunukan                       | 3,13   | B-       |
| 369 | Kota Palangkaraya                       | 3,12   | B-       |
| 370 | Kota Ambon                              | 3,12   | B-       |
| 371 | Kabupaten Aceh Utara                    | 3,11   | B-       |
| 372 | Kabupaten Sekadau                       | 3,11   | B-       |
| 373 | Kabupaten Buton                         | 3,11   | B-       |
| 374 | Kabupaten Labuhan Batu                  | 3,1    | B-       |
| 375 | Kabupaten Padang Lawas Utara            | 3,1    | B-       |
| 376 | Kabupaten Bungo                         | 3,1    | B-       |
| 377 | Kabupaten Poso                          | 3,1    | B-       |
| 378 | Kabupaten Yapen*                        | 3,1    | B-       |
| 379 | Kota Sorong                             | 3,1    | B-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 380 | Kota Pagar Alam                         | 3,09   | B-       |
| 381 | Kabupaten Halmahera Timur               | 3,09   | B-       |
| 382 | Kabupaten Bangka Barat                  | 3,07   | B-       |
| 383 | Kabupaten Kolaka                        | 3,07   | B-       |
| 384 | Kabupaten Karo                          | 3,06   | B-       |
| 385 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan           | 3,06   | B-       |
| 386 | Kabupaten Nganjuk                       | 3,06   | B-       |
| 387 | Kabupaten Pesawaran                     | 3,05   | B-       |
| 388 | Kabupaten Wajo                          | 3,05   | B-       |
| 389 | Kab, Konawe Utara                       | 3,05   | B-       |
| 390 | Kabupaten Simeulue                      | 3,04   | B-       |
| 391 | Kabupaten Padang Lawas                  | 3,03   | B-       |
| 392 | Kabupaten Aceh Selatan                  | 3,02   | B-       |
| 393 | Kabupaten Indragiri Hulu                | 3,01   | B-       |
| 394 | Kabupaten Timor Tengah Utara            | 3,01   | B-       |
| 395 | Kabupaten Biak Numfor                   | 3,01   | B-       |
| 396 | Kabupaten Kerinci                       | 3      | C        |
| 397 | Kabupaten Murung Raya                   | 2,99   | C        |
| 398 | Kabupaten Malinau                       | 2,99   | C        |
| 399 | Kabupaten Kepulauan Sitaro              | 2,98   | C        |
| 400 | Kabupaten Labuhanbatu Utara             | 2,97   | C        |
| 401 | Kabupaten Konawe                        | 2,97   | C        |
| 402 | Kabupaten Konawe Kepulauan              | 2,97   | C        |
| 403 | Kabupaten Aceh Tenggara                 | 2,96   | C        |
| 404 | Kabupaten Humbang Hasundutan            | 2,96   | C        |
| 405 | Kabupaten Ciamis                        | 2,95   | C        |
| 406 | Kabupaten Halmahera Barat               | 2,94   | C        |
| 407 | Kabupaten Kuantan Singingi              | 2,93   | C        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 408 | Kabupaten Bengkayang                    | 2,91   | C        |
| 409 | Kabupaten Minahasa Selatan              | 2,91   | C        |
| 410 | Kabupaten Minahasa Tenggara             | 2,89   | C        |
| 411 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara       | 2,88   | C        |
| 412 | Kota Binjai                             | 2,87   | C        |
| 413 | Kabupaten Rokan Hulu                    | 2,85   | C        |
| 414 | Kabupaten Barito Timur                  | 2,84   | C        |
| 415 | Kabupaten Paniai                        | 2,83   | C        |
| 416 | Kab, Seram Bagian Barat                 | 2,82   | C        |
| 417 | Kabupaten Tanimbar                      | 2,81   | C        |
| 418 | Kabupaten Gunung Mas                    | 2,79   | C        |
| 419 | Kabupaten Pulau Taliabu                 | 2,79   | C        |
| 420 | Kabupaten Tapanuli Selatan              | 2,78   | C        |
| 421 | Kabupaten Gayo Lues                     | 2,75   | C        |
| 422 | Kabupaten Bulungan                      | 2,75   | C        |
| 423 | Kabupaten Banggai Laut                  | 2,74   | C        |
| 424 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur       | 2,71   | C        |
| 425 | Kabupaten Samosir                       | 2,7    | C        |
| 426 | Kabupaten Batu Bara                     | 2,7    | C        |
| 427 | Kab, Seram Bagian Timur                 | 2,69   | C        |
| 428 | Kabupaten Alor                          | 2,68   | C        |
| 429 | Kabupaten Buol                          | 2,68   | C        |
| 430 | Kota Dumai                              | 2,67   | C        |
| 431 | Kabupaten Maluku Barat Daya             | 2,67   | C        |
| 432 | Kabupaten Pidie                         | 2,66   | C        |
| 433 | Kabupaten Simalungun                    | 2,66   | C        |
| 434 | Kota Kupang                             | 2,66   | C        |
| 435 | Kabupaten Indragiri Hilir               | 2,64   | C        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 436 | Kabupaten Nagekeo                       | 2,62   | C        |
| 437 | Kabupaten Pelalawan                     | 2,6    | C        |
| 438 | Kabupaten Jenepono                      | 2,6    | C        |
| 439 | Kabupaten Aceh Timur                    | 2,57   | C        |
| 440 | Kota Sibolga                            | 2,55   | C        |
| 441 | Kabupaten Manggarai                     | 2,55   | C        |
| 442 | Kabupaten Rote Ndao                     | 2,54   | C        |
| 443 | Kabupaten Kepulauan Selayar             | 2,54   | C        |
| 444 | Kabupaten Buton Selatan                 | 2,54   | C        |
| 445 | Kabupaten Jayapura                      | 2,54   | C        |
| 446 | Kabupaten Flores Timur                  | 2,53   | C        |
| 447 | Kabupaten Maluku Tengah                 | 2,53   | C        |
| 448 | Kabupaten Mandailing Natal              | 2,52   | C        |
| 449 | Kabupaten Pesisir Barat                 | 2,52   | C        |
| 450 | Kabupaten Kupang                        | 2,52   | C        |
| 451 | Kabupaten Sabu Raijua                   | 2,52   | C        |
| 452 | Kabupaten Tapanuli Tengah               | 2,51   | C        |
| 453 | Kabupaten Rokan Hilir                   | 2,51   | C        |
| 454 | Kabupaten Mimika                        | 2,51   | C        |
| 455 | Kabupaten Tolitoli                      | 2,5    | C-       |
| 456 | Kabupaten Banggai Kepulauan             | 2,49   | C-       |
| 457 | Kabupaten Asmat                         | 2,49   | C-       |
| 458 | Kabupaten Buru Selatan                  | 2,47   | C-       |
| 459 | Kabupaten Supiori                       | 2,4    | C-       |
| 460 | Kabupaten Sarmi                         | 2,38   | C-       |
| 461 | Kota Gunungsitoli                       | 2,37   | C-       |
| 462 | Kabupaten Tambrau                       | 2,35   | C-       |
| 463 | Kabupaten Nias Utara                    | 2,34   | C-       |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 464 | Kabupaten Sorong Selatan                | 2,31   | C-       |
| 465 | Kabupaten Tana Toraja                   | 2,3    | C-       |
| 466 | Kabupaten Nabire                        | 2,3    | C-       |
| 467 | Kabupaten Mamberamo Raya                | 2,3    | C-       |
| 468 | Kabupaten Buton Utara                   | 2,27   | C-       |
| 469 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan     | 2,25   | C-       |
| 470 | Kabupaten Muna Barat                    | 2,25   | C-       |
| 471 | Kabupaten Parigi Moutong                | 2,21   | C-       |
| 472 | Kabupaten Nias Selatan                  | 2,16   | C-       |
| 473 | Kabupaten Kepulauan Talaud              | 2,16   | C-       |
| 474 | Kabupaten Buton Tengah                  | 2,15   | C-       |
| 475 | Kabupaten Teluk Wondama                 | 2,15   | C-       |
| 476 | Kabupaten Melawi                        | 2,14   | C-       |
| 477 | Kabupaten Sigi                          | 2,1    | C-       |
| 478 | Kabupaten Enrekang                      | 2,06   | C-       |
| 479 | Kabupaten Muna                          | 2,06   | C-       |
| 480 | Kabupaten Jayawijaya                    | 2,04   | C-       |
| 481 | Kabupaten Manokwari Selatan             | 2,04   | C-       |
| 482 | Kabupaten Nagan Raya                    | 2,03   | C-       |
| 483 | Kabupaten Barito Selatan                | 2,03   | C-       |
| 484 | Kabupaten Sumba Barat Daya              | 2,03   | C-       |
| 485 | Kabupaten Kepulauan Aru                 | 2,03   | C-       |
| 486 | Kabupaten Donggala                      | 2,01   | C-       |
| 487 | Kabupaten Waropen                       | 2,01   | C-       |
| 488 | Kabupaten Nias Barat                    | 1,99   | D        |
| 489 | Kabupaten Yahukimo                      | 1,98   | D        |
| 490 | Kabupaten Kutai Timur                   | 1,97   | D        |
| 491 | Kabupaten Puncak                        | 1,94   | D        |

| No  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Kategori |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|
| 492 | Kabupaten Intan Jaya                    | 1,94   | D        |
| 493 | Kabupaten Sumba Barat                   | 1,9    | D        |
| 494 | Kabupaten Pegunungan Bintang            | 1,86   | D        |
| 495 | Kabupaten Dogiyai                       | 1,81   | D        |
| 496 | Kabupaten Timor Tengah Selatan          | 1,78   | D        |
| 497 | Kabupaten Yalimo                        | 1,75   | D        |
| 498 | Kabupaten Luwu                          | 1,73   | D        |
| 499 | Kabupaten Sumba Tengah                  | 1,7    | D        |
| 500 | Kabupaten Tolikara                      | 1,68   | D        |
| 501 | Kabupaten Mahakam Ulu                   | 1,59   | D        |
| 502 | Kabupaten Ngada                         | 1,53   | D        |
| 503 | Kabupaten Malaka                        | 1,51   | D        |
| 504 | Kabupaten Sikka                         | -      | NA       |
| 505 | Kabupaten Lembata                       | -      | NA       |
| 506 | Kabupaten Puncak Jaya                   | -      | NA       |
| 507 | Kabupaten Boven Digoel                  | -      | NA       |
| 508 | Kabupaten Keerom                        | -      | NA       |
| 509 | Kabupaten Mamberamo Tengah              | -      | NA       |
| 510 | Kabupaten Lanny Jaya                    | -      | NA       |
| 511 | Kabupaten Nduga                         | -      | NA       |
| 512 | Kabupaten Deiyai                        | -      | NA       |
| 513 | Kabupaten Maybrat                       | -      | NA       |
| 514 | Kabupaten Pegunungan Arfak              | -      | NA       |

## Hasil Evaluasi Kelembagaan

| No | NAMA K/L/PEMDA                                                                      | KOMPOSIT |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <b>KEMENTERIAN</b>                                                                  |          |
| 1  | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                          | 72,58    |
| 2  | Kementerian Dalam Negeri                                                            | 72,83    |
| 3  | Kementerian Hukum dan HAM                                                           | 83,93    |
| 4  | Kementerian Pertahanan                                                              | 78,06    |
| 5  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                   | 82,64    |
| 6  | Kementerian Perdagangan                                                             | 77,89    |
| 7  | Kementerian Pertanian                                                               | 79,75    |
| 8  | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)                  | 80,99    |
| 9  | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                                       | 78,85    |
| 10 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                   | 81,25    |
| 11 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 78,77    |
| 12 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan                     | 72,46    |
| 13 | Kementerian Kesehatan                                                               | 77,24    |
| 14 | Kementerian Agama                                                                   | 58,69    |
| 15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                  | 91,47    |
| 16 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   | 77,61    |
| 17 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                          | 75,23    |
|    | <b>LPNK</b>                                                                         |          |
| 18 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)                                    | 79,75    |
| 19 | Badan Kepegawaian Negara (BKN)                                                      | 82,57    |
| 20 | Badan Narkotika Nasional (BNN)                                                      | 70,45    |
| 21 | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)                                               | 65,79    |
| 22 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)                                      | 73,35    |
| 23 | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                         | 61,51    |
| 24 | Badan Standardisasi Nasional (BSN)                                                  | 87,08    |
| 25 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)                                              | 64,41    |
| 26 | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)                                  | 61,5     |
| 27 | Badan Informasi dan Geospasial (BIG)                                                | 62,23    |
| 28 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)                          | 68,07    |
| 29 | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)                                              | 84,49    |
| 30 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI)/BNP2TKI                          | 81,62    |
|    | <b>ALAT NEGARA/APARAT PENEGAK HUKUM</b>                                             |          |
| 31 | Kejaksaan Agung                                                                     | 79,63    |
| 32 | Badan Intelijen Negara (BIN)                                                        | 73,55    |

| No | NAMA K/L/PEMDA                                 | KOMPOSIT |
|----|------------------------------------------------|----------|
|    | <b>LEMBAGA NEGARA</b>                          |          |
| 33 | Setjen DPD                                     | 82,78    |
| 34 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)                 | 76,25    |
| 35 | Komisi Yudisial (KY)                           | 64,15    |
| 36 | Mahkamah Konstitusi (MK)                       | 82,33    |
| 37 | Mahkamah Agung (MA)                            | 64,48    |
|    | <b>LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA</b>              |          |
| 38 | Bada Riset dan Inovasi Nasional                | 64,38    |
|    | <b>LNS</b>                                     |          |
| 39 | Ombudsman                                      | 80,13    |
| 40 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan            | 81,35    |
| 41 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)   | 69,8     |
| 42 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) | 70,59    |
| 43 | Komisi Pemilihan Umum (KPU)                    | 70,61    |
| 44 | Badan Pengawasan Pemilihan Umum                | 68,07    |
| 45 | Setjen Dewan Ketahanan Nasional                | 77,4     |
| 46 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi       | 75,23    |
| 47 | Setjen Dewan Energi Nasional                   | 75,23    |
|    | <b>PEMERINTAH DAERAH</b>                       |          |
| 48 | Provinsi NTT                                   | 67,4     |
| 49 | Provinsi Kalimantan Utara                      | 73,12    |
| 50 | Provinsi Banten                                | 69,79    |
| 51 | Provinsi Bali                                  | 67,17    |
| 52 | Provinsi Lampung                               | 69,74    |
| 53 | Provinsi Riau                                  | 72,62    |
| 54 | Provinsi Jawa Tengah                           | 74,71    |
| 55 | Kabupaten Bekasi                               | 79,55    |
| 56 | Kota Bogor                                     | 86,97    |
| 57 | Kab. Aceh Besar                                | 67,2     |
| 58 | Kota Sabang                                    | 69,32    |
| 59 | Kab. Indragiri Hilir                           | 69,31    |
| 60 | Kab. Indragiri Hulu                            | 68,89    |
| 61 | Kabupaten Kampar                               | 71,13    |
| 62 | Kabupaten Pelalawan                            | 64,04    |
| 63 | Kabupaten Rokan Hilir                          | 61,96    |
| 64 | Kota Dumai                                     | 63,31    |
| 65 | Kota Pekanbaru                                 | 61,65    |
| 66 | Kabupaten Batanghari                           | 66,18    |
| 67 | Kabupaten Bungo                                | 61,61    |
| 68 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat                 | 63,307   |
| 69 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur                 | 64,307   |
| 70 | Kabupaten Tebo                                 | 64,307   |
| 71 | Kota Jambi                                     | 69,682   |
| 72 | Kabupaten Lahat                                | 77,78    |
| 73 | Kabupaten Muara Enim                           | 75       |
| 74 | Kabupaten Musi Rawas Utara                     | 66,16    |
| 75 | Kota Pagar Alam                                | 66,16    |
| 76 | Kabupaten Bangka                               | 69,021   |
| 77 | Kabupaten Bangka Barat                         | 67,771   |
| 78 | Kabupaten Bangka Tengah                        | 63,557   |

| <b>No</b> | <b>NAMA K/L/PEMDA</b>        | <b>KOMPOSIT</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 79        | Kabupaten Karawang           | 67,414          |
| 80        | Kabupaten Sumedang           | 62,248          |
| 81        | Kota Banjar                  | 63,105          |
| 82        | Kabupaten Tasikmalaya        | 77,18           |
| 83        | Kabupaten Serang             | 65,807          |
| 84        | Kota Tangerang               | 69,521          |
| 85        | Kabupaten Kendal             | 67,959          |
| 86        | Kabupaten Batul              | 78,94           |
| 87        | Kabupaten Gunung Kidul       | 64,39           |
| 88        | Kabupaten Kulon Progo        | 60,6            |
| 89        | Kabupaten Selman             | 68,27           |
| 90        | Kota Yogyakarta              | 66,27           |
| 91        | Kabupaten Balangan           | 62,87           |
| 92        | Kabupaten Tabalog            | 72,54           |
| 93        | Kabupaten Barito Selatan     | 61,21           |
| 94        | Kabupaten Barito Timur       | 68,9            |
| 95        | Kabupaten Barito Utara       | 66,4            |
| 96        | Kabupaten Kapuas             | 61,59           |
| 97        | Kabupaten Katingan           | 62,02           |
| 98        | Kabupaten Kotawaringin Timur | 64,77           |
| 99        | Kabupaten Lamandau           | 70,71           |
| 100       | Kabupaten Seruyan            | 67,27           |
| 101       | Kabupaten Sukamara           | 64,77           |
| 102       | Kabupaten Tanah Laut         | 75,91           |
| 103       | Kabupaten Manggarai          | 62,59           |
| 104       | Kabupaten Manggarai Timur    | 61,83           |
| 105       | Kota Banjar Baru             | 66,84           |
| 106       | Kota Banjarmasin             | 73,17           |
| 107       | Kabupaten Banyuwangi         | 65,75           |
| 108       | Kabupaten Bojonegoro         | 61,36           |
| 109       | Kabupaten Bondowoso          | 62,07           |
| 110       | Kabupaten Jombang            | 65,06           |
| 111       | Kabupaten Kediri             | 60,5            |
| 112       | Kabupaten Lamongan           | 64,57           |
| 113       | Kabupaten Lumajang           | 65,57           |
| 114       | Kabupaten Madiun             | 62,13           |
| 115       | Kabupaten Magetan            | 65,61           |
| 116       | Kabupaten Mojokerto          | 61,79           |
| 117       | Kabupaten Ngawi              | 62,99           |
| 118       | Kabupaten Pacitan            | 64,56           |
| 119       | Kota Kediri                  | 63,7            |
| 120       | Kabupaten Badung             | 66,03           |
| 121       | Kabupaten Gianyar            | 67,17           |
| 122       | Kabupaten Klungkung          | 63,2            |
| 123       | Kabupaten Kupang             | 60,04           |
| 124       | Kabupaten Manggarai          | 62,83           |
| 125       | Kabupaten Manggarai Timur    | 59,06           |
| 126       | Kabupaten Sumba Barat        | 58,86           |
| 127       | Kabupaten Sumba Tengah       | 61,48           |
| 128       | Kabupaten Sumba Timur        | 60,79           |

| <b>No</b> | <b>NAMA K/L/PEMDA</b>        | <b>KOMPOSIT</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 129       | Kabupaten Timor Tengah Utara | 59,27           |
| 130       | Kota Kupang                  | 76,18           |
| 131       | Kabupaten Maluku Tengah      | 66.06           |
| 132       | Kabupaten Maluku Tenggara    | 68,19           |